

## TESIS

# PENERAPAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN MOJOKERTO



**EDY TAMBENG WIDJAJA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

# **TESIS**

## **PENERAPAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**EDY TAMBENG WIDJAJA  
NIM : 090310659 - L**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PENERAPAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN  
PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN IRIGASI  
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Ilmu Sosial  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**EDY TAMBENG WIDJAJA**

**NIM : 090310659 - L**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

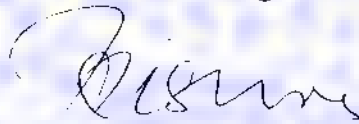
**Tanggal 30 Desember 2005**

..

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 DESEMBER 2005**

Oleh

Pembimbing I



Drs. Wisnu Pramutanto P., MSi.  
NIP. 131 453 124

Pembimbing II



Dra. Siti Aminah, MA  
NIP. 131 836 624

Mengetahui

KPS



Prof. Dr. Drs. L. Dyson P. , MA  
NIP. 130 937 724

Telah diuji pada  
Tanggal 30 Desember 2005  
PANITIA PENGUJI TESIS,

Ketua : Drs. Priyatmoko, MA

Anggota : 1. Drs Wisnu Pramutanto P., MSi  
2. Dra Siti Aminah, MA  
3. Drs. Gitadi Tegas S., MSi  
4. Drs. Haryadi, MSi

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya sampai terselesaikannya tesis ini saya sampaikan kepada:

1. Pemerintah Propinsi Jawa Timur c.q. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, atas kesempatan dan bea siswa Program Magister Manajemen Pemerintahan dan Politik Lokal di Universitas Airlangga Surabaya, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Kepala Sub Bidang Prasarana Sumberdaya Air atas perkenan dan ijinnya serta segala fasilitas yang telah diberikan.
2. Bapak/Ibu pengelola dan pengajar, serta pembimbing penulisan tesis ini. Bapak Drs. Wisnu Pramutanto P., MSi dan Ibu Dra. Siti Aminah, MA, atas bimbingan dan saran yang diberikan dengan penuh kesabaran dan perhatian.
3. Pemerintah Kabupaten Mojokerto c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pengairan beserta staf serta Pengurus Gabungan HIPPA Tirto Agung dan Tirto Asri atas data dan informasinya guna penulisan tesis ini.
4. Bapak Drs. H. Hardito dan Ibu Hj. Asmaniatin, Bapak H. Karyana, BA dan Ibu Hj. Soedjimah, serta istri tercinta Ade' Kuntarti Sri Rejeki, S.Pi. dan anak-anak tersayang, Ananda Andyka Hardiyana Ramadhan dan Bimasakti Rahardiyani Sani, atas do'a restu dan dorongan yang telah dicurahkan dengan penuh kasih sayang dan pengertian.
5. Teman-teman Angkatan I Program Magister Manajemen Pemerintahan dan Politik Lokal Universitas Airlangga Surabaya, dan teman-teman di Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah memberikan balasan pahala yang berlipat kepada Bapak/Ibu/Saudara. Saya menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian saya berharap semoga tesis ini bermanfaat.

Penulis

## RINGKASAN

### **Penerapan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Mojokerto**

Proses pembangunan yang *top down* membawa dampak kepada ketidakberdayaan masyarakat baik politik, ekonomi maupun sosial. Situasi masyarakat yang berkembang dengan cepat mengakibatkan perubahan wawasan pengembangan masyarakat yang lebih terbuka. Berdasarkan kondisi tersebut menjadikan sistem pengelolaan irigasi terdapat dua sistem pengelolaan yaitu pengelolaan irigasi oleh pemerintah dan masyarakat petani. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan berbagai sejarah perjalanan pengelolaan irigasi yang dikaitkan dengan fenomena yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri, akan dideskripsikan bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pengelolaan irigasi pada dua sistem pengelolaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan irigasi yang antara lain adalah (1). Bagaimana implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi, (2) Bagaimana efisiensi pengelolaan irigasi terkait dengan implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dan (3) bagaimana pengelolaan irigasi kedepan sesuai dengan prinsip *good governance* dan respon masyarakat.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *deskriptif* dengan metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan *purposive sampling* dan analisa data dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, selanjutnya dengan mendisplay data untuk keperluan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan pada kedua Daerah Irigasi sudah menerapkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, namun melakukannya dengan cara yang berbeda, hal ini tergantung dengan siapa yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam pengelolaan irigasi. Namun demikian dalam efisiensi pengelolaannya akan lebih efisien apabila hal itu dilakukan secara bersama-sama. Oleh karenanya kedepan pengelolaan irigasi disamping dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi juga perlu adanya penyerahan kewenangan dan kekuasaan kepada petani dalam pengelolaannya.

## SUMMARY

### **Implementation of Transparency, Accountability and Participation on Irrigation Management at Kabupaten Mojokerto**

Development process with *top down* policy has impacted to disempowerment of people in politic, economic and social. Condition of society that is growing rapidly have consequences to change people idea with more openly. Based on its condition irrigation management system derived into two management system, are government management and people (farmers) management. Therefore overviewed trough history of management irrigation on Indonesia and the other country which is related with its phenomenal currently, will be described how implementation of transparency, accountability and participation for irrigation management in two ways management system. Purpose of this study is to describe implementation of irrigation management, instead of (1) How implementation of transparency, accountability and participation on irrigation management, (2) How efficiency of irrigation management with implementation of transparency, accountability and participation and (3) How irrigation management in the future according to the *good governance* values and society response.

Specification of study was description study , with method of data taking was indepth interview, and analisis data used with collecting data, reduction data and data display for result conclusion.

Based on data analysis have been taking. conclusion that on two irrigation area have implemented of transparency, accountability and participation different ways, its depend on who have of authority and governs on irrigation management system. However, on efficiency of its irrigation management, it will be more efficien. if management system done by its together and not centralistic management. Therefore, implementation of irrigation management which is implementing of transparency, accountablity and participation, also its entrusted the authority and powerfull to the people (farmer) for irrigation management on future.



## **ABSTRACT**

### **Implementation of Transparency, Accountability and Participation on Irrigation Management at Kabupaten Mojokerto**

Purpose of this study is to describe implementation of irrigation management, instead of (1) How implementation of transparency, accountability and participation on irrigation management, (2) How efficiency of irrigation management with implementation of transparency, accountability and participation and (3) How irrigation management in the future according to the good governance values and society response.

Specification of study was description study, with method of data taking was indepth interview, and analysis data used with collected data, reduction data and data display data for result conclusion.

Based on data analysis have been taking conclusion that on two irrigation area have implemented of transparency, accountability and participation different ways, its depend on who have of authority and governs on irrigation management system. However on efficiency of its irrigation management, it will be more efficien, if management system done by its together and not centralistic management. There for, implementation of irrigation management which is implementing of transparency, accountability and participation, also its entrusted the authority and powerfull to the people (farmer) for irrigation management on future

Keywords : transparency, accountability, participation, efficiency, irrigation management

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Prasyarat Gelar .....	iii
Persetujuan .....	iv
Penetapan Panitia .....	v
Ucapan terima kasih .....	vi
Ringkasan .....	vii
Summary .....	viii
Abstrak .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	1
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	7
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	25
3.2. Teknik Pengambilan Data .....	25
3.2.1. Jenis Data .....	26
3.2.2. Nara sumber/ informan .....	29
3.2.3. Metode Pengambilan Data .....	33
3.2.4. Instrumen Penelitian .....	33
3.3. Teknik Analisa .....	33
3.3.1. Klasifikasi Konsep dan Variabel .....	34
3.3.2. Definisi Operasional Konsep dan Variabel .....	42
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
<b>BAB 4 DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
4.1. Data Penelitian .....	44
4.1.1. Informasi Umum Wilayah Penelitian .....	47
4.1.2. Faktor Internal Pengelolaan Irigasi .....	47
4.1.2.1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelola Irigasi .....	65
4.1.2.2. Teknis Pengelolaan Irigasi .....	68
4.1.3. Faktor Eksternal Pengelolaan Irigasi .....	69
4.1.3.1. Interelasi HIPPA dengan Organisasi Sosial lain .....	72
4.1.3.2. Interelasi HIPPA dengan Lembaga Pemerintah .....	76
4.2. Analisis Hasil Penelitian .....	77
4.2.1. Penerapan Good Governance .....	77
4.2.1.1. Daerah Irigasi Menturus .....	77

4.2.1.2. Daerah Irigasi Penewon .....	89
4.2.2. Efisiensi Pengelolaan Irigasi .....	103
4.2.3. Respon Masyarakat thd Pengelolaan Irigasi Kedepan .....	110
<b>BAB 5 PEMBAHASAN .....</b>	<b>117</b>
5.1. Penerapan Nilai-Nilai Good Governance .....	117
5.2. Efisiensi Pengelolaan Irigasi .....	127
5.3. Respon Masyarakat thd Pengelolaan Irigasi ke depan .....	131
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>137</b>
6.1. Kesimpulan .....	137
6.2. Saran .....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>144</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	: Alokasi Dana APBD Propinsi Jawa Timur untuk O&P/ Rehab dan Pembangunan pada Dinas PU Pengairan .....	5
Tabel 1.2	: Implikasi penerapan Penyerahan Pengelolaan Irigasi terhadap Intensitas Tanam Padi di Beberapa Daerah Irigasi di Jawa Timur .....	6
Tabel 4.1	: Kondisi Topografi Kabupaten Mojokerto .....	45
Tabel 4.2	: Daerah Irigasi/Jaringan Irigasi di Wilayah Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto .....	45
Tabel 4.3	: Organisasi Pengelola Irigasi .....	50
Tabel 4.4	: Pemilihan Pengurus Irigasi .....	55
Tabel 4.5	: Peran dan Fungsi Pengurus .....	57
Tabel 4.6	: Kinerja Pengelolaan Irigasi .....	59
Tabel 4.7	: Pendanaan Pengelolaan Irigasi .....	64
Tabel 4.8	: Teknis Pengelolaan Irigasi .....	68
Tabel 4.9	: Analisa Penerapan <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Irigasi dalam Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Menturus .....	87
Tabel 4.10	: Analisa Penerapan <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Irigasi dalam Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Penewon .....	100
Tabel 4.11	: Analisa Efisiensi Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Menturus .....	106
Tabel 4.12	: Analisa Efisiensi Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Penewon .....	109
Tabel 4.13	: Pengelolaan Irigasi Kedepan pada Daerah Irigasi Menturus .....	112
Tabel 4.14	: Pengelolaan Irigasi Kedepan pada Daerah Irigasi Penewon .....	115
Tabel 6.1	: Efisiensi dengan penerapan <i>Good Governance</i> .....	139

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : “Tangga Partisipasi” Sherry Arnstein .....	20
Gambar 3.1 : Bagan Desain Analisis Penerapan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Irigasi	41
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pengelola Irigasi pada Daerah Irigasi Menturus .....	52
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Pengelola Irigasi pada Daerah Irigasi Penewon .....	53
Gambar 4.3 : Skema Organisasi Gabungan HIPPA Tirta Agung .....	70
Gambar 4.4 : Skema Organisasi Kelompok Tani Surya Sari .....	71
Gambar 4.5 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Kelompok Tani di Daerah Irigasi Menturus .....	84
Gambar 4.6 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Lembaga Tradisonal di Daerah Irigasi Menturus .....	85
Gambar 4.7 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Pusat di Daerah Irigasi Menturus .....	86
Gambar 4.8 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Kabupaten di Daerah Irigasi Menturus .....	86
Gambar 4.9 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Desa di Daerah Irigasi Menturus .....	87
Gambar 4.10 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Kelompok Tani di Daerah Irigasi Penewon .....	98
Gambar 4.11 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Lembaga Tradisonal di Daerah Irigasi Penewon .....	98
Gambar 4.12 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten di Daerah Irigasi Penewon .....	99
Gambar 4.13 : Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Desa di Daerah Irigasi Penewon .....	100

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	144
Lampiran 2 : Jadwal Penelitian .....	146
Lampiran 3 : Peta Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto .....	147
Lampiran 4 : Peta Daerah Irigasi Menturus .....	148
Lampiran 5 : Peta Daerah Irigasi Penewon .....	149

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Peran sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari air. Oleh karenanya irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting.

Pembangunan yang telah berlangsung, khususnya di Indonesia dan pada umumnya di negara berkembang, banyak menimbulkan persoalan bagi masyarakatnya. Persoalan utama dan paling penting adalah bahwa pembangunan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah dengan cara memaksa, menekan dan hasil yang diperoleh adalah ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi. Disatu pihak orang yang terkait dengan penguasa akan mendapatkan sumber yang melimpah, sedangkan rakyat menjadi obyek pembangunan yang menguntungkan para elite yang dekat dengan kekuasaan atau birokrasi pemerintah. Pembangunan yang selama ini dilakukan menimbulkan dampak ketimpangan yang tidak saja dalam hubungan antara Kota dan Perdesaan, namun sampai kepada ketimpangan terhadap peran serta kaum perempuan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dadang Juliantara( 2000), bahwa:

“Masalah penguasaan tanah, skema global (revolusi hijau), dan berbagai masalah lain, merupakan kenyataan, dimana ketidakadilan dan ketimpangan menjadi fondasi pembangunan. Yang terjadi justru suatu marginalisasi, di mana rakyat desa tetap tidak beranjak, sementara itu masalah lain, seperti lingkungan hidup yang hancur, marginalisasi kaum perempuan, sampai pada penggusuran pengetahuan lokal. Pembangunan yang berjalan tanpa

mempersoalkan struktur sosial yang ada, pada dasarnya hanya mengukuhkan struktur ketidakadilan yang ada”.

Kondisi sebagaimana telah diuraikan, menjadikan proses degradasi terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan irigasi, dimana dalam pengelolaan irigasi telah terjadi ketimpangan dalam penguasaan dalam memobilisasi sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia maupun alamnya. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menentukan kehidupan dan nasibnya sendiri dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan alam yang ada, namun semuanya telah dikelola dan dikuasai oleh para elit yang dekat dengan kekuasaan pemerintahan masa Orde Baru melalui sentralisasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi baik jaringan utama maupun tersier dengan alasan untuk efisiensi waktu pelaksanaan. Hal ini membuat semakin lemahnya posisi daerah, dan hilangnya otonomi rakyat dalam mengelola irigasi serta semakin terpuruknya kelembagaan masyarakat petani yang mengelola irigasi.

Proses degradasi kewenangan pengelolaan irigasi sebagaimana tersebut, memberikan gambaran bagaimana proses degradasi peran masyarakat petani selanjutnya dapat berdampak kepada perusakan nilai-nilai kerjasama dan semangat otonomi dari lembaga pengelola irigasi di masyarakat, sehingga pembangunan irigasi dapat dikatakan lebih menguntungkan para kontraktor dan birokratnya daripada para petani. Dari sejumlah besar pembangunan fisik seringkali menghasilkan kualitas yang buruk dan mudah rusak, dimana petani dianggap tidak memiliki hak atas pembangunan tersebut, dan semua urusan pembangunan irigasi di tingkat sekunder dan primer adalah urusan pemerintah.



Proses pembangunan yang *top down* tersebut berdampak kepada ketidakberdayaan masyarakat baik politik, ekonomi dan sosial, masyarakat menyimpan konflik laten yang sangat tinggi akibat ketidakpuasan mereka terhadap pelaksanaan pembangunan yang sulit dikritik oleh rakyat. Konflik laten tersebut menjadi konflik terbuka ketika reformasi mulai sebagai reaksi dari kegagalan Orde Baru dimana pembangunan nasional telah menciptakan krisis pada negara dan menimbulkan pengkayaan pada golongan orang yang dekat dengan kekuasaan. Situasi masyarakat yang berubah cepat mengakibatkan perubahan wawasan pengembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang telah terbuka. Disamping itu strategi pembangunan dan pengelolaan irigasi yang *top down* mempunyai berbagai kelemahan yang ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan cepatnya terjadi kerusakan pada jaringan irigasi, sebagaimana ditulis oleh Simon I. Himawan (dalam Sudar D. Atmanto, 2004) bahwa :

“tingkat kerusakan jaringan irigasi di seluruh Indonesia pada tahun lalu sudah mencapai 20 %, saat ini sudah mencapai 30 % atau apabila dihitung berdasarkan perkiraan nilai aset irigasi saat ini yaitu sekitar 273 trilyun rupiah, maka kerusakan yang terjadi ekuivalen dengan nilai sebesar 90 trilyun rupiah.”

Kondisi sebagaimana tersebut , mengakibatkan timbulnya tuntutan tentang pemikiran baru yang sejalan dengan perubahan sikap akibat tekanan dalam sistem pembangunan nasional. Filosofi dan asumsi perubahan tersebut adalah bahwa masyarakat terbelakang dan tidak maju bukan karena pada dasarnya mereka bodoh, akan tetapi mereka tidak maju karena sistem pembangunan yang menekan dan memaksa mereka. Tekanan struktural ini berakibat pada kemandirian yang semula ada menjadi hilang dan selanjutnya menjadikan masyarakat yang tidak berdaya.

Oleh karenanya pengelolaan irigasi kedepan sesuai dengan pemikiran baru tersebut adalah bahwa petanilah yang mengatur dirinya sendiri, mengelola, menentukan pengelolaan jaringan irigasi yang semula dikuasai oleh pemerintah, sebaliknya pemerintah dengan tumbuhnya pemikiran baru tersebut memiliki kewajiban untuk memfasilitasi petani yang didukung oleh pihak-pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Usahawan.

Dengan dipindahnya kewenangan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada petani, telah membawa dampak kepada efisiensi pengelolaan irigasi yang antara lain seperti pembiayaan operasi dan pemeliharaan dapat ditekan seminimal mungkin, hal ini dimungkinkan karena dengan adanya penyerahan tersebut kegiatan operasi dan pemeliharaan dapat dilakukan secara rutin oleh petani dibandingkan dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu dengan adanya penyerahan tersebut rehabilitasi dan perbaikan berat dapat dihindari, hal ini karena sebelum sarana dan prasarana pengairan rusak sudah mendapatkan penanganan lebih dahulu, sehingga kerusakan berat yang membutuhkan biaya besar untuk perbaikannya dapat dihindari. Selanjutnya dengan semakin terpeliharanya fungsi sarana dan prasarana irigasi dapat meningkatkan produksi pertanian dan berujung pada meningkatnya kesejahteraan petani. Penyerahan pengelolaan irigasi kepada masyarakat petani juga sudah dilakukan di beberapa negara dan menunjukkan kesuksesan, seperti Meksiko, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Taiwan (Vermillion dan Johnson, 1995 dalam Arif, S. S., 1999). disamping berbagai fenomena di luar negeri tersebut, fenomena didalam negeri adalah pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh masyarakat Bali melalui sistem subak bisa berjalan dengan efektif dan baik dalam pengelolaan irigasinya. Sebagai gambaran dapat

dilihat dari aspek pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi yang cenderung menurun sejak diterapkannya penyerahan pengelolaan jaringan irigasi kepada masyarakat, sebagai berikut:

**Tabel 1.1:** Alokasi Dana APBD Propinsi Jawa Timur untuk O&P/Rehab dan Pembangunan pada Dinas PU Pengairan

TAHUN	DINAS PU PENGAIRAN			
	O&P / Rehabilitasi	%	Pembangunan	%
2000	44.765.200	99	571.800	1
2001	81.275.838	98	2.075.000	2
2002	73.201.485	95	4.150.000	5
2003	59.729.495	98	1.400.000	2
2004	56.498.838	96	2.300.000	4

Sumber: Data diolah dari Alokasi Anggaran Pembangunan (A2P) Pemerintah Propinsi Jawa Timur - BAPPEPROP Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 sebagaimana tersebut, nampak bahwa pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi menurun setelah adanya partisipasi petani aktif dilakukan yaitu berupa penyerahan pengelolaan jaringan irigasi setelah tahun 2001. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, dijelaskan bahwa pada dasarnya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan adalah merupakan kegiatan yang ditujukan hanya untuk mengoptimalkan dan melestarikan fungsi sarana dan prasarana sumberdaya air. Dengan menurunnya pengalokasian pembiayaan untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan ini menunjukkan adanya salah satu dampak efisiensi, khususnya dalam pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, karena pemeliharaan rutin dapat dilakukan secara teratur dan

pendanaan untuk perbaikan berat kerusakan akibat umur bangunan dapat dihindarkan.

Disamping itu dengan diteruskannya pengelolaan jaringan irigasi kepada masyarakat dapat berdampak kepada meningkatnya intensitas tanam pada beberapa Daerah Irigasi yang sudah menerima penyerahan pengelolaan irigasi sebagaimana berikut:

**Tabel 1.2** : Implikasi penerapan Penyerahan Pengelolaan Irigasi terhadap Intensitas Tanam Padi di Beberapa Daerah irigasi di Jawa Timur

NO	DAERAH IRIGASI (DI)	1999/2000		2000/2001		2001/2002	
		HULU	HILIR	HULU	HILIR	HULU	HILIR
1	DI Pehngaron Kab. Mojokerto	120	100	200	150	200	180
2	DI Bareng Kab. Jombang	120	100	150	130	200	150
3	DI Dander Kab. Bojonegoro	120	-	170	170	170	170
4	DI Sumber. Bendo Jeruk Kab. Probolinggo	120	-	120	120	180	140
5	DI Banyuputih Kab. Situbondo	120	-	170	120	180	120

Sumber : *Proyek Java Irrigation Water Resources Management Project – Irrigation Development Turn Over (JIWMP-IDTO)*. Departemen Kimpraswil, 2003

Berdasarkan hasil pendataan intensitas tanam pada areal irigasi yang sudah menerima penyerahan kewenangan pengelolaan, menunjukkan adanya peningkatan kinerja layanan pemenuhan kebutuhan air baku bagi areal irigasi. seperti contohnya yang paling ekstrim dapat diambil pada Daerah Irigasi Dander Kabupaten Bojonegoro yang semula pada Tahun 1999/2000 di daerah hilirnya selalu tidak mendapatkan air irigasi sehingga tidak mampu melakukan kegiatan pertanian, dengan penyerahan pengelolaan irigasi pada tahun berikutnya yaitu pada Tahun

2000/2001 mampu melakukan kegiatan pertanian, disamping itu bagi Daerah Irigasi yang sudah mampu melakukan kegiatan pertanian, pada tahun berikutnya mampu meningkatkan intensitas tanamnya. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa penyerahan kewenangan pengelolaan kepada masyarakat petani berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan jaringan irigasi.

## 1.2. Rumusan masalah

Pemberdayaan lembaga pengelola irigasi pada dasarnya merupakan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah kepada masyarakat petani, sehingga petani betul-betul berdaulat dalam mengurus kepentingannya, khususnya kepentingan dalam pengelolaan irigasi. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat akan ditingkatkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang (Pusposutarjo, 1997).

Sejalan dengan semangat reformasi yang lebih cenderung pada tuntutan untuk merealisasi penerapan nilai-nilai *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) pada segala tatanan pemerintahan di Indonesia termasuk dalam pengelolaan irigasi. maka pemerintah berupaya untuk memberdayakan petani agar secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi dengan menerbitkan Maklumat Pembaharuan Pengelolaan Irigasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). dan untuk memperkuat lagi diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi yang intinya menekankan pada pemberdayaan organisasi petani pengelola irigasi untuk

mengurus secara mandiri jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya dengan prinsip “Dari, oleh dan untuk petani”.

Namun demikian kemampuan dan kondisi sosio-kultural masyarakat aparat pemerintah tidaklah sama, sehingga implementasi berbagai kebijakan tersebut dalam prosesnya banyak mengalami banyak hambatan, termasuk didalamnya hambatan mengenai pemahaman prinsip pemberdayaan kepada organisasi petani pengelola irigasi terhadap efisiensi pengelolaan irigasi. Hal ini berdampak kepada perselisihan pemahaman baik secara vertikal yaitu antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota), maupun horizontal yaitu antar Departemen dan lembaga lain di Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota).

Dampak dari perselisihan implementasi kebijakan yang sudah diterbitkan, memunculkan kebijakan pemerintah yang baru yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air, yang intinya dalam penjelasan Pasal 42 adalah penarikan kembali kewenangan pengelolaan irigasi dari organisasi petani pengelola irigasi kepada pemerintah, dengan alasan bahwa pemberian kewenangan pengelolaan irigasi kepada organisasi petani pengelola irigasi telah membebani dan memberatkan petani itu sendiri, sehingga efisiensi pengelolaan irigasi menjadi tidak tercapai seperti yang diharapkan.

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan berbagai sejarah perjalanan pengelolaan irigasi yang dikaitkan dengan berbagai fenomena yang ada baik di dalam maupun di luar negeri serta efisiensi pengelolaan irigasi, maka rumusan permasalahan yang hendak dijawab dalam studi adalah:

1. Bagaimana penerapan *Good Governance* khususnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi?

2. Bagaimana efisiensi pengelolaan irigasi terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi petani?
3. Bagaimana respon masyarakat (petani) dalam pengelolaan irigasi kedepan sesuai dengan nilai-nilai *Good Governance*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian penerapan *Good Governance* (Transparansi, akuntabilitas & partisipasi) dalam pengelolaan irigasi yaitu:

- a. Menginventarisasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dari implementasi *good governance* (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) petani dalam pengelolaan irigasi.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh implementasi nilai-nilai *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi terhadap efisiensi pengelolaan irigasi.
- c. Merumuskan pengelolaan irigasi yang paling efisien sesuai dengan nilai-nilai *good governance*

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan gambaran/mendiskripsikan mengenai pengelolaan irigasi dengan penerapan nilai-nilai *Good Governance* pada Daerah Irigasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Daerah Irigasi yang dikelola oleh masyarakat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di tingkat petani, faktor-faktor penyebab peningkatan

serta pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi itu sendiri terhadap efisiensi pengelolaan irigasi, oleh karenanya manfaat yang dapat diperoleh dengan penelitian penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi adalah:

- a. Memberikan sumbangan penambahan wawasan reflektif teoritik tentang *Good Governance* dalam pemberdayaan petani pengelola irigasi melalui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dikaitkan dengan impelementasinya dilapangan.
- b. Mengetahui secara pasti dilapangan bagaimana penerapan nilai-nilai *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi.
- c. Mengetahui faktor-faktor penyebab dan penghalang dari petani untuk melakukan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi
- d. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan pengelolaan irigasi dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap petani pengelola irigasi untuk menciptakan pengelolaan irigasi yang efisien dan tepat sasaran.
- e. Memberikan sumbangan pengembangan wawasan masyarakat utamanya petani pengelola irigasi, sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi.



## BAB 2

### KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

Kerangka pemikiran teoritik yang berkaitan dengan studi Penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi, adalah diawali dari pemikiran tentang hal ikhwal tentang irigasi yang didefinisikan sebagai upaya manusia untuk mengambil air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikan ke petak sawah, memberikan air pada tanaman dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang. Unsur yang berpengaruh terhadap irigasi antara lain adalah sebagai berikut: (1) unsur manusia; (2) unsur alam dan lingkungan, yang antara lain meliputi air dan sumber-sumber air, lahan dan iklim; (3) Unsur fisik; yaitu berupa jaringan irigasi pada daerah irigasi; (4) Unsur tanaman; yang mencakup berbagai jenis tanaman budidaya beserta pola tata tanamnya; (5). Unsur Teknis, yaitu berupa kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Kelima unsur tersebut harus saling bersesuaian, berhubungan dan bersatu sehingga dapat dikatakan bahwa irigasi merupakan suatu sistem. sedangkan untuk masing-masing unsur tersebut disebut juga dengan sub sistem. Oleh sebab itu irigasi sering disebut sebagai sistem irigasi, karena sistem irigasi tersebut dibangun dan dikelola untuk tujuan kesejahteraan manusia, sehingga unsur manusia menjadi unsur utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi.

Menurut Pusposutardjo (1995) keselarasan pembangunan irigasi yang sesuai dengan transformasi pertanian antara lain adalah (1) irigasi sebagai prasarana penyediaan air harus mampu mendukung penganeka ragam usaha tani sesuai dengan permintaan produk niaga yang berubah-ubah; (2). Keandalan pelayanan irigasi yang tinggi diperlukan untuk mengimbangi curahan modal usaha

tani yang tidak lagi bertumpu pada lahan; (3). Organisasi irigasi ditingkat petani menjadi satu kesatuan organisasi irigasi pengelolaan usaha tani yang berupa perusahaan pertanian dengan ketentuan ikatan dalam institusi secara tertulis.(4). Hubungan antar organisasi di tingkat petani dengan organisasi irigasi di tingkat jaringan utama harus jelas, terstruktur dalam ikatan institusional secara tertulis. (5). Hubungan institusional jasa pelayanan penyediaan air dengan pemakaian air dilakukan atas dasar prinsip imbalan jasa perusahaan.

Apabila diamati lebih lanjut dari kelima persyaratan tersebut berkaitan dengan kinerja irigasi sebagai sub sistem sosio teknis, maka Hupert dan Walker (Pusposutardjo, 1995), sistem irigasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Sistem sosio teknis yang menekankan pada interaksi dari atribut-atribut sub sistem teknis dan sub sistem sosial, yaitu sebagai bangunan-bangunan irigasi serta sebagai institusi kelompok petani pemakai air.(2) Bersifat terbuka, berinteraksi timbal balik dengan lingkungannya, (3). Berwawasan pencapaian tujuan yang ditentukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Apabila dilihat dari fungsi Irigasi, maka dapat diketahui bahwa irigasi berfungsi sebagai pelayanan pemenuhan kebutuhan air baku bagi irigasi kepada masyarakat yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat (petani). Oleh karenanya kebijakan publik yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka keirigasian haruslah mengacu dan mendasarkan seluruh kegiatannya kepada kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik dapat difahami sebagai (1) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu

demi kepentingan seluruh masyarakat. Hakekat dari kebijakan publik atau kebijaksanaan pemerintah adalah merupakan suatu keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (*public interest*) yang merupakan keseluruhan dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (*demand*) dari masyarakat.

Pengertian kebijakan publik menurut beberapa ahli bermacam-macam yang antara lain sebagai berikut: (1) *Thomas R. Dye*, Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan; (2) *Anderson*, serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu; (3) *Mustopadidjaja*, suatu keputusan yang dibuat dengan melibatkan publik atau yang mewakilinya dan substansinya untuk kepentingan atau berpihak pada publik (Sudarto, 2004).

Berdasarkan berbagai pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut dapat diambil sebuah pengertian yang sederhana (Islamy, 1984) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Sehingga implikasi dari kebijakan tersebut antara lain adalah (1) bentuknya berupa tindakan pemerintah; (2) Tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi juga dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, (3) Baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, (4) harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik ini dapat berjalan dengan baik apabila didasari dengan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada lembaga pengelola tersebut. Semua lapisan masyarakat pasti mengerti apa yang dimaksud dengan kekuasaan, namun demikian para ahli sosiologi banyak yang sempat bingung untuk mendefinisikan secara tepat dan mencakup seluruh pengertian yang terkandung didalamnya. Menurut Roderick (1990) mengatakan bahwa dalam pengertian umum kekuasaan tampaknya mengacu pada suatu jenis pengaruh yang dimanfaatkan oleh si obyek, individu atau kelompok terhadap yang lainnya.

Menurut beberapa ahli yang dikutip dari Abdulsyani (1994) tentang kekuasaan antara lain adalah sebagai berikut: (1) *Max Weber*, adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya didalam suatu hubungan sosial yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu, (2) *Selo Soemardjan* dan *Soelaiman Soemardi*, menjelaskan bahwa adanya kekuasaan tergantung dari yang berkuasa dan yang dikuasai, (3) *JRP Frech* dan *B. Reven*, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan potensial dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya didalam sistem yang ada, (4) *Soerjono Soekanto*, berpendapat bahwa kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat secara sederhana dikatakan bahwa arti kekuasaan adalah sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang atau pihak lain supaya tunduk dan melakukan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan, atau menurut pengertian yang lebih sederhana lagi bahwa kekuasaan mengandung unsur-unsur seperti pengaruh, kepatuhan, pemaksaan dan otoritas.

Sumber-sumber kekuasaan yang pada umumnya dimiliki oleh para penguasa atau pemimpin, baik dalam kehidupan masyarakat informal maupun dalam kehidupan organisasi formal (Abdulsyani, 1994), yaitu: (1). Kekayaan (harta benda) yang lebih banyak, (2) Status tertentu. (3). Wewenang Legal atas peraturan formal (hukum), (4). Kepercayaan khalayak terhadap seseorang yang didasarkan pada tradisi, kesucian atau adat istiadat setempat, (5) Kharisma atau wibawa seseorang. (6) Pendelegasian wewenang dari pihak atasan, (7) Kepemilikan atas keahlian, pendidikan dan pengetahuan tertentu.

Wewenang erat kaitannya dengan kekuasaan, dengan wewenang berarti seseorang mempunyai hak untuk melakukan dan menetapkan sesuatu. Jadi wewenang lebih menekankan kepada unsur hak, bukan pada kekuasaannya. Secara sosiologis wewenang merupakan suatu kekuatan yang sah untuk menjalankan kekuasaan, artinya kekuasaan baru dapat diterima oleh masyarakat apabila dilengkapi dengan adanya wewenang yang sah, baik berdasarkan hukum formal, maupun berdasarkan norma-norma sosial dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Wewenang formal berkaitan erat dengan pengakuan kelompok atau organisasi-organisasi formal yang didasarkan pada hukum yang berlaku, sedangkan wewenang non formal adalah wewenang yang didasarkan pada adat istiadat setempat.

Selanjutnya kekuasaan dan wewenang ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat yang dikuasai, apabila ada peran aktif dan dukungan dari masyarakat yang dikuasai dalam bentuk partisipasi dari masyarakat yang berdaya dan memiliki kemampuan untuk melakukan

partisipasi tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah sebagaimana diungkapkan oleh Syauckani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid (2002), bahwa

“ tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah ada dua hal yaitu: *disatu pihak*, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya, disamping itu pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. *Dilain Pihak*, dengan desentralisasi maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam menangani berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Dengan demikian akan berdampak kepada pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah”.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disampaikan, nampak bahwa pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan peran pemerintah dan masyarakat daerah harus meningkatkan kemampuan untuk berkreasi menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah dan masyarakat daerah.

Kata pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi sudah lebih dari satu dasa warsa ini menjadi kata kunci dalam bahasa masyarakat pembangunan, apalagi setelah masa reformasi berhasil menggantikan masa Orde Baru yang selama ini menjadi pelaku pembangunan di negeri ini. Pemberdayaan secara umum menurut Oakly (1991) dalam *Project With The People, International Labour Organization* adalah:

“Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri”

Menurut Nyoman Sumaryadi (2005) menyatakan bahwa secara konseptual ada lima prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu antara lain:

1. Untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelola. Namun hal ini berbeda dengan kegiatan bisnis, dimana keuntungan/pemungutan *fee* yang diperoleh dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, anantara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
4. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya (*resources*), khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai “katalis” yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro, dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Berdasarkan konsep pemberdayaan sebagaimana dimaksud, dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa: (a) pemberdayaan sangat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat baik pada tahap perencanaan program, pelaksanaan maupun tahap pengembangannya; (b) dalam pemberdayaan selalu tidak memisahkan antara pembangunan fisik proyek dengan pelatihan ketrampilan dan (c). Sumber dana bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat umumnya berasal dari anggaran pemerintah, partisipasi pihak swasta dan dari partisipasi masyarakat sendiri. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat haruslah dilakukan dalam kerangka implementasi nilai-nilai *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Transparansi dan akuntabilitas menurut Tjokroamidjojo (2001) diartikan sebagai berikut:

“Transparansi (*transparency*) adalah dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.”

“Akuntabilitas (*accountability*) adalah tanggung guagat dari pengurusan/penyelenggaraan, dari governance yang dilakukan. Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban”

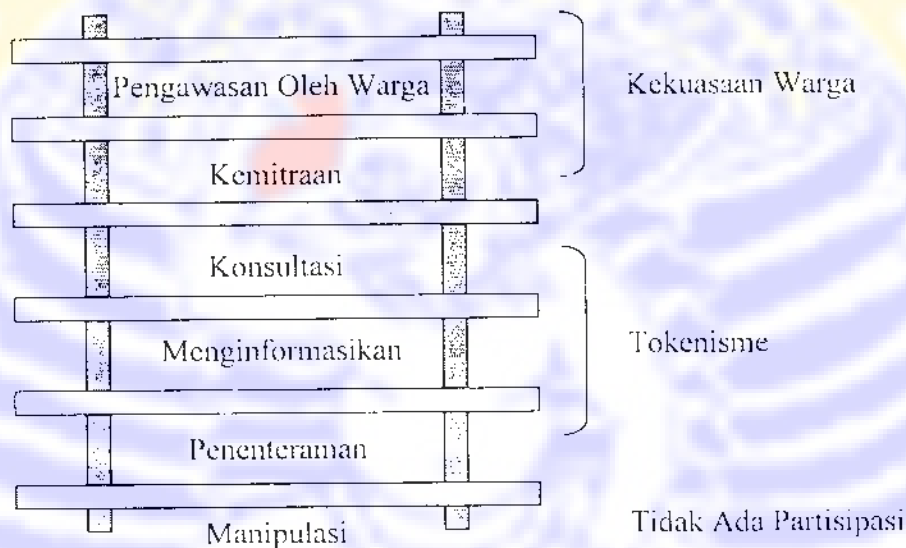
Sedangkan partisipasi menurut beberapa ahli yang telah melakukan kajian tentang partisipasi, salah satu kajian yang perlu disimak dalam hubungannya dengan pengelolaan irigasi yaitu seperti yang disebutkan oleh Cohen dan Uphoff (1997) yang mengatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, berbagi dalam perolehan manfaat pembangunan serta keterlibatan dalam proses evaluasi program.



Namun demikian berdasarkan persamaan dan perbedaan dari kajian tentang partisipasi secara garis besar terdapat dua pengertian tentang partisipasi yaitu : (1) Partisipasi lebih berarti sebagai alat (*means*) dengan pengertian adalah pemanfaatan sumberdaya fisik, ekonomi dan sosial dari masyarakat untuk mencapai tujuan suatu program pembangunan atau kegiatan proyek.; (2). Lebih menitik beratkan bahwa hasil pencapaian tujuan atau target kegiatan pembangunan lebih penting daripada kegiatan partisipasi itu sendiri. Hal inilah yang sering digunakan oleh pemerintah dengan memobilisasi masyarakat untuk tujuan pembangunan tertentu, dan setelah tujuannya tercapai tidak ada lagi kegiatan partisipatif dalam kelanjutan pembangunannya.

Oakly (1991) dengan mengacu kepada beberapa penulis sebelumnya menginterpretasikan tentang partisipasi yang berkembang ditengah-tengah pelaku pembangunan yaitu (1). Partisipasi bersifat kontribusi, yang lebih menekankan seberapa jauh keterlibatan atau kontribusi masyarakat dalam suatu aktifitas pembangunan, kontribusi yang menyangkut finansial, perlakuan manajemen dan tenaga; (2). Partisipasi dalam ikut berorganisasi, lebih menekankan kepada organisasi yang dibentuk dalam proses pembangunan; (3) Partisipasi sebagai suatu proses pemberdayaan, lebih menekankan bahwa partisipasi merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan upaya pembangunan/pengembangan kemampuan dan ketrampilan untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan partisipasi dilapangan menurut Oakly (1991) secara umum antara lain adalah: (1) Hambatan struktural; (2) Hambatan Administratif; (3) Hambatan Sosial.

Lain lagi halnya dengan Sherry Arnstein (The British Council, 2001) yang memahami partisipasi dengan menggunakan versi “tangga partisipasi”. Tangga ini memperlihatkan berbagai cara organisasi menyikapi suatu kegiatan dapat melibatkan partisipasi pesertanya yang dalam hal ini warga negaranya. Adapun “tangga partisipasi” Sherry Arnstein adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. : “Tangga Partisipasi” Sherry Arnstein

Berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan, dewasa ini pilihan-pilihan pembangunan sedang dibuat oleh para ahli perencanaan untuk mencari format yang tepat dan memiliki relevansi yang tinggi terhadap masing-masing karakter negara-negara yang sedang membangun. namun demikian model yang dikonsepsikan semuanya memiliki tujuan yang sama menurut Supeno (2005) yaitu bagaimana mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Todaro (1977) bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial,

sikap-sikap rakyat dan lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan.

Mubyarto dan Sartono (1988), mengemukakan ada empat gagasan esensial dalam menyusun kebijaksanaan dan strategi pembangunan pedesaan yaitu antara lain:

1. Strategi harus koheren;
2. Sifat program harus luwes;
3. Harus ada kebijaksanaan (dan tekad) politik yang tegas;
4. Mengikutsertakan seluruh rakyat.

Berdasarkan keempat gagasan tersebut sekaligus dapat diungkapkan dengan satu kata yang singkat adalah pembangunan dengan pelaksanaan keadilan.

Dengan penarikan kembali wewenang pengelolaan irigasi ke Pemerintah, tentunya ini akan merubah bentuk pengelolaan irigasi ditatanan usaha tani, baik mengenai struktur organisasinya, model pengelolaannya maupun peran-peran yang terlibat dalam pengelolaan irigasi. Oleh karena itu analisa terhadap efisiensi pengelolaan irigasi perlu dilakukan baik pada Daerah irigasi yang wewenang pengelolaan sudah diserahkan kepada petani berdasarkan aspek legal yang ada, maupun pada Daerah Irigasi yang masih murni menjadi wewenang pemerintah dalam pengelolaannya, sehingga diperoleh suatu model pengelolaan irigasi yang efisien sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan irigasi (struktural-fungsional).

Menurut Frank B. Gilbreth beserta istrinya Lillian M. Gilbreth (seorang ahli ilmu jiwa) bahwa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memerlukan gerak-gerak yang paling efisien, karena dengan demikian untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan memerlukan waktu yang lebih singkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa efisiensi dapat dicapai dengan mempersingkat waktu penyelesaian pekerjaan.

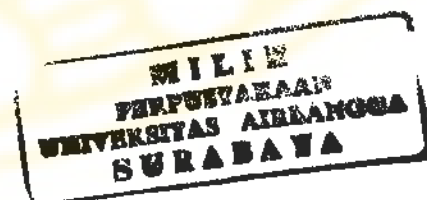
Efisiensi berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti *to effect* yang juga berarti menghasilkan, mengadakan atau menjadikan, yang selanjutnya dalam perkembangannya menurut Summer H. Slichter menyimpulkan kata-kata efisiensi mengalami pembagian menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Engineering or physical efficiency* (Efisiensi mesin/benda) yaitu adalah perbandingan antara jumlah satuan benda yang dipergunakan dan yang dihasilkan.
- b. *Pacuniary or business efficiency* (Efisiensi perusahaan/ keuangan) yaitu adalah perbandingan antara dolar atau uang yang dipergunakan/dikeluarkan dengan penghasilan yang masuk.
- c. *Social or human efficiency* adalah merupakan perbandingan antara pengorbanan-pengorbanan manusia dan kepuasan atau kemanfaatan bagi manusia yang dapat dinikmati.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dapat disimpulkan bahwa efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi dalam pekerjaan merupakan perbandingan terbaik antara suatu usaha atau kerja yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh kerja/usaha tersebut, dimana usaha tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu:

- a. Segi hasil dimana suatu pekerjaan dapat disebut efisien apabila usaha yang telah dilakukan memberikan hasil yang maksimal baik dalam jumlah maupun mutu dari hasil tersebut.

- b. Segi usaha dimana suatu pekerjaan dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil tertentu dapat dicapai dengan usaha yang minimal yang dikaitkan dengan pikiran, tenaga, waktu, ruang dan benda(uang). Berdasarkan definisi efisiensi dilihat dari segi usaha, maka bekerja yang efisien harus mencakup lima unsur yaitu cara yang termudah, dapat dilakukan yang paling ringan, pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang paling cepat, pekerjaan tersebut dilakukan oleh dengan jarak yang paling pendek disamping itu pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan pembiayaan yang paling murah.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

Pada bab materi dan metode penelitian ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, teknik pengambilan data, cara pengolahan dan analisa data serta subyek penelitian yang terkait dengan pengelolaan irigasi.

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan sesuai aspek relevansi teori yang ada termasuk dalam jenis penelitian *deskriptif*, karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan informasi secara detail mengenai penerapan nilai-nilai *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi. Penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Sanapiah, 1995)

Deskriptif yang dilakukan adalah dengan membandingkan penerapan nilai-nilai *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi tersebut dalam pengelolaan irigasi yang dikelola oleh masyarakat / organisasi petani dengan sistem irigasi yang pengelolaannya masih dilakukan secara penuh oleh pemerintah, sekaligus dikaitkan dengan aspek efisiensi irigasi yang ditinjau hanya pada segi usahanya bukan dari segi hasilnya atau yang lebih cenderung ke arah sosial atau *human efficiency*. Berdasarkan gambaran penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan pengelolaan

irigasi kedepan yang sesuai dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Menurut Hadari (1998) bahwa metode deskripsi dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (sesorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### **3.2. Teknik pengambilan data**

#### **3.2.1. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain meliputi data-data yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dijalankan pada Daerah Irigasi yang dikelola oleh petani melalui organisasinya dan Daerah Irigasi yang dikelola Pemerintah. Adapun data yang diperlukan antara lain:

- Mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan teknis yang dilakukan oleh pengelola irigasi baik kedalam organisasi maupun keluar organisasi.
- Keterbukaan dalam penyusunan program kebijakan, kegiatan operasional dan keuangan organisasi.
- Keaktifan berinisiatif dan keterlibatan petani dalam semua proses pengelolaan irigasi
- Frekwensi munculnya tantangan dari pihak lain (non petani) serta loyalitas organisasi /kelompok yang sudah ada.
- Efisiensi pengelolaan irigasi yang ditinjau dari usahanya yang meliputi 5 unsur yaitu jaraknya, tingkat kesulitan, ringannya pelaksanaan, kecepatan penanganan dan murahnya pembiayaan

- Interelasi antara ketiga pilar *Good Governance* yaitu Pemerintah, swasta dan masyarakat (petani).

Berdasarkan jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini maka secara umum dapat dibagi dalam dua jenis data yaitu data primer yang didukung oleh data –data sekunder.

### 3.2.2. Nara sumber/informan

Nara Sumber/Informan menunjuk kepada individu/orang atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan yang diteliti. Berdasarkan studi yang dilakukan adalah penerapan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi, maka nara sumber/informan yang diteliti adalah petani-petani baik yang secara individu sebagai petani (anggota organisasi pengelola irigasi) atau petani yang secara langsung tidak melakukan pengelolaan irigasi atau individu yang bukan merupakan pengurus organisasi pengelola irigasi (Himpunan Petani Pemakai Air/HIPPA) yang terkait langsung dengan pengelolaan jaringan irigasi dalam suatu Daerah Irigasi, dan didukung dari Dinas/Instansi/Institusi seperti juru pengairan, pengamat pengairan serta organisasi-organisasi lain yang terkait dengan pengelolaan irigasi seperti Kelompok Tani dan swasta.

Pada Daerah Irigasi Menturus nara sumber/informan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan irigasi adalah jajaran Cabang Dinas Pengairan Gedeg yaitu Kepala Cabang Dinas Pengairan Gedeg (Bp. Sarno). Juru Pengairan di Wilayah Pengairan Gedeg (Bp. Taslim ), serta petani (Bp. Sadi) pada Daerah Irigasi Menturus yang dilibatkan dalam pengelolaan irigasi secara tidak langsung.



Sedangkan pada Daerah Irigasi Penewon, nara sumber/informan adalah para petani yang termasuk dalam pengurus Gabungan HIPPA Tirto Agung (Ketua: Bapak Imam Basuki, Bendahara: Bapak Santoso dan Bagian Teknis: Bapak Purwadi) maupun petani anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung (Samsul Anam), disamping pembina HIPPA Kabupaten Mojokerto baik yang berasal dari Dinas Pengairan (Kasi Operasi dan pemeliharaan: Bapak Ir. Masulun) dan Bappeda Kabupaten Mojokerto (Kasi Pengairan: Bapak. Ir. Prptomomo) yang secara tidak langsung ikut melakukan pengelolaan pada Daerah Irigasi Penewon.

Adapun untuk nara sumber/informan untuk masing-masing data yang dikumpulkan dalam hubungannya dengan jenis data dan metode pengumpulannya dapat disajikan sebagaimana tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1. Data yang diperlukan beserta sumber data dan metode pengumpulannya.

No	Data yang dikumpulkan	Nara Sumber / Informan	Metode Pengumpulan
1	Mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus HIPPA yaitu Ketua: Imam Basuki Bendahara: Santoso dan Bagian Teknis: Purwadi</li> <li>- Dinas Pengairan yaitu Juru Pengairan (Taslim) dan Kepala Cabang Seksi (Sarno) dan Kepala Seksi OP Dinas Pengairan (Ir.Masulun). Bappeda Kabupaten Mojokerto (Ir.Prptomomo)</li> </ul>	Wawancara
2	Keterbukaan penyusunan program kebijakan, operasional dan keuangan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus HIPPA yaitu Ketua: Imam Basuki, Bendahara: Santoso dan Bagian Teknis: Purwadi</li> </ul>	Wawancara

	pengelola irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota HIPPA</li> <li>- Dinas Pengairan yaitu Juru Pengairan (Taslim) dan Kepala Cabang Seksi (Sarno) dan Kepala Seksi OP Dinas Pengairan (Ir.Masulun), Bappeda (Ir.Prptomomo)</li> </ul>	
3	Keaktifan berinisiatif dan keterlibatan petani dalam semua proses pengelolaan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus HIPPA yaitu Ketua (Imam Basuki) &amp; Bagian Teknis (Purwadi)</li> <li>- Anggota HIPPA</li> <li>- Dinas Pengairan yaitu Juru Pengairan (Taslim) dan Kepala Cabang Seksi (Sarno) dan Kepala Seksi Operasi Pemel. Dinas Pengairan (Ir. Masulun)</li> </ul>	Wawancara
4	Frekwensi munculnya tantangan dari pihak lain (non petani) serta loyalitas organisasi /kelompok yang sudah ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus HIPPA yaitu Ketua (Imam Basuki), dan Bagian Teknis (Purwadi)</li> <li>- Anggota HIPPA</li> <li>- Dinas Pengairan yaitu Juru Pengairan (Taslim) dan Kepala Cabang Seksi (Sarno)</li> </ul>	Wawancara
5	Efektifitas pengelolaan irigasi yang ditinjau dari usahanya yang meliputi 5 unsur yaitu jaraknya, tingkat kesulitan, ringannya pelaksanaan, kecepatan penanganan dan murahannya pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus HIPPA Ketua (Imam Basuki), Bendahara (Santoso) dan Bagian Teknis (Purwadi)</li> <li>- Anggota HIPPA</li> <li>- Dinas Pengairan yaitu Juru Pengairan (Taslim) dan Kepala Cabang Seksi (Sarno) dan Kepala Seksi OP Dinas Pengairan (Ir. Masulun)</li> </ul>	Dokumen dan Wawancara
6	Interelasi antara ketiga pilar <i>Good Governance</i> yaitu Pemerintah, swasta dan masyarakat (petani)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus HIPPA yaitu Ketua HIPPA (Imam Basuki)</li> <li>- Dinas Pengairan yaitu Juru Pengairan (Taslim)</li> </ul>	Dokumen dan Wawancara

### 3.2.3. Metode pengambilan data

Berdasarkan jenis data yang diperlukan terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengambilan data yang merupakan data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap subyek penelitian. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa:

- a. Daerah Irigasi yang sesuai dengan kategori penelitian sudah dapat diketahui dengan pasti.
- b. Individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan irigasi sudah dapat diketahui secara jelas.
- c. Organisasi pengelola irigasi sudah diketahui dengan pasti
- d. Diperoleh data-data yang benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Wawancara dilakukan pada petugas lapangan terkait pada Dinas Pengairan mulai Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto dan Juru Pengairan Cabang Dinas Pengairan Gedeg. disamping itu juga pada pengurus organisasi petani pemakai air irigasi yang memahami dan melakukan kegiatan segala urusan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Penewon yaitu Ketua, Bendahara dan Bagian Teknis Gabungan HIPPA. Pengambilan sampel ini dilakukan melalui pendekatan secara personal antara peneliti dengan responden dalam suasana yang diusahakan sebisa mungkin dalam kondisi santai mungkin dan tidak ada kesan formal dalam melakukan pencarian data. Waktu pengambilan sampelnya dilakukan pada waktu-waktu diluar jam aktif kantor untuk responden yang berasal dari dinas/instansi pemerintah yaitu antara pukul 15.30 s/d 17.30 wib atau pada waktu tidak sedang melakukan aktifitas

pertaniannya bagi responden yang berasal dari pengurus organisasi petani pemakai air yaitu pada pukul antara 16.00 s/d 18.00 wib. Hal ini dimaksudkan agar responden betul-betul secara bebas bisa mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi dan mereka alami dilapangan dengan tidak merasa memiliki beban harus menjaga nilai-nilai organisasinya berkaitan dengan pengelolaan irigasi (seperti sebagai seorang aparat pemerintah akan bercerita tentang hal-hal yang baik-baik saja mengenai pelaksanaan pengelolaan irigasi yang mereka lakukan, dan berusaha untuk menutupi segala kekurangan yang mungkin saja hal itu merupakan hal penting dalam pengelolaan irigasi itu sendiri), sehingga teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara personal dengan peneliti mendekati diri dan menyesuaikan waktu dan tempatnya dengan responden yang diwawancarai.

Sedangkan metode pengambilan data yang merupakan data sekunder diperoleh dari Dinas/Badan/instansi terkait dengan pengelolaan irigasi seperti seperti Biro Pusat Statistik, Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur, Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, BAPPEDA Kabupaten Mojokerto serta Organisasi HIPPA Tirta Agung.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini secara rinci dapat dibagi dalam dua bagian sebagai berikut:

a. Bagian Persiapan

Pada bagian persiapan ini melakukan kegiatan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan wawancara itu dilakukan seperti kegiatan:

- Penyiapan surat untuk masuk ke Instansi/Dinas Pengairan baik di Propinsi maupun Kabupaten Mojokerto dan ke organisasi petani pemakai air,

- Mempersiapkan surat untuk keperluan terjun ke lapangan dalam rangka pengambilan dan pengumpulan data.
- Mempersiapkan dan mematangkan pedoman wawancara dengan melakukan *retest* dan perbaikan terhadap pedoman wawancara, sehingga pada saat terjun ke lapangan pedoman tersebut sudah operasional dan mampu mengakomodasikan segala kebutuhan yang diperlukan.

b. Bagian Pelaksanaan

Bagian pelaksanaan merupakan tahap operasional dari pengambilan dan pengumpulan data, dengan prosedur yang dilakukan secara berurutan adalah sebagai berikut:

- Peneliti melakukan kontak dan menemui Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur untuk memohon ijin melakukan penelitian sekaligus mencari informasi awal sebelum bertemu dengan Kepala Sub Dinas Kemitraan dan Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan yang membidangi kegiatan sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan.
- Pada tingkatan struktur Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana tersebut peneliti bermaksud untuk mencari dokumen-dokumen dan aspek legal terhadap kewenangan pengelolaan irigasi, peran pengelolaan irigasi, dan penerapan pengelolaan yang dilakukan serta efisiensi pengelolaan irigasi. Pada tingkatan ini lebih cenderung kepada pencarian dokumen-dokumen mengenai pengelolaan irigasi di Jawa Timur, sebagai bahan awal sebelum terjun ke lapangan untuk klarifikasi data-data yang sudah diperoleh pada tingkatan ini

- Setelah melakukan pendataan di Tingkat Propinsi, selanjutnya peneliti melakukan pengambilan dan pengumpulan data di Kabupaten Mojokerto, yaitu di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto dan Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto. Dengan prosedur yang sama di tingkat Propinsi dilakukan pada tingkat kabupaten di BAPPEDA dan Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, sekaligus memohon ijin untuk melakukan penelitian dengan terjun langsung ke organisasi petani pemakai air irigasi di Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon.
- Setelah melakukan pengambilan dan pengumpulan data di BAPPEDA dan Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, diteruskan pengambilan dan pengumpulan data teknis dengan mewawancarai petugas lapangan dari Dinas Pengairan mulai dari Kepala Cabang Dinas Pengairan Gedeg sampai dengan Juru Pengairan yang mempunyai wilayah di Daerah Irigasi Menturus dan pengelolaannya masih menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Setelah mengambil dan mengumpulkan data dari petugas lapangan pemerintah dilanjutkan dengan pengambilan dan pengumpulan data dari pengurus organisasi petani pemakai air yang memahami dan melakukan kegiatan keorganisasiannya yaitu Ketua, Bendahara dan Bagian Teknis Gabungan HIPPA serta anggota organisasi tersebut.
- Setelah melakukan seluruh pengambilan dan pengumpulan data selanjutnya melakukan klasifikasi dan pengkategorian data yang diperoleh untuk dilakukan proses analisa data.

### 3.2.4. Instrumen Penelitian

Berdasarkan metode pengambilan sampel yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini pengambilan data primernya menggunakan wawancara mendalam terhadap subyek penelitian yaitu individu-individu yang benar-benar melakukan kegiatan pengelolaan irigasi. Instrumen penelitian yang dipergunakan untuk wawancara mendalam tersebut adalah pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan derajat standarisasi wawancara tak berstruktur, dengan situasi wawancara secara lisan dan soft (membuka hubungan terlebih dahulu baru bercerita untuk mencari data yang diinginkan). Adapun pedoman wawancara yang dipergunakan adalah sebagaimana lampiran 1.

### 3.3. Teknis Analisa

Pada bagian ini membahas mengenai pengelompokan atau klasifikasi terhadap Konsep dan Variabel yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi, disamping itu pada bagian ini juga menerangkan mengenai definisi operasional konsep dan variabel yang telah diklasifikasikan.

#### 3.3.1. Klasifikasi Konsep dan Variabel

Berdasarkan judul penelitian yaitu penerapan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi, maka dapat diklasifikasikan konsep dan definisi yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut yaitu sebagaimana berikut:

Klasifikasi konsep yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi petani

- b. Pengelolaan irigasi
- c. Efektifitas pengelolaan

Sedangkan klasifikasi variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain adalah:

- a. Penerapan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
- b. Wewenang pengelolaan irigasi
- c. Pelaku pengelolaan irigasi
- d. Penerapan pengelolaan irigasi
- e. Tingkat efisiensi pengelolaan

### 3.3.2. Definisi Operasional Konsep dan Variabel

Berdasarkan klasifikasi konsep dan variabel berikut diuraikan mengenai definisi operasional konsep dan variabel yang telah diklasifikasikan sebagai konsep dan variabel. Adapun definisi operasional konsep dan variabel dapat diuraikan sebagaimana berikut:

#### a. Definisi Operasional Konsep

Klasifikasi konsep yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain transparansi, akuntabilitas dan partisipasi petani, pengelolaan irigasi dan efisiensi pengelolaan, adapun untuk masing-masing konsep definisi operasionalnya sebagai berikut:

- Transparansi adalah dapat diketahuinya oleh semua petani mengenai perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pengelola irigasi. Analisa yang dilakukan untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan irigasi adalah dengan melihat seberapa besar anggota organisasi pengelola irigasi mengetahui



dan memahami terhadap perumusan kebijakan, pengelolaan teknis maupun finansial dari organisasi pengelola irigasi.

- Akuntabilitas adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengelola irigasi kepada pemilik hak atau yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Analisa yang dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas adalah dengan melihat mekanisme pertanggungjawaban baik secara teknis maupun finansial yang dilakukan dalam organisasi pengelola irigasi.
- Partisipasi Petani, adalah merupakan proses pelibatan atau pengikutsertaan peran petani dalam pengelolaan irigasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Analisa yang dilakukan dalam partisipasi adalah bagaimana konsep partisipasi tersebut dijalankan dalam pengelolaan irigasi, dan bagaimana penerapan aturan dan aspek legal lainnya yang berkaitan dengan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi dijalankan, hal ini ditinjau dari substansi dari aturan dan aspek legal terkait. Analisa partisipasi dilakukan pada daerah irigasi yang sudah diserahkan kewenangan pengelolaannya dan daerah irigasi yang belum diserahkan.

- Pengelolaan irigasi, adalah kegiatan yang dimulai dari mengambil air dari sumber (mata air, sungai, danau, waduk, embung, situ dan penampungan air lainnya), mengalirkannya ke dalam saluran, membagikan kepetak-petak sawah, memberikan air pada tanaman dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang.

Berdasarkan substansi aspek legal yang berkaitan dengan wewenang pengelolaan irigasi terjadi perbedaan pengelolaan, yaitu: (1) berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 1974 pengelolaan irigasi menjadi kewenangan Pemerintah (2) Berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2004 wewenang pengelolaan irigasi menjadi kewenangan pemerintah dan masyarakat masih dimungkinkan untuk ikut berpartisipasi didalamnya.

- Pihak yang berperan dalam pengelolaan irigasi, berdasarkan substansi dari pembuatan Undang-undang 7 tahun 2004 ada kecenderungan untuk memberikan wewenang pengelolaan irigasi kepada pemerintah. Sedangkan masyarakat tidak diberikan kesempatan secara eksplisit, namun secara tersirat dalam Undang-undang ini masih dimungkinkan untuk ikut berpartisipasi didalam pengelolaan irigasi. Hal ini sangat berbeda sekali dengan Undang-undang 11 Tahun 1974 yang secara eksplisit memberikan wewenang pengelolaan irigasi kepada pemerintah.

Pengelolaan irigasi yang awalnya diarahkan kepada partisipasi yang hanya dipandang sebagai alat saja untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah, dengan adanya pandangan baru dalam pengelolaan irigasi berubah menjadi partisipasi yang lebih mementingkan proses partisipasinya, dimana petani diberi kesempatan untuk ikut serta dan pengelolaan irigasi mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencananya.

- Efisiensi pengelolaan, adalah merupakan perbandingan terbaik antara suatu usaha atau kerja yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh kerja/usaha tersebut.

Analisa efisiensi pengelolaan dilakukan baik dari segi hasil maupun segi usaha yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

*Segi Hasil*, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh The Liang Gie, dinyatakan bahwa suatu pekerjaan dianggap efisien apabila usaha tersebut memberikan hasil yang maksimal. Tinjauan efisiensi pengelolaan irigasi dari wewenang, peran pengelola dan cara pengelolaannya, maka sebagai bahan pertimbangan pemikiran bahwa pada tahun 1985 Indonesia pernah mencapai swasembada beras, dimana pengelolaan irigasinya pada masa itu dilakukan oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya sebagai obyek saja. Pada saat itu wewenang pengelolaan berada ditangan pemerintah, sehingga peran pengelola dan model pengelolaannya juga tersentralisasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Namun demikian keadaan ini tidak dapat berjalan secara berkelanjutan, karena disamping pemerintah memiliki tugas yang semakin lama bertambah komplek dan berat, juga tidak mendapatkan dukungan aktif dari masyarakatnya. Kondisi ini berdampak kepada pemerintah yang harus melakukan sendiri seluruh kegiatan pembangunan baik dalam operasional kegiatan maupun finansialnya, yang mana tentunya ini akan menimbulkan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena semakin komplek permasalahan yang harus ditangani maka semakin membutuhkan pendanaan yang semakin besar pula. Dalam kaitannya dengan pengelolaan irigasi lama kelamaan pemerintah juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang meskipun hanya bertujuan untuk mempertahankan fungsi sarana dan prasarana yang ada, dan ini

selanjutnya berdampak terhadap kinerja dan hasil produksi pertanian yang jauh dari harapan

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik dari segi mutu dan jumlahnya serta berkelanjutan memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan dengan adanya partisipasi dapat meringankan beban tugas pemerintah yang semakin lama tidak menjadi ringan malah sebaliknya semakin berat. Oleh karenanya partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi sangatlah diperlukan untuk menciptakan kinerja pengelolaan irigasi yang optimal dan memberikan hasil yang baik dari segi mutu maupun jumlahnya serta berkelanjutan.

*Segi usaha*, menyangkut 5 unsur yang harus dipenuhi yaitu secara pikiran, tenaga, waktu, ruang dan benda(uang), yang secara eksplisit dinyatakan bahwa suatu usaha dikatakan efisien apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang paling mudah, paling ringan, paling cepat, paling terpendek jaraknya dan paling murah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Apabila dianalisa dari kelima unsur tersebut model partisipasi yang merupakan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi petani merupakan hal yang lebih menguntungkan. Hal ini karena disamping pemerintah dapat mengefisienkan pembiayaan terhadap pengelolaan irigasi dari beban perbaikan berat kerusakan jaringan irigasi akibat tidak adanya rasa memiliki dari petani, pemerintah juga dapat menghemat pembiayaan yang harus dikeluarkan akibat pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal tersebut dapat dikurangi akibat dari Penyerahan kewenangan

pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada masyarakat, karena dengan jalan ini berarti juga mendekatkan pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pelaksanaan pengelolaan, meringankan pelaksanaan pengelolaan juga dapat mempercepat pelaksanaan penanganan masalah karena pemilik kewenangan berada di dekat dengan obyek yang ditangani. Disamping itu dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi ini dapat menghemat pembiayaan yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi jaringan irigasi yang sudah ada, akibat perawatan rutin yang memungkinkan untuk dilakukan berdampak kepada kerusakan berat yang terjadi pada sistem jaringan irigasi dan memerlukan biaya yang besar untuk merehabilitasinya dapat dihindari. Disisi lain dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, petani akan menjadi lebih mandiri dalam mengurus dan merawat sistem irigasi yang menjadi kewenangannya, sehingga dengan demikian akan muncul partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta dan mempunyai rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya tersebut. Disamping itu petani tidak lagi menjadi obyek untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah, namun lebih kepada mereka menentukan sendiri tujuan yang hendak dicapai berdasarkan kesepakatan anggota organisasi petani tersebut.

#### b. Definisi Operasional Variabel

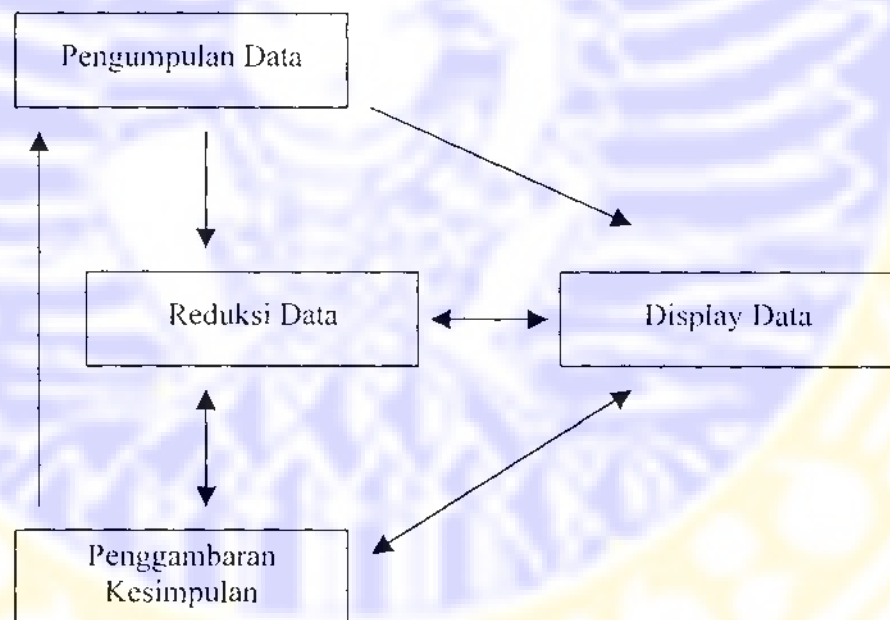
Klasifikasi terhadap variabel yang sesuai dengan judul penelitian antara lain meliputi penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, wewenang pengelolaan irigasi, peran pengelolaan irigasi, pengelolaan irigasi dan efisiensi

pengelolaan, yang secara rinci definisi operasional untuk masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penerapan transparansi adalah seberapa jauh pengetahuan anggota organisasi terhadap perumusan kebijakan yang ditetapkan, pengelolaan teknis yang dilakukan dan pengelolaan finansial dari organisasi pengelola irigasi
- Penerapan akuntabilitas, adalah seberapa jauh pengelola irigasi mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan terhadap anggota organisasi pengelola irigasi baik teknis maupun finansial atas dasar mekanisme pertanggungjawaban yang disepakati bersama.
- Penerapan partisipasi, adalah seberapa jauh atau seberapa sering petani dilibatkan dan pada bagian mana dari keseluruhan pengelolaan sistem irigasi mulai dari pengambilan air, mengalirkan kedalam saluran, membagikan kepetak-petak sawah, memberikan air pada tanaman dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang.
- Wewenang pengelolaan irigasi, adalah siapa yang memiliki kewenangan pengelolaan irigasi secara juridis formal atau aspek legal formal pengelolaan irigasi. Peran pengelolaan irigasi, adalah sesuai dengan kenyataan di lapangan siapa yang lebih banyak memiliki peranan dalam pengelolaan irigasi.
- Pengelolaan irigasi, adalah sistem pengelolaan irigasi yang sudah disepakati dan diterapkan dalam mengelola jaringan irigasi pada suatu Daerah Irigasi mulai dari bangunan pengambilan utama dari sumber air sampai dengan membuangnya kembali kelebihan air ke dalam saluran pembuang.
- Efisiensi Pengelolaan adalah tinjauan efisiensi dari segi hasil dan usahanya yang lebih cenderung kepada *social or human efficiency* yaitu merupakan

perbandingan antara pengorbanan-pengorbanan manusia dengan kepuasan atau kemanfaatan bagi manusia yang dapat dinikmati.

Pengolahan data dan analisa data yang dilakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif, dengan mencoba memberikan gambaran bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi organisasi petani mempunyai pengaruh terhadap efisiensi irigasi baik dari segi hasil maupun usaha. identifikasi dan analisis yang akan dilakukan sesuai dengan bagan sebagaimana dimaksud, meliputi hal-hal yang mempengaruhi terhadap Penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi, baik pada Daerah Irigasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah dan masyarakat. Adapun analisa data yang akan dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:



Gambar 3.1. : Bagan Desain Analisis Penerapan Transparansi, Akuntabilitas & Partisipasi dalam Pengelolaan Irigasi

Berdasarkan bagan sebagaimana pada Gambar 3.1., dari hasil pengumpulan data yang dilakukan perlu disusun kedalam pola tertentu, dengan kategori tertentu

yang disesuaikan dengan permasalahan yang tertentu pula. Hasil pengumpulan data yang dilakukan baik dari hasil wawancara maupun data dokumentasi perlu direduksi dan dimasukkan kedalam masing-masing pola, tema dan kategori tertentu. Setelah direduksi data, selanjutnya perlu dilakukan display data yaitu penyajian data untuk memetakan data yang telah direduksi, disamping itu dengan display data ini juga untuk memudahkan pengkonstruksian didalam kerangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data.

#### **3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi adalah pada Daerah Irigasi yang sudah mendapatkan Penyerahan Pengelolaan Irigasi (Daerah Irigasi Penewon) dan Daerah Irigasi yang masih dikelola oleh pemerintah di Kabupaten Mojokerto yaitu Daerah Irigasi Menturus. Lokasi ini dijadikan alternatif lokasi penelitian karena petani pada Daerah Irigasi yang sudah menerima penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi secara umum sudah dapat dikatakan mandiri dalam pengelolaan irigasi, hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan aktif dari petani dalam organisasi pengelola irigasi untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya. Disamping itu pada daerah ini juga masih terdapat jaringan irigasi yang pengelolaannya masih dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan dan petani masih sekedar menjadi obyek/sasaran pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.



Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 4 bulan yaitu mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Nopember 2005. Sedangkan secara rinci jadwal penelitian seperti lampiran 2.

## BAB 4

### DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Data Penelitian

##### 4.1.1. Informasi Umum Wilayah Penelitian

Kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Mojokerto juga tidak terlepas dari kebijakan Nasional dan kebijakan Regional, karena pengelolaan irigasi merupakan pengelolaan sumberdaya air yang antara daerah satu dengan daerah lainnya saling terkait. Pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Mojokerto ditinjau dari pembagian Wilayah Sungai di Jawa Timur termasuk dalam Wilayah Sungai Brantas

Kabupaten Mojokerto mempunyai luas wilayah 97.815 Ha, yang secara fisik terbagi menjadi dua bagian dan mempunyai karakteristik berbeda yaitu:

- a. Bagian Utara Sungai Brantas, merupakan daerah datar dan perbukitan dan relatif kering. Penggunaan lahannya baik untuk usaha pertanian maupun pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari.
- b. Bagian selatan Sungai Brantas, merupakan daerah datar dan pegunungan yang relatif subur, hal ini karena banyaknya kawasan hutan dan sungai berikut sumber/mata air di pegunungan pada daerah tersebut.

Apabila ditinjau dari kondisi topografinya memiliki kondisi kelerengan dan ketinggian berada pada ketinggian 15 meter sampai dengan 3.662 meter diatas permukaan laut, dimana elevasi terendah pada tanah sekitar Sungai Brantas dan yang tertinggi pada Daerah Selatan Kabupaten Mojokerto. Adapun perbandingan kelerengan Kabupaten Mojokerto sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Kondisi Topografi Kabupaten Mojokerto

NO	KELERENGAN (%)	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1	1 s/d 2	49.474,83	50,58
2	3 s/d 15	19.367,37	19,80
3	15 s/d 40	7.140,50	7,30
4	Diatas 40	21.832,30	22,32

Sumber: PJM Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2000

Berdasarkan luasan areal sawah menurut Jenis Irigasi di Kabupaten Mojokerto meliputi 4 Jenis yaitu:

- a. Jaringan Irigasi Teknis seluas 20.017 Ha.
- b. Jaringan Irigasi Semi Teknis seluas 7.206 Ha.
- c. Jaringan Irigasi Sederhana seluas 4.017 Ha dan
- d. Jaringan Irigasi Desa (non pemerintah) seluas 778 Ha.

Adapun Jaringan Irigasi di Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan berjumlah sebanyak 33 Daerah Irigasi/Jaringan Irigasi, yaitu sebagaimana Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2. Daerah Irigasi/Jaringan Irigasi di Wilayah Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto

No	Daerah Irigasi/ Jaringan Irigasi	Baku Sawah (Ha)	Cabang Seksi
1	Menturus	736	Gedeg
2	Mernung	557	Gedeg
3	Kwagen	45	Gedeg
4	Sengon	180	Brangkal
5	Subontoro	572	Brangkal
6	Pehngaron	981	Brangkal
7	Penewon	974	Brangkal
8	Sinoman	238	Brangkal

9	Watu Umpak	1.634	Bangsals
10	Tekuk	432	Bangsals
11	Bangsals Bawah	1.127	Bangsals
12	Jati Kulon	619	Bangsals
13	Padi Pomahan	702	Pugeran
14	Judeg	594	Pugeran
15	Banyak	975	Pugeran
16	Bangsals Atas	362	Pugeran
17	Landean	676	Pugeran
18	SBR Sedati	555	Mojosari
19	Janjing Tengah	543	Mojosari
20	Janjing Bawah	1.127	Mojosari
21	Gembolo	1.660	Mojosari
22	SBR. Pasinan	520	Mojosari
23	Candi Limo	1.917	Sumengko
24	Lebak Sumengko	1.149	Sumengko
25	Bacem	316	Sumengko
26	Jurang Cetot	272	Sumengko
27	Manting	325	Sumengko
28	Kromong Pikatan	569	Sumengko
29	Janjing Atas	479	Pandan
30	Jubel	574	Pandan
31	Cumpleng	1.926	Pandan
32	Kromong	1.926	Pandan
33	Kelintang	3.228	Tangunan

Sumber: PJM Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2000

Berdasarkan Tabel 4.2 pada lokasi yang diteliti yaitu pada Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon masing-masing berada pada Wilayah Kerja Cabang Seksi Gedeg dan Cabang Seksi Brangkal. Adapun rincian dari masing-masing Daerah Irigasi dapat disajikan sebagaimana berikut:

- a. Daerah Irigasi Menturus, dengan luas 736 Ha yang meliputi 2 Kecamatan dan 10 Desa yaitu Kecamatan Kemlagi (terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Watesproto, Betro, Kedungsari) dan Kecamatan Gedeg ( terdiri dari 7 Desa yaitu Desa Ngareskidul, Beratwetan, Gedeg, Pagerluyung, Bandung, Jerukseger dan Pagerjo).

- b. Daerah Irigasi Penewon, dengan luas 974 Ha yang meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Trowulan (terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Panggih, Bicak, Tawang Sari dan Klinterejo). Kecamatan Sooko (terdiri dari 7 Desa yaitu Desa Modongan, Kedung Maling, Sambiroto, Kr. Kedawang, Ngingas, Tempuren dan Mojoranu) dan Kecamatan Prajurit Kulon (terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Suredinawan, Blooto, Pulorejo dan Wringinrejo)

#### **4.1.2. Faktor Internal Pengelolaan irigasi**

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan irigasi secara umum antara lain meliputi organisasi dan kelembagaan serta teknis pengelolaan irigasi. Faktor-faktor internal dari masing-masing Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian dapat diuraikan sebagaimana sub bab berikut.

##### **4.1.2.1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelola Irigasi**

###### **a. Struktur Organisasi HIPPA**

###### **- Pembentukan Organisasi HIPPA**

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai organisasi dan sekaligus “wadah” petani dalam pengelolaan irigasi ditingkat usaha tani, merupakan strategi guna mengikut sertakan petani-petani dalam program pengelolaan air irigasi secara menyeluruh. Disamping itu untuk menumbuh kembangkan kesadaran dalam memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi demi kepentingan bersama berdasarkan rasa senasib sepenanggungan diantara petani.

Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Menturus dilakukan oleh Gabungan HIPPA Tirto Sari bersama dengan Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto

dengan jumlah petani sekitar 1.057 petani. Namun demikian dalam kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi di tingkat tersier masih didominasi bahkan masih ditangani oleh Dinas Pengairan setempat melalui Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Gabungan HIPPA dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi memang pada dasarnya sudah terbentuk, namun demikian dasar pembentukan Gabungan HIPPA dimaksud hanya sebatas sebagai pemenuhan persyaratan yang diajukan oleh pemerintah. Oleh karenanya HIPPA dan Gabungan HIPPA Tirto Sari tidak berjalan optimal dalam mengelola jaringan irigasi, dan yang lebih berperan dalam pengelolaan irigasinya adalah oleh lembaga tradisional yaitu yang dikenal dengan “Tuwowo” atau “Jaga Tirta” atau “Ulu-Ulu Banyu” yang selalu berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pengairan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Pembentukan HIPPA di Daerah Irigasi Penewon diawali dari keberadaan lembaga tradisional (“Tuwowo”, “Ulu-Ulu Banyu” atau “Jogo Tirta”). Pada awal pembentukannya mendapat tantangan yang cukup berat, namun secara bertahap dengan upaya-upaya memberikan penjelasan pada masyarakat petani untuk meninggalkan cara-cara tradisional mengelola air irigasi menjadikan petani-petani mampu membentuk lembaga yang kuat, mandiri dan otonom dan bahkan saat ini menjadi organisasi HIPPA yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan air irigasi di tingkat tersier.

Munculnya pengelolaan irigasi sebagaimana yang dilakukan pada Daerah Irigasi Penewon merupakan implikasi dari dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2000 tentang Irigasi yaitu salah satunya berimplikasi terhadap batas yuridiksi

(*jurisdiction boundary*) dimana pembentukan HIPPA tidak berdasarkan batas administrasi desa tetapi berdasarkan batas hidrologis, seperti saluran primer, sekunder maupun saluran tersier. Lembaga pengelola irigasi atau HIPPA- HIPPA tunggal di daerah Irigasi Penewon memiliki batas pengelolaan saluran tersier dan kuarter/ saluran cacingan, bisa melayani masyarakat petani yang berada pada 3 Kecamatan dan 15 desa.

Disamping pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh HIPPA-HIPPA tunggal yang memiliki wilayah pada saluran tersier dan kuarter/saluran cacingan, pada Daerah Irigasi Penewon juga telah membentuk Gabungan HIPPA Tirto Agung, yang merupakan wadah kelembagaan sejumlah HIPPA-HIPPA tunggal pedesaan untuk memanfaatkan fasilitas irigasi dan bersepakat untuk bekerjasama dalam mengelola sebagian Daerah Irigasi pada tingkat saluran sekunder. Kepengurusan Gabungan HIPPA Tirto Agung di Daerah Irigasi Penewon terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pelaksana (Bagian Teknis), dan Anggota dengan masa jabatan selama 3 Tahun.

Tugas dan tanggungjawab pengurus Gabungan HIPPA adalah (1). Menyusun Rancangan Peraturan Gabungan HIPPA; (2). Membuat rancangan/program kerja dan anggaran biaya operasi dan pemeliharaan; (3) melaksanakan tugas-tugas Gabungan HIPPA; yang antara lain adalah (a). Ikut mengelola air dan jaringan irigasi pada tingkat primer dan sekunder secara tepat guna dan berhasil guna dengan memperhitungkan unsur keadilan sesama anggota; (b). Ikut membangun, merehabilitasi pada saluran utama maupun saluran sekunder sehingga jaringan irigasi dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.; (c). Menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang dan atau tenaga

untuk pendayagunaan air irigasi dan memelihara jaringan irigasi dalam wilayah kerja serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai organisasi; (d). Membimbing dan mengawasi HIPPA anggota agar mentaati semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air oleh Pemerintah Pusat, Daerah dan Gabungan HIPPA (e). Membangun usaha-usaha ekonomi untuk pendayagunaan air irigasi dan kesejahteraan anggota. (4) menghadiri rapat organisasi Gabungan HIPPA; (5) mengusahakan dana dari iuran anggota; (6) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi untuk mendapatkan pengesahan anggota dan (7). Penelusuran jaringan untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan.

Gabungan HIPPA Tirto Agung dibentuk pada 20 Juli 2000 beranggotakan beberapa anggota 12 HIPPA Tunggal yaitu HIPPA Tirto Agung, HIPPA Margo Rukun, HIPPA Tirto Harum, HIPPA Podo Rukun, HIPPA Janji Rukun, HIPPA Tirto Sari, HIPPA Suka Makmur, HIPPA Tirto Mulyo, HIPPA Tani Makmur, HIPPA Sumber Makmur, HIPPA Tani Mulyo dan HIPPA Tirto Agung, yang meliputi 3 Kecamatan, 15 Desa dengan luas areal seluas 974 Ha. dengan jumlah anggota seluruhnya berjumlah 1.126 orang.

Berdasarkan display data sebagaimana telah diuraikan, secara rinci dapat dipetakan dalam bentuk matrik organisasi pengelola irigasi pada Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon sebagaimana pada Tabel 4.3. berikut ini.

Tabel 4.3. Organisasi Pengelola Irigasi

No	JENIS DATA	D.I. MENTURUS	D.I. PENEWON
1	Organisasi Pengelola Irigasi	Cabang Dinas Pengairan Gedeg	Gabungan HIPPA Tirto Agung
2	Luas Daerah Irigasi	736 Ha	971 Ha



3	Jumlah Kecamatan dan Desa	Meliputi 2 (dua) Kecamatan Dan 10 (sepuluh) Desa	Meliputi 3(tiga) Kecamatan dan 15 (lima belas) Desa
4	Peran yg dominan	Towowo (Lembaga Tradisional)	Ketua Gabungan HIPPA & Pengurus Gabungan HIPPA Tirta Agung
5	Jumlah petani	1.057 petani	1.126 petani
6	Pengelolaan dari Dinas Pengairan	- 1 kepala cabang - 1 staf TU - 1 staf Operasi - 1 staf Pemel. - 9 juru pengairan - 18 PPA - 11 Pekarya Total : 42 petugas	- 1 kepala cabang - 1 staf TU - 1 staf Operasi - 1 staf Pemel. - 3 juru pengairan - 3 PPA - 4 Pekarya Total : 14 petugas

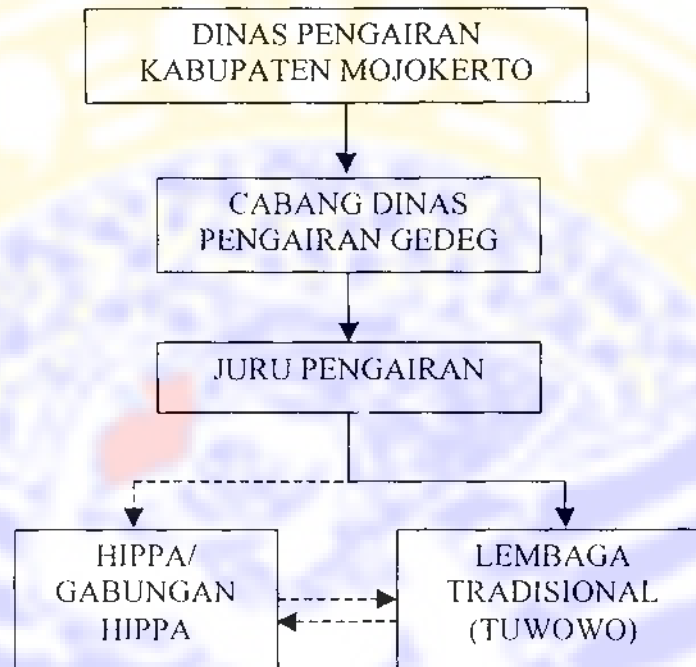
Sumber: Wawancara, Dins PU Pengairan dan AD/ART Gabungan HIPPA

#### - Bentuk dan Struktur Organisasi

Bentuk dan struktur organisasi pengelola irigasi, umumnya mengikuti petunjuk /acuan dari pemerintah, dan jika ada pengembangan biasanya tergantung dari kebutuhan masing-masing daerahnya/spesifikasi jaringan irigasinya. Umumnya struktur organisasi pengelola irigasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bagian teknis, dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga (AD/ART) masing-masing organisasinya.

Bentuk dan struktur organisasi pengelola irigasi di Daerah Irigasi Menturus yang masih dikelola oleh pemerintah dengan melibatkan peran HIPPA dalam pengelolaan irigasinya adalah sebagaimana dalam Gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengelola Irigasi pada Daerah Irigasi Menturus.

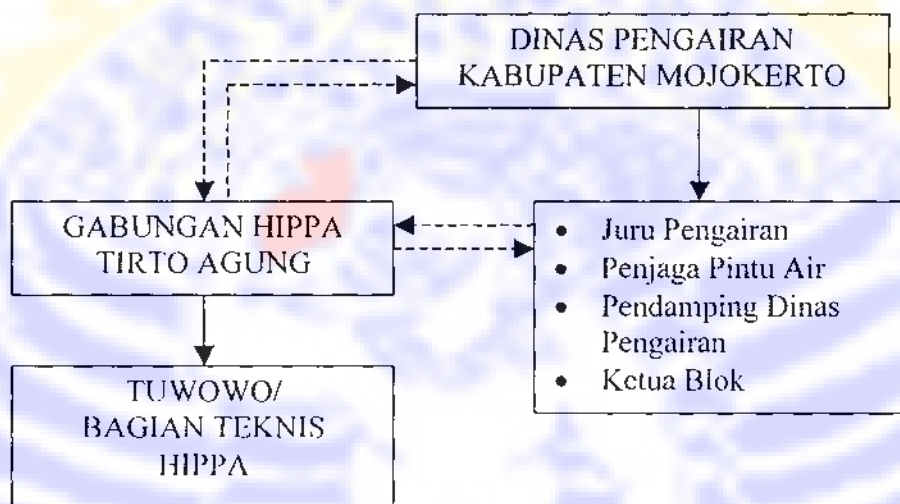


Sumber: Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan skema sebagaimana Gambar 4.1, tampak bahwa pelaksana pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Menturus dilakukan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, sedangkan Gabungan HIPPA Tirta Sari hanya sebatas untuk koordinasi dengan jadwal yang ditentukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg yaitu 10 hari sekali diadakan pertemuan antara Dinas dengan perwakilan petani, yang biasanya diwakili oleh petani yang bisa diajak bicara dan didampingi oleh tuwownya. Suara petani biasanya disampaikan langsung kepada Juru Pengairan yang setiap harinya rutin ada di lapangan dan dekat dengan petani. Masukan-masukan dari petani yang disampaikan kepada Juru Pengairan dijadikan bahan dalam rapat pertemuan yang diadakan rutin 10 hari sekali di Cabang Dinas Pengairan Gedeg.

Bentuk dan struktur organisasi pengelola irigasi di Daerah Irigasi Penewon yang dikelola oleh Gabungan HIPPA Tirta Agung dengan fasilitasi Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana dalam Gambar 4.2 berikut::

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pengelola Irigasi pada Daerah Irigasi Penewon.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan skema Gambar 4.2 nampak bahwa Gabungan HIPPA Tirta Agung mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan irigasi, dimana masih tetap berkoordinasi baik dengan juru pengairan yang ada dilapangan maupun secara langsung ke Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, untuk menyampaikan masukan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan irigasi utamanya Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Gabungan HIPPA Tirta Agung. Namun demikian sebaliknya Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto juga mempunyai garis koordinasi dengan Gabungan HIPPA sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi bagi kegiatan pengelolaan irigasi.

### - **Pemilihan Pengurus**

Ketua memainkan peranan sentral dan strategis dalam menjalankan roda organisasi. Hal tersebut juga dirasakan oleh lembaga pengelola irigasi, dimana kewibawaan, ketegasan dan keluwesan seorang ketua dinilai sangat fundamental terhadap masa depan organisasi. Oleh karena itu, pemilihan ketua tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis seseorang, tetapi lebih kepada karakter ketokohan yang diakui masyarakat atau seseorang yang pernah berjasa terhadap masyarakat setempat dan cenderung menjadi panutan, seperti dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, tokoh agama, lembaga Tradisional masyarakat dan berasal dari kalangan petani sendiri yang berpengalaman dalam kelembagaan pengelolaan irigasi yaitu "Tuwowo", "Jogo Tirto" atau "Ulu-ulu Banyu".

Pemilihan Pengurus organisasi pengelola Irigasi di Daerah Irigasi Menturus adalah melalui cara ditunjuk langsung oleh petani, namun secara organisasi setelah pemilihan Ketua HIIPA tidak diikuti dengan kegiatan organisasi. Disamping itu karena pada Daerah Irigasi Menturus ini pengelolaan irigasi masih dilakukan oleh Dinas Pengairan, oleh karenanya pemilihan pengurus HIIPA yang mewakili HIIPA dalam rapat ditunjuk secara praktis atas dasar siapa saja yang mau datang dan dapat diajak bicara oleh Dinas Pengairan dan jajarannya, sehingga dengan demikian kepengurusan HIIPA Tirto Sari tidak menjadi penting keberadaanya, namun sebaliknya kinerja Dinas Pengairan dan jajaran dibawahnya sangat diperlukan untuk dapat menjangkau keinginan dan aspirasi petani.

Pemilihan dan penunjukan kepengurusan organisasi pengelola irigasi pada Daerah Irigasi Penewon dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, ketua Gabungan HIIPA Tirto Agung sebagai organisasi pengelola irigasi pada Daerah

Irigasi Penewon berasal dari Pegawai Negeri (Guru), yang juga bermata pencaharian sebagai petani. Pemilihan pengurus yang dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat diikuti dengan semangat untuk mengembangkan organisasinya terutama keikutsertaan anggota dalam pengelolaan keorganisasian HIPPA.

Alasan dipilihnya ketua organisasi pengelola irigasi secara musyawarah dan mufakat dari kalangan Pegawai Negeri (guru) antara lain adalah: (1). Dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan secara teknis dalam mengatur dan mengelola organisasi; (2) memiliki interefasi dengan instansi terkait, sehingga mempercepat proses penyampaian informasi dan memudahkan berbagai urusan dengan instansi dimaksud; (3) memiliki jangkauan wawasan yang cukup luas dalam upaya mengembangkan organisasi; (4) hubungan sosial yang cukup kuat sehingga bisa diterima di semua kalangan masyarakat.;(5). Dinilai sebagai panutan dan teladan bagi masyarakat karena ketua yang dipilih berasal dari kalangan guru.

Tabel 4.4. Pemilihan Pengurus Irigasi

No	JENIS DATA	D.I. MENTURUS	D.I. PENEWON
1	Organisasi HIPPA	Ada, tapi tidak aktif	Ada dan aktif
2	Pemilihan pengurus	Ditunjuk Cabang Dinas Pengairan Gedeg	Musyawarah Mufakat

Sumber: Wawancara dan dokumentasi Gabungan HIPPA

#### - Peran dan fungsi pengurus

Secara organisatoris lembaga HIPPA telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di tingkat lokal. Berdasarkan kondisi dilapangan nampak jelas perbedaan peran dan fungsi

pengurus pada Daerah Irigasi Menturus dengan Pengelolaan Daerah Irigasi Penewon, hal ini dapat dilihat pada daerah Irigasi Menturus peran petani yang aktif hadir dalam pertemuan yang diadakan Cabang Dinas Pengairan Gedeg dan dapat diajak koordinasi relatif lebih dominan memainkan peranan dibandingkan pengurus lainnya. Disamping peran lembaga tradisional "Tuwowo" yang merupakan anggota HIPPA dan perangkat Desa, juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan irigasi. Hal ini karena peran "Tuwowo" yaitu membagi dan mendistribusikan air ke petak-petak sawah memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keberlanjutan dan berfungsinya jaringan irigasi. Daerah Irigasi Menturus semua kegiatannya dilakukan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, sehingga Organisasi HIPPA Tirta Sari yang terbentuk hanya bersifat mendukung dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengairan tersebut meskipun hanya bersifat normatif.

Sedangkan pada Daerah Irigasi Penewon, peran Ketua Gabungan HIPPA dan para ketua Sub Blok/ bagian teknis (sebagai kepanjangan tangan ketua Gabungan HIPPA) relatif lebih dominan memainkan peranannya dibanding pengurus lainnya. Mengingat posisi Ketua organisasi memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, sehingga Ketua Gabungan HIPPA mempunyai tugas untuk menyampaikan dan menyalurkan semua aspirasi anggota HIPPA-nya kepada pemerintah maupun lembaga lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. Sedangkan Ketua Sub Blok/ bagian teknis berperan karena tanggungjawabnya sebagai pendistribusi air irigasi. Adapun untuk peran dan fungsi dari pengurus yang lainnya hanya bersifat menunjang dan tidak mendominasi, seperti peran dan

fungsi sekretaris hanya terlihat pada saat pertemuan organisasi dilakukan, peran bendahara yang bertanggungjawab mengelola aliran dana masuk dan keluar juga tidak optimal yang disebabkan sedikit/minimnya aliran dana yang dikelola oleh organisasi pengelola irigasi, sehingga kegiatan-kegiatan pengurus lainnya seperti bendahara dan sekretaris kadang-kadang dirangkap pelaksanaan kegiatannya oleh Ketua Gabungan HIPPA, meskipun secara normatif kepengurusan tersebut ada.

Tabel 4.5. Peran dan Fungsi Pengurus

No	JENIS DATA	D.I. MENTURUS	D.I. PENEWON
1	Peran yang dominan dalam pengelolaan irigasi	Tuwowo dan Cabang Dinas Pengairan Gedeg	Ketua Gabungan HIPPA dan bagian Teknis HIPPA
2	Peran penunjang dalam pengelolaan irigasi	HIPPA dan petani pada wilayah Menturus	Pembina HIPPA Kabupaten (Bappeda. Dinas pengairan dan pertanian)
3	Aspirasi petani	Disampaikan lewat juru pengairan	Disampaikan lewat rapat anggota dan diteruskan oleh pengurus Gabungan HIPPA

Sumber : wawancara

#### - Kinerja kepengurusan

Kinerja kepengurusan pengelolaan irigasi dari Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon antara lain adalah sebagai berikut:

Kinerja Daerah Irigasi Menturus dengan luas 736 Ha dengan dikelola oleh Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto tidak menemui permasalahan dalam pengelolaan irigasi yang penting. Hal ini apabila diamati dari petani-petani di hilir yang tidak mendapatkan alokasi air untuk irigasi yaitu pada areal seluas sekitar 2/3

dari luas Daerah Irigasi, tidak pernah melakukan protes terhadap pengelola irigasi, meskipun kadang-kadang para petani tersebut gagal panen atau memperoleh hasil yang tidak optimal dikarenakan kekurangan air irigasi. Disamping itu pada Daerah ini juga mendapatkan masalah mengenai penerapan pola tata tanam bagi Daerah Irigasinya, karena petani tidak mengikuti pola tata tanam yang diusulkan oleh Dinas Pengairan selaku pengelola irigasi di Daerah Irigasi Menturus. Masalah lainnya adalah Kepala Desa yang dipilih masyarakat tidak mengerti/memahami masalah pertanian dan irigasi, dimana Kepala Desa merupakan atasan langsung dari “Tuwowo” yang bertugas dan mempunyai peranan sangat besar dalam pemberian dan pendistribusian air irigasi, sehingga apabila Kepala Desa yang terpilih tidak memahami masalah pertanian akan menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan irigasinya.

Kinerja pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Penewon setelah dikelola sendiri oleh Gabungan HIPPA Tirta Agung mengalami peningkatan kinerja antara lain tidak adanya areal irigasi pada Daerah Irigasi Penewon yang mengalami gadu (gagal panen), disamping itu dengan dikelolanya oleh Gabungan HIPPA Tirta Agung, petani mempunyai perasaan senasib sepenanggungan, sehingga pencurian dan pengutamaan hak-hak pribadi terhadap penggunaan air berkurang. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam pemanfaatan air irigasi yang dipikirkan adalah keseluruhan Daerah Irigasi mulai dari hulu sampai dengan hilir dengan perolahan hak dan kewajiban yang sama. Disamping itu terjadi peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani dalam pengelolaan irigasi dan diharapkan akan berujung pada kemandirian organisasi HIPPA. Pada akhir Tahun 2004 lalu Daerah Irigasi Penewon telah pula membentuk Forum komunikasi HIPPA bersama Gabungan



HIPPA pada Daerah Irigasi lain di Kabupaten Mojokerto yaitu Induk HIPPA pada Daerah Irigasi Padi Pomahan, Daerah Irigasi Kemiri Bawah, Daerah Irigasi Kromong, Daerah Irigasi Ketintang, Daerah Irigasi Subontoro, Daerah Irigasi Pehngaron, Daerah Irigasi Lebak Sumengko, Daerah Irigasi Bacem dan Daerah Irigasi Candi Limo, yang bertujuan mengatur air secara tertib, adil dan merata bagi berbagai kepentingan dan antar anggota HIPPA di tingkat primer untuk meningkatkan produksi pertanian.

Permasalahan dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Penewon antara lain adalah masih adanya hambatan dalam penarikan iuran untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Masih tetapnya atau tidak adanya peningkatan hasil produksi pertaniannya pada areal sawah perhektarnya dibandingkan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengelolaan irigasi oleh Gabungan HIPPA.

Tabel 4.6. Kinerja pengelolaan irigasi

No	JENIS DATA	D.I. MENTURUS	D.I. PENEWON
1	Alokasi air irigasi	Sejak tahun 2000 s/d 2004 hanya terairi 2/3 dari seluruh luas 736 ha atau seluas 491 Ha	- Pada tahun 2000 hanya terairi seluas 907 Ha dari 974 Ha atau sebesar 93.12% - Tahun 2001 s/d 2004 terairi seluas 974ha atau sebesar 100 %
2	Pola tata tanam	Tidak bisa sesuai dengan potensi air irigasi	Sesuai kesepakatan rapat anggota dan bisa sesuai dengan potensi air irigasi
3	Hasil pertanian	5 – 6 ton/Ha	5 – 6 ton/Ha

Sumber : Wawancara dan dokumentasi Gabungan HIPPA

## - Keanggotaan dalam Organisasi

Jumlah anggota dalam organisasi pengelola irigasi sangat dipengaruhi oleh luasnya layanan yang harus diberikan dalam mendistribusikan air irigasi. Keanggotaan organisasi pengelola irigasi tidak terbatas pada satu atau dua desa bahkan mencapai beberapa kecamatan seperti pada Daerah irigasi menturus yang mencakup dua Kecamatan dan Daerah irigasi Penewon yang mencakup tiga Kecamatan

Disadari bahwa berkembangnya sebuah organisasi dalam mengelola irigasi tidak hanya tergantung kepada kinerja pengurus, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh anggota. Hal ini dapat dilihat dari peran serta anggota organisasi pengelola irigasi di daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon sebagaimana berikut:

Pada Daerah Irigasi Menturus pengelolaan irigasinya masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dijalankan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, yang dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh pegawai di jajaran Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, sedangkan peran organisasi HIPPA yang ada hanya sebatas pada pendukung terhadap kegiatan pengelolaan irigasi di daerahnya.

Pada Daerah Irigasi Penewon dalam menjalankan pengelolaan irigasi dibantu dengan anggota HIPPA, namun demikian perlu dipahami adanya sejumlah pemilik sawah yang merupakan petani penggarap sawah, sehingga dengan demikian menjadikan kesulitan bagi pengurus organisasi pengelola irigasi untuk mengembangkan peran aktif para anggotanya. Petani penggarap bukan pengambil keputusan terakhir dalam proses pengembangan pengelolaan irigasi, disamping itu

anggota juga punya anggapan bahwa pencarian sumber-sumber air baru adalah sepenuhnya tugas pengurus, demikian halnya dengan anggota organisasi yang terletak dekat dengan pintu-pintu pengambilan atau dekat dengan sumber-sumber air sulit untuk dilakukan koordinasi (khususnya bagi petani yang berada di hulu saluran irigasi). Dengan luasan areal Daerah Irigasi Penewon yang mencapai 974 Ha keanggotaan lembaga pengelola irigasi mencapai 1.126 anggota dengan rasio 0.9 Ha / orang. Ini berarti bahwa setiap orang/anggota HIPPA mempunyai beban keberlanjutan fungsi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Penewon seluas 0.9 Ha.

#### **b. Kelengkapan Organisasi dan Kelembagaan**

Dalam menjalankan berbagai aktifitas organisasi pengelola irigasi membutuhkan berbagai kelengkapan sarana dan prasarana yang meliputi antara lain bangunan perkantoran, administrasi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja. Adapun hasil penelitian dari masing-masing organisasi pengelola irigasi pada Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon adalah sebagai berikut:

##### **- Bangunan Kantor**

Bangunan kantor berfungsi sebagai tempat kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan pertemuan. Semua kegiatan kelengkapan administrasi akan tersimpan dan tertata dalam ruang perkantoran, sehingga dengan demikian semua anggota akan dapat melihat dan memanfaatkan semua kegiatan dimaksud untuk kepentingan pengurus dan anggotanya.

Daerah Irigasi Menturus yang dikelola oleh Dinas Pengairan segala kegiatannya dipusatkan pada Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Sehingga data dan

informasi yang berkaitan dengan Daerah Irigasi ini diperoleh dari Cabang Dinas tersebut, sedangkan Gabungan HIPPA Tirta Sari hanya mendukung kegiatan Cabang Dinas Pengairan Gedeg meskipun tidak optimal.

Sedangkan Daerah Irigasi Penewon yang dikelola oleh Gabungan HIPPA Tirta Agung bangunan kantornya berada di Jalan Kamas Setioadi Nomor. 37, Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, yang juga merupakan Rumah Ketua Gabungan HIPPA Tirta Agung yaitu Bapak Imam Basuki.

#### - **Buku administrasi**

Salah satu indikator keberhasilan pelayanan yang diberikan organisasi kepada anggota adalah kelengkapan administrasi, artinya jika buku administrasi dinilai lengkap atau sesuai kebutuhan, maka pelayanan yang diberikan organisasi adalah optimal dan demikian sebaliknya.

Daerah Irigasi Menturus secara administrasi dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg, yang secara teknis irigasi dan pertanian dapat secara lengkap diperoleh pada Cabang Dinas Pengairan Gedeg, namun demikian data dan informasi yang berkaitan langsung dengan lapangan berada pada Juru-juru Pengairan yang memiliki wilayah kerja rata-rata seluas 300 s/d 400 Hektar.

Daerah Irigasi Penewon buku-buku administrasi tersimpan di Kantor Gabungan HIPPA yang juga merupakan Rumah Ketua Gabungan HIPPA Tirta Agung. Secara administratif buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi ada di kantor sesuai dengan kebutuhan seperti buku iuran anggota, buku kas, program kerja, buku anggota, Berita acara serah terima pengelolaan yang

ditandatangani Bupati Mojokerto dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan HIPPA Tirto Agung.

**c. Pendanaan Pengelolaan Irigasi**

Sumber-sumber pendanaan yang dipakai dalam pengelolaan Daerah Irigasi Menturus sebagian berasal dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Cabang Dinas Pengairan Gedeg, dan ditambah dari iuran insidentil yang berasal dari petani pada Daerah irigasi Menturus yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan besarnya kemampuan masing-masing untuk membayar iuran tersebut. Pertanggungjawaban dari penggunaan dana pengelolaan irigasi berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Cabang Dinas Pengairan Gedeg pada tiap akhir tahunnya dan merupakan kegiatan rutin pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pertanggungjawaban dana pengelolaan irigasi yang berasal dari iuran secara langsung yang sifatnya insidentil, pertanggungjawabannya tidak ada, karena hasil pengumpulan iuran insidentil tersebut tidak dimasukkan dalam sebuah kas organisasi terlebih dahulu baru dibelanjakan, namun setelah dikumpulkan langsung diberikan kepada pihak "ketiga" untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Sedangkan untuk Daerah Irigasi Penewon sumber-sumber pendanaan pengelolaan irigasi berasal dari 5 sumber pendanaan yaitu antara lain (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara insidentil mengalokasikan pendanaan untuk stimulan kegiatan pengelolaan irigasi yang berupa rehab, desain dan konstruksi irigasi; (2). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur, yang juga berupa stimulan-stimulan kegiatan pemberdayaan pengelolaan irigasi; dan perbaikan berat jaringan irigasi; (3) APBD Kabupaten

Mojokerto, yang berupa stimulan-stimulan rehab dan perbaikan jaringan irigasi dan perbaikan berat jaringan irigasi; (4) Iuran wajib Anggota dan insidentil anggota untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi serta perbaikan kecil jaringan irigasi; (5) Donatur dan sumber lain yang tidak mengikat, digunakan untuk kegiatan operasional Gabungan HIPPA. Penggunaan dana pengelolaan irigasi di Daerah Penewon sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat pada saat rapat anggota dan dipertanggungjawabkan pemakaian dana tersebut kepada anggota HIPPA pada rapat anggota setiap akhir bulan.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan, maka secara umum pendanaan pengelolaan irigasi pada kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon dapat didisplaykan sebagaimana pada tabel 4.7. berikut.

Tabel 4.7. Pendanaan Pengelolaan Irigasi

No	JENIS DATA	D.I. MENTURUS	D.I. PENEWON
1	Pendanaan pengelolaan irigasi	2 sumber (APBD Kabupaten dan iuran petani secara insidentil)	5 sumber (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Iuran wajib anggota dan donatur tidak tetap.
2	Alokasi Pendanaan untuk Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	- APBD Kab. rata-rata pertahunnya Rp. 257.840.000 - Iuran lain tidak pasti	- APBD Kabupaten rata-rata pertahun Rp. 92.535.000 - Iuran Gabungan HIPPA/tahun Rp.30.000.000 - APBN/Propinsi Dan donatur tidak pasti

3	Pertanggungjawaban penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai prosedur pemerintah</li> <li>• Iuran, tidak ada pertanggung jawaban karena langsung diberikan kepada pihak ketiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN/D Prop./ APBD Kab. melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai prosedur pemerintah</li> <li>• Iuran wajib dan donatur, bentuk pertanggung jawaban berupa laporan keuangan organisasi dan disampaikan dalam rapat anggota.</li> </ul>
4	Jangka waktu pertanggungjawaban	Dilakukan tahunan, dengan audit sekitar 6 bulan sekali	Dilaporkan kepada anggota setiap bulan sekali untuk iuran dan sumbangan donatur, termasuk dan dari APBN/D

Sumber : Wawancara, Dinas PU pengairan dan dokumentasi Gabungan HIPPA

#### 4.1.2.2. Teknis Pengelolaan Irigasi

Teknis pengelolaan irigasi tidak saja tergantung kepada sumber air dan pemanfaatannya, kondisi sarana dan prasarannya serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasinya. Adapun hasil penelitian dilapangan untuk Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon adalah sebagaimana berikut:

##### a. Sumber Air

Sumber air yang dimanfaatkan untuk aktifitas pertanian di daerah Irigasi Menturus berasal dari air permukaan atau sungai yaitu diambil dari Dam Menturus di Kali Brantas. Namun demikian karena debit air yang relatif tidak mencukupi

untuk usaha pertanian, maka sebagian Daerah Irigasi tidak bisa terairi yaitu sekitar 2/3 dari seluruh Luas Daerah Irigasi Menturus yaitu 736 Ha.

Daerah Irigasi Penewon mendapatkan alokasi air dari air permukaan yaitu dari Bendung Penewon di Kali Brangkal yang juga merupakan anak Kali Brantas. Pemanfaatan air di Daerah Irigasi Penewon digunakan untuk irigasi persawahan dengan areal seluas 974 Ha. Pada saat keberadaan air mencukupi debitnya, sumberdaya airnya dapat digunakan oleh seluruh areal irigasi, namun demikian pada saat air tidak mencukupi, maka dipakai dengan cara giliran diantara anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung.

**b. Kondisi sarana dan prasarana irigasi**

Kondisi sarana dan prasarana irigasi Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon secara umum dalam kondisi baik. Namun demikian untuk mempertahankan fungsi jaringan irigasi memerlukan Operasi dan Pemeliharaan yang rutin dilakukan. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi ditujukan untuk menyediakan air bagi kegiatan sektor pertanian. Umumnya jika lembaga HIPPA menghadapi tantangan ekologis yang cukup berat, maka sistem pengoperasiannya cenderung lebih baik dibandingkan daerah yang memiliki tingkat tantangan ekologisnya rendah, hal ini ditandai dengan semakin mudah petani mengambil air dari sungai dan membawanya ke lahan atau makin besar ketersediaan air, maka makin tidak terdorong petani untuk membentuk suatu organisasi yang cukup kuat mengelola irigasi di Daerah Irigasinya, sehingga pemeliharaan saluran irigasi yang biasanya dilakukan gotong royong dilakukan dengan menggunakan tenaga di luar HIPPA dengan menggunakan sistem bayar.



Kegiatan Operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pembagian air, pengaturan waktu pemberian air, keadilan dalam pembagian air termasuk pengoperasian pompa jika diperlukan. Pemeliharaan meliputi pembersihan, pemotongan rumput saluran, pelumasan pintu air dan pengecatan pintu air.

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan di Daerah Irigasi Menturus dilakukan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto yaitu mulai dari Pengamat Pengairan di Tingkat Kecamatan, Juru Pengairan dengan luas wilayah antara 300 sampai dengan 400 ha, Penjaga Pintu Air dan Pekarya. Operasionalisasi pembagian air irigasi pada Daerah Irigasi Menturus dilakukan secara bergiliran dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Kegiatan pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan fungsi saluran dengan membersihkan, memotong rumput dilakukan oleh para pekarya sedangkan untuk pelumasan dan pengecatan pintu air dilakukan oleh Penjaga Pintu Air (PPA).

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Penewon dilakukan oleh Gabungan HIPPA Tirto Agung utamanya Bagian Teknis Gabungan HIPPA Tirto Agung. Kegiatan pendistribusiannya didasarkan atas Rapat Anggota sesuai dengan pola tata tanam yang disepakati dan disesuaikan dengan keberadaan air yang ada. hasil pengalokasian air baku bagi berbagai kepentingan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Komisi Irigasi Kabupaten). Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, terdapat 3(tiga) sistem yang dilakukan Gabungan HIPPA Tirto Agung dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yaitu antara lain: (1) menggerakkan petani anggota Gabungan HIIPA Tirto Agung bergotong royong membersihkan endapan atau rumput diseluruh saluran irigasi; (2). Gabungan HIPPA menarik iuran kepada anggota

petani secara khusus untuk pemeliharaan jaringan irigasi, dan pelaksanaan pekerjaan pembersihan saluran irigasi dilakukan tenaga kerja dari dalam maupun luar dengan sistem borongan; (3). Gabungan HIPPA memberikan tanggungjawab kepada setiap petani anggota Gabungan HIPPA Tirta Agung untuk memelihara saluran yang berdekatan dengan lahannya, artinya jika terdapat saluran yang rusak atau terjadi pendangkalan dan berdekatan dengan lahan petani dimaksud, maka menjadi tanggung jawabnya petani tersebut untuk memelihara dan mempertahankan fungsi saluran irigasi.

Tabel 4.8. Teknis Pengelolaan Irigasi

No	JENIS DATA	D.I. MENTURUS	D.I. PENEWON
1	Potensi air irigasi	Musim penghujan mencukupi, musim kemarau tidak mencukupi	Musim penghujan mencukupi, musim kemarau tidak mencukupi
2	Pelaksana kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Dinas Pengairan lewat Juru-juru Pengairan yang dibantu Pekarya dan Penjaga Pintu Air (PPA)	Gabungan HIPPA Tirta Agung dibantu anggota (petani)
3	Pertanggungjawaban secara teknis pengelolaan irigasi	Dilakukan setiap 10 hari sekali	Setiap satu bulan sekali
4	Luas areal yang ditangani pelaksana kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Dengan luasan antara 300 Ha sampai dengan 400 Ha	Dengan ratio sekitar 0.9 Ha sampai dengan 1 Ha

Sumber : Wawancara. Dinas Pengairan dan dokumentasi GHIPPA

#### 4.1.3. Faktor Eksternal Pengelolaan Irigasi

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan irigasi diperlukan karena untuk mengelola jaringan irigasi secara efisien dan efektif dalam

aktivitasnya tidak pernah dan tidak bisa terlepas dari interelasi dengan institusi lain yang melingkupinya yaitu antara lain lembaga pemerintah dan lembaga sosial ekonomi lain yang berada disekitarnya. Interelasi yang dimaksud adalah ke-intens-an hubungan antara kedua organisasi yang saling berhubungan. Adapun bentuk-bentuk interelasi antara lembaga pengelola irigasi dengan lembaga lainnya di masing-masing Daerah Irigasi dapat diuraikan sebagaimana berikut.

#### **4.1.3.1. Interelasi HIPPA dengan Organisasi Sosial lain**

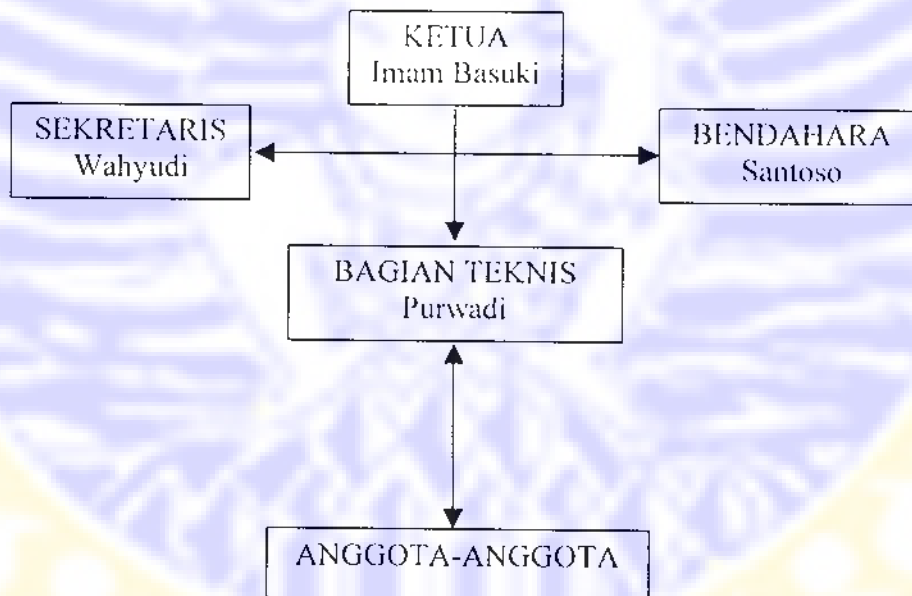
##### **a. Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani**

Interelasi HIPPA dengan Kelompok Tani mempunyai hubungan yang sangat erat, dan keberadaan Kelompok Tani tidak bisa dipisahkan dengan Organisasi Pengelola Irigasi, karena anggota organisasi pengelola irigasi juga merupakan anggota Kelompok Tani yang mengelola pertanian di areal irigasi tersebut. Secara organisatoris antara lembaga pengelola irigasi dengan kelompok tani merupakan satu kesatuan, karena kepengurusannya adalah sama, sedangkan secara kelembagaan berbeda, dimana kelompok tani berperan dalam mengatur pola tata tanam, sedangkan organisasi pengelola irigasi (HIPPA) berperan sebagai penyedia irigasi untuk pertanian.

Pada Daerah Irigasi Menturus pengaturan pola tata tanam pada dasarnya sudah diberikan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg, namun demikian petani pada Daerah Irigasi Menturus tidak pernah menggunakan pola tata tanam yang diberikan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg melalui Juru-Juru Pengairan yang setiap harinya ada dilapangan, sehingga pola tata tanam di Daerah Irigasi Menturus seringkali tidak sesuai dengan kapasitas air yang dialokasikan pada Daerah Irigasi Menturus.

Pada Daerah Irigasi Penewon hubungan antara Gabungan HIPPA Tirta Guna dengan Kelompok Tani berjalan dengan baik, karena anggota kelompok tani yang ada juga merupakan anggota HIPPA. Penentuan pola tata tanam di Daerah Irigasi Penewon adalah merupakan pola tata tanam yang sudah disesuaikan dengan kapasitas air baku yang dimiliki oleh Daerah Irigasi Penewon, disamping itu pendistribusian air baku bagi anggota HIPPA juga sudah disesuaikan dengan pola tata tanam yang telah disepakati dalam rapat Anggota HIPPA. Adapun skema organisasi pengelola irigasi dengan Kelompok Tani pada Daerah Irigasi Penewon dapat disajikan dalam gambar 4.3 dan Gambar 4.4. berikut ini:

Gambar 4.3. Skema Organisasi Gabungan HIPPA Tirta Agung



Sumber : Diolah dari AD/ART Gabungan HIPPA Tirta Agung

Gambar 4.4. Skema Organisasi Kelompok Tani Surya Sari



Sumber : Diolah dari dokumentasi Kelompok Tani Surya Sari

#### b. Interelasi HIPPA dengan Lembaga Tradisional

Interelasi Lembaga Pengelola Irigasi di Daerah Irigasi Menturus dengan Lembaga Tradisional yang juga dikenal dengan "Tuwowo" di Daerah Irigasi secara operasional masuk dalam Lembaga Pemerintahan Desa, yang bertugas mengatur dan mendistribusikan air baku kepetak-petak sawah adalah sangat kuat, bahkan lembaga tradisional ini merupakan ujung tombak dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus. Hal ini karena peran "Tuwowo" lah yang bertugas mengatur dan mendistribusikan air ke petak-petak sawah, disamping itu juga sebagai penjaring aspirasi dari masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus. Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat petani baik dari "Tuwowo" maupun berasal dari perwakilan petani yang hadir dalam Rapat

Rutin yang diadakan oleh Cabang Pengairan Gedeg inilah yang dijadikan bahan dalam menyusun kebijakan pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus.

Interelasi HIPPA dengan Lembaga Tradisional di Daerah Irigasi Penewon juga memiliki hubungan yang sangat dekat. Hal ini karena meskipun setelah lembaga HIPPA telah didirikan, namun keberadaan lembaga tradisional tidak tergeser dan "Tuwowo" tetap digunakan sebagai pengurus dalam keorganisasian HIPPA yaitu sebagai Petugas Teknis di lapangan. Keterkaitan antar lembaga HIPPA dengan lembaga tradisional dapat meningkatkan kemandirian HIPPA yang otonom. Karena "Tuwowo" sudah memiliki pengalaman dalam melayani pengaturan dan pendistribusian air irigasi secara adil, merata dan efisien kepada seluruh anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung.

#### **4.1.3.2. Interelasi HIPPA dengan Lembaga Pemerintah**

Interelasi lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah yang terjadi adalah pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan irigasi. Lembaga Pemerintah yang berperan dalam pengelolaan irigasi antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Pertanian. Sedangkan hubungan antara Lembaga Pengelola Irigasi dengan Lembaga Pemerintah dari masing-masing Daerah Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **a. Interelasi HIPPA dengan Pemerintah Pusat**

Interelasi lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Pusat pada daerah Irigasi Menturus, adalah hubungan struktural dimana pengelola irigasi di Daerah Menturus adalah Cabang Dinas Pengairan Gedeg dengan dibantu Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air dan Pekarya yang semuanya merupakan jajaran Dinas Pengairan

Kabupaten Mojokerto. Interelasi dengan Pemerintah Pusat adalah terkait dengan adanya program Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Daerah Irigasi Menturus yang biasanya berupa pembangunan, peningkatan dan perbaikan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Sedangkan interelasi lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Pusat pada daerah Irigasi Penewon, adalah hubungan kemitraan dimana pengelola irigasi di Daerah Penewon dengan Pemerintah Pusat adalah terkait dengan adanya program Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Daerah Irigasi Penewon yang biasanya berupa pembangunan, peningkatan dan perbaikan serta rehabilitasi jaringan irigasi serta stimulan untuk pemberdayaan Lembaga Pengelola Irigasi.

#### **b. Interelasi HIPPA dengan Pemerintah Propinsi**

Interelasi lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Provinsi pada daerah Irigasi Menturus, adalah hubungan struktural dimana pengelola irigasi di Daerah Menturus adalah Cabang Dinas Pengairan Gedeg dengan dibantu Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air dan Pegawai yang semuanya merupakan jajaran Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto. Interelasi dengan Pemerintah Provinsi adalah terkait dengan adanya program Pemerintah Provinsi yang dialokasikan pada Daerah Irigasi Menturus yang biasanya berupa pembangunan, peningkatan dan perbaikan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Sedangkan interelasi lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Provinsi pada daerah Irigasi Penewon, adalah hubungan kemitraan dimana pengelola irigasi di Daerah Penewon dengan Pemerintah Provinsi adalah terkait dengan adanya program Pemerintah Provinsi yang dialokasikan pada Daerah

Irigasi Penewon yang biasanya berupa pembangunan, peningkatan dan perbaikan serta rehabilitasi jaringan irigasi serta stimulan untuk pemberdayaan Lembaga Pengelola Irigasi.

**c. Interelasi HIPPA dengan Pemerintah Kabupaten**

Interelasi lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Kabupaten pada daerah Irigasi Menturus, adalah hubungan struktural dimana pengelola irigasi di Daerah Menturus adalah Cabang Dinas Pengairan Gedeg dengan dibantu Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air dan Pekarya yang semuanya merupakan jajaran Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto. Interelasi dengan Pemerintah Kabupaten adalah terkait dengan adanya program Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan pada Daerah Irigasi Menturus yang biasanya berupa pembangunan, peningkatan dan perbaikan serta rehabilitasi jaringan irigasi atas dasar usulan Cabang Dinas Pengairan Gedeg yang diajukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan interelasi lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Irigasi Penewon, adalah hubungan kemitraan dimana pengelola irigasi di Daerah Penewon dengan Pemerintah Kabupaten adalah terkait dengan adanya program Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan pada Daerah Irigasi Penewon yang biasanya berupa pembangunan, peningkatan dan perbaikan serta rehabilitasi jaringan irigasi serta stimulan untuk pemberdayaan Lembaga Pengelola Irigasi atas dasar usulan Gabungan HIPPA Tirta Agung yang disampaikan kepada Dinas Pengairan maupun Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.



#### **d. Interelasi HIPPA dengan Pemerintah Desa**

Interelasi Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Desa pada Daerah Irigasi Menturus sangat erat sekali, karena Pemerintah Desa adalah sebagai pemilik dari Lembaga Tradisional, sedangkan Lembaga Tradisional sebagaimana telah diuraikan adalah merupakan ujung tombak dan sekaligus sebagai pengakomodasi terhadap keinginan dan aspirasi petani pada Daerah Irigasi Menturus. Oleh karenanya pengelola irigasi Daerah Menturus yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pemerintah Desa, sehingga apabila Kepala Desa yang terpilih berasal dari personal yang tidak mengetahui pertanian akan menyulitkan dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi.

Interelasi Lembaga HIPPA dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan, dimana lembaga pengelola irigasi yang dibentuk di Daerah Irigasi Penewon merupakan lembaga yang mandiri dan otonom, meskipun terdapat lembaga tradisional yang masuk dalam kepengurusan namun segala kebijakan dalam pengelolaan irigasi merupakan keputusan bersama anggota HIPPA dalam rapat anggota yang diadakan setiap bulan. Sedangkan Pemerintah Desa memfasilitasi dan membantu HIPPA untuk menjadikan sebagai lembaga yang mandiri dengan cara memberi masukan dalam penyusunan AD/ART organisasi dan membantu HIPPA menghimpun iuran dari anggota.

#### 4.2. Analisis Hasil Penelitian

Bagian ini memuat analisis terhadap data-data penelitian yang relevan dengan tujuan dan permasalahan yang diteliti. Oleh karena yang diteliti adalah berkaitan dengan implementasi *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi di daerah Kabupaten Mojokerto, maka analisis yang dilakukan adalah terhadap data-data penelitian yang berkaitan dengan implementasi *Good Governance* yaitu khususnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi.

Analisis mengenai pengelolaan irigasi tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan, perbaikan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kelembagaan pengelola irigasi disamping keberadaan sumber air yang dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan irigasi tersebut. Berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan tampak bahwa berdasarkan luas Daerah Irigasinya kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus seluas 736 Ha dan Daerah Irigasi Penewon seluas 974 Ha, sehingga luasan tersebut berada pada kisaran luas dibawah 1.000 Ha. berdasarkan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa kedua Daerah Irigasi tersebut merupakan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaannya. Sesuai penjelasan pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, dinyatakan bahwa luasan Daerah Irigasi dibawah 1.000 Ha kewenangannya berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi memiliki kewenangan pengelolaan irigasi pada kisaran luasan antara 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha dan Pemerintah Pusat pada luasan diatas 3.000 Ha.

## **4.2.1. Penerapan Good Governance**

### **4.2.1.1. Daerah Irigasi Menturus**

#### **a. Transparansi**

Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan operasi dilakukan oleh Dinas dengan masukan dari tuwowo dan juru pengairan serta perwakilan petani, sehingga petani dalam pengambilan kebijakan tidak mempunyai peran yang sangat dominan, karena dalam pengambilan keputusan operasi tersebut hanya ada perwakilan dan suara petani yang disampaikan lewat juru pengairan, sedangkan petani hanya menerima hasil kesepakatan yang diputuskan dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg.

Permasalahan dalam pengelolaan irigasi tidak banyak menimbulkan permasalahan, hal ini diindikasikan dari tidak pernah ada atau hampir tidak adanya protes-protes yang muncul dari petani terkait dengan keadilan dalam operasional jaringan irigasi. Permasalahan yang seringkali muncul dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus adalah permasalahan kepatuhan petani terhadap pola tanam yang dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg, sehingga dengan demikian menyebabkan pendistribusian air irigasi yang dilakukan seringkali menjadi tidak seimbang antara kebutuhan dengan air yang diberikan dan berujung kepada hasil produksi yang tidak optimal. Disamping itu permasalahan yang seringkali juga muncul adalah apabila Kepala Desa yang terpilih bukan berasal dari orang yang mengerti masalah pertanian, hal ini dapat dimaklumi karena sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa ujung tombak pelaksanaan pengelolaan di Daerah Irigasi Menturus adalah lembaga tradisional yang dikenal dengan "Tuwowo" dan tuwowo ini juga merupakan perangkat desa, sehingga

tuwowo merasa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Apabila Kepala Desa bukan berasal dari orang yang mengerti masalah pertanian, maka kebijakan yang dikeluarkan juga akan tidak bisa operasional serta tidak bisa dijadikan pedoman oleh Tuwowo dalam menjalankan tugasnya dalam mendistribusikan air di lapangan.

Dalam kaitannya dengan kelembagaan pengelola irigasi di Daerah Irigasi Menturus adalah dikelola oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg, meskipun secara normatif pada Daerah Irigasi ini petaninya telah membentuk dan memiliki HIPPA bahkan Gabungan HIPPA yaitu Gabungan HIPPA Tirta Sari yang diketuai oleh Bapak Sadi, namun dalam implementasinya dilapangan organisasi petani ini tidak jalan bahkan cenderung "mati", karena Gabungan HIPPA ini tidak mempunyai program bersama antara anggotanya yang ditetapkan oleh seluruh petani anggota HIPPA/Gabungan HIPPA tersebut. Ada anggapan dari petani bahwa pembentukan HIPPA/Gabungan HIPPA tersebut merupakan produk "asing" yang keberadaanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang asing tersebut selaku pemberi dana untuk kegiatan pemberdayaan petani, sehingga petani-petani anggota HIPPA/Gabungan HIPPA cenderung untuk memberikan kekuasaan pengelolaan irigasinya kepada Cabang Dinas Pengairan Gedeg beserta jajaran dibawahnya. Penyampaian aspirasi dan keinginan petani-petani dilakukan secara informal dengan menyampaikan aspirasi tersebut kepada jajaran Cabang Dinas Pengairan Gedeg melalui komunikasi secara langsung kepada juru-juru pengairan yang setiap harinya ada di lapangan. Juru-juru inilah yang selanjutnya merangkum dan mengkomodifikasinya untuk dimasukkan dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus.

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dari implementasi transparansi pada Daerah Irigasi Menturus antara lain adalah:

1. Faktor pendorong antara lain: (1) adanya mekanisme koordinasi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan transparansi pengelolaan, (2). Sering terjadinya ketidak sesuaian antara pola tata tanam dengan ketersediaan air irigasi, (3) ketidak tahuan petani terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
2. Faktor penghambat antara lain : (1) pengelola irigasi dilakukan oleh pemerintah (Cabang Dinas Pengairan Gedeg), (2) Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg tidak melibatkan seluruh petani yang mendapatkan pelayanan irigasi (3) ada sikap apatis dan budaya “nrimo” dari petani terhadap pengelolaan irigasi

b. Akuntabilitas

Secara teknis, pengelolaan irigasi adalah adalah kegiatan meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengaturan dan pendistribusian air serta kondisi alamiah jaringan irigasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan analisa pengelolaan irigasi secara teknis dikaitkan dengan penerapan *Good Governance* pada Daerah Irigasi Menturus dapat diuraikan sebagai berikut

Kegiatan Operasi Daerah Irigasi Menturus yang meliputi kegiatan pembagian air, pengaturan waktu pemberian air, keadilan dalam pembagian air termasuk pengoperasian pompa jika diperlukan, dimana semuanya dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaannya kepada anggota di dalam organisasi yaitu dengan mengadakan pertemuan setiap 10 hari sekali yang dihadiri oleh perwakilan petani yang dapat diajak koordinasi,

(Lembaga Tradisional) “Tuwowo”, Juru Pengairan dan Penjaga Pintu Air pada jajaran Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Tujuan rapat koordinasi adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus, termasuk mempertimbangkan masukan-masukan dari petani yang disampaikan oleh perwakilan petani maupun Juru-juru pengairan yang menyampaikan aspirasi petani pada saat bertugas di lapangan. Pertanggungjawaban terhadap organisasi lain yang terkait dengan pengelolaan irigasi yaitu Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto dilakukan setiap tahun sekali sesuai dengan siklus Tahun Anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan irigasi baik secara teknis maupun finansial.

Akuntabilitas dalam kelembagaan pengelola irigasi berdasarkan skema organisasi pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus nampak bahwa pelaksana pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi ini adalah Cabang Dinas Pengairan Gedeg beserta jajarannya, sedangkan HIPPA hanya pendukung yang berupa garis konsultatif dan koordinatif, sehingga peran HIPPA/Gabungan HIPPA menjadi tidak terlibat secara penuh dalam pengelolaan irigasi. Oleh karena itu pertanggungjawaban terhadap kinerja dan keuangan pengelolaan irigasi tidak ditujukan kepada petani sebagai pemanfaat langsung irigasi, tetapi kepada Bupati Mojokerto melalui Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto.

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dari implementasi akuntabilitas pada Daerah Irigasi Menturus antara lain adalah:

1. Faktor pendorong antara lain: (1) adanya mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan akuntabilitas pengelolaan, (2).

Petani sebagai penerima manfaat secara langsung dan sasaran pembangunan dan pengelolaan irigasi, (3) ketidak tahuan petani terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara finansial maupun kinerja pengelolaan

2. Faktor penghambat antara lain : (1) pengelola irigasi dilakukan oleh pemerintah (Cabang Dinas Pengairan Gedeg), sehingga pertanggungjawaban juga dilakukan kepada pemerintah, (2) implementasi mekanisme pertanggungjawaban yang tidak dapat diakses oleh petani (3) Organisasi pengelola irigasi yang dibentuk oleh petani tidak aktif.

#### c. Partisipasi

Dalam kaitannya dengan teknis pengelolaan irigasi selain kegiatan operasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan irigasi terdapat kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. dimana pemeliharaan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembersihan saluran dari endapan, pemotongan rumput, pelumasan dan pengecatan pintu air termasuk pengamanan. Kegiatan pemeliharaan pada Daerah Irigasi Menturus selain dilakukan secara rutin oleh para pekarya dan penjaga pintu air pada Cabang Dinas Pengairan Gedeg, juga dilakukan dengan peran serta petani yang dilakukan melalui dua cara yaitu dengan gotong royong dan model penarikan iuran untuk kegiatan pemeliharaan, namun demikian kegiatan yang paling sering dilakukan adalah penarikan iuran dan pelaksanaan pembersihannya dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini karena petani pada Daerah Irigasi Menturus lebih mengutamakan kepraktisan dalam pelaksanaan pembersihan disamping petani merasa bahwa kegiatan pemeliharaan tersebut merupakan tugas dari Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Kegiatan gotong royong sudah jarang sekali dilakukan,

meskipun kadang-kadang juga dilakukan karena sebagian masyarakat menilai bahwa kegiatan gotong royong merupakan kewajiban rutin yang tidak bisa dihindari, sehingga para petani ini masih tetap melakukan gotong royong karena untuk mempertahankan budaya atau karena keterpaksaan.

Sumberdaya manusia kelembagaan pengelola irigasi pada Daerah Irigasi Menturus memiliki tenaga yang memadai dan telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan irigasi, sehingga dengan demikian permasalahan-permasalahan yang setiap saat muncul dilapangan dapat ditangani secara langsung dan cepat. Hal ini karena disamping mereka memiliki kemampuan dan pengalaman, mereka juga memiliki jaringan komunikasi dengan instansi terkait lain di dalam pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Kondisi yang demikian itu kadang-kadang bisa menjadikan permasalahan dimana aspirasi dan keinginan dari para petani menjadi tidak terakomodasikan karena pengelola irigasi merasa lebih tahu mana yang lebih baik dan harus dilakukan dalam pengelolaan irigasi. Secara organisasi petani tidak ikut dalam menentukan kebijakan pengelolaan irigasi, namun mereka masih tetap mempunyai niat untuk mempertahankan minimal kepentingan pribadinya yaitu dengan tidak mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola irigasi seperti kebijakan pengaturan pola tata tanam, meskipun dalam kenyataan berdampak kepada hasil produksi yang tidak optimal.

Program-program pembangunan pemerintah yang dilaksanakan pada Daerah Irigasi Menturus pada dasarnya selalu diterima dengan baik oleh para petani di Daerah Irigasi ini, hal ini dapat diindikasikan dari tidak adanya protes dari petani kepada lembaga pengelola irigasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan



pengelolaan irigasi, namun demikian kelanjutan dari program tersebut belum tentu dapat dijamin berkelanjutannya, karena petani merasa belum memerlukan keberadaan program tersebut, seperti contoh pembentukan HIPPA/Gabungan HIPPA yang ditujukan untuk memberdayakan petani, meskipun tidak terdapat penolakan dari petani dan bahkan mereka tetap saja membentuk beserta seluruh pengurusnya, namun keberadaan lembaga HIPPA/Gabungan HIPPA tersebut dalam kenyataan di lapangan dapat dikatakan "mati" atau tidak operasional. Mereka (para petani) tetap mempercayakan kepengurusan pengelolaan irigasinya kepada pemerintah yaitu Cabang Dinas Pengairan Gedeg.

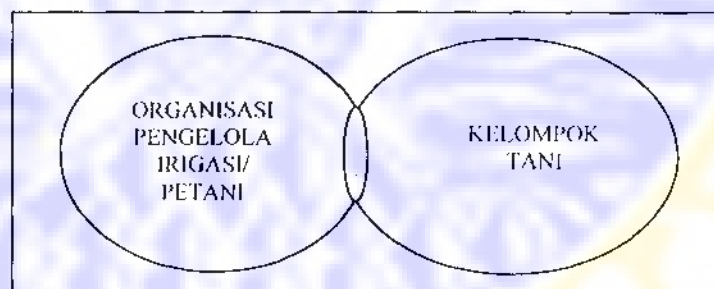
Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dari implementasi partisipasi pada Daerah Irigasi Menturus antara lain adalah:

1. Faktor pendorong antara lain: (1) tidak ada pelibatan secara aktif dari petani yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg. (2). Petani sebagai penerima manfaat secara langsung dan sasaran pembangunan dan pengelolaan irigasi. (3) ketidak tahuan petani terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara finansial maupun kinerja pengelolaan. (4). Ada mekanisme yang dapat dimanfaatkan petani untuk ikut berpartisipasi.
2. Faktor penghambat antara lain : (1) pengelola irigasi dilakukan oleh pemerintah (Cabang Dinas Pengairan Gedeg). (2) implementasi terhadap mekanisme pengelolaan irigasi tidak sepenuhnya dilakukan (3) Organisasi pengelola irigasi yang dibentuk oleh petani tidak aktif. (4) sikap apatis masyarakat(petani) dan adanya budaya "nrimo" yang ada di masyarakat (petani)

#### d. Interelasi (Jaringan)

Interelasi petani Daerah Irigasi Menturus dengan lembaga sosial lain yang ada disekitarnya yaitu lembaga tradisional dan Kelompok Tani sebagaimana telah diuraikan pada data lapangan. pada dasarnya hubungan antara petani Daerah Irigasi Menturus dengan kelompok tani dapat dikatakan terdapat sedikit hubungan yaitu hanya sebatas pemberian informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanian sedangkan hubungan yang mengarah kepada pola kerjasama dan kemitraan masih belum dilakukan, hal ini karena seluruh kegiatan pengelolaan irigasi sudah dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan. Dampak dari sentralisasi pengelolaan pada Daerah irigasi ini terjadi ketidak sesuaian antara pola tata tanam dengan potensi air irigasi yang ada. Adapun hubungan antara Lembaga Pengelola Irigasi dengan Kelompok Tani dapat digambarkan sebagaimana Diagram Venn berikut ini:

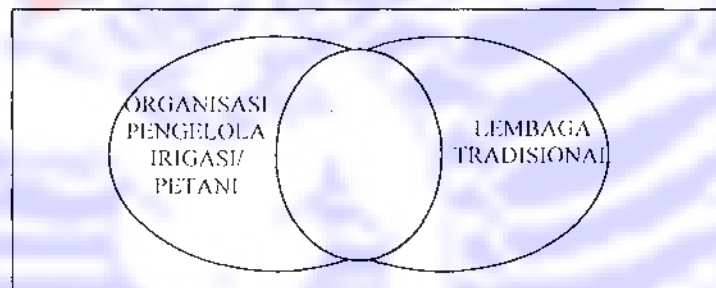
Gambar 4.5. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Kelompok Tani di Daerah Irigasi Menturus.



Hubungan antara lembaga pengelola irigasi dengan Lembaga Tradisional berdasarkan data di lapangan nampak hubungan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, karena Lembaga Tradisional “Tuwowo” adalah merupakan ujung tombak dari lembaga pengelola irigasi (Cabang Dinas Pengairan Gedeg) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi, disamping sebagai media untuk

menjaring aspirasi masyarakat petani sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan pada suatu proses penetapan kebijakan pengelolaan irigasi di Daerah irigasi Menturus. Lembaga Tradisional juga erat hubungannya dengan petani, karena petani sangat tergantung sekali kepada lembaga tradisional (Tuwowo) ini yang fungsinya sebagai pengatur dan pendistribusi air irigasi ke petak-petak sawah. Adapun hubungan antara lembaga pengelola irigasi dengan Tuwowo dapat digambar seperti Diagram Venn berikut ini:

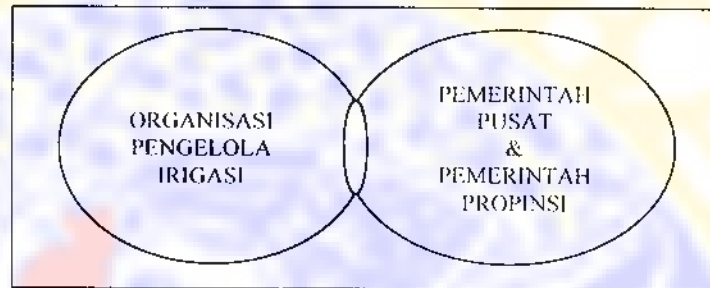
Gambar 4.6. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Lembaga Tradisional di Daerah Irigasi Menturus.



Sebagaimana telah diuraikan dalam data penelitian bahwa Interelasi antara lembaga pengelola irigasi di Daerah Irigasi Menturus dengan pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Propinsi adalah sebatas hubungan kemitraan dengan memberikan stimulan atau bantuan dalam rangka pembangunan, peningkatan dan perbaikan serta rehabilitasi jaringan irigasi dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi jaringan irigasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Irigasi bahwa berdasarkan luasannya maka pengelolaan Daerah Irigasi Menturus adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, oleh karenanya hubungan lembaga pengelola irigasi di Daerah Menturus merupakan lembaga yang berada di dalam kepengurusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto). Hubungan antara lembaga

pengelola irigasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dapat digambarkan sebagaimana Diagram Venn berikut ini:

Gambar 4.7. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Pusat di Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon.



Sedangkan untuk hubungan antara lembaga pengelola irigasi dengan Pemerintah Kabupaten dapat digambarkan seperti dalam Diagram Venn berikut::

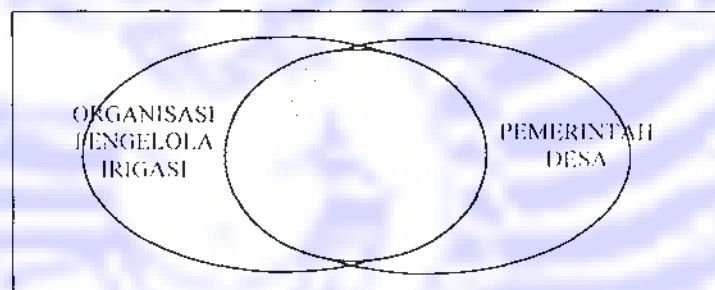
Gambar 4.8. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Kabupaten di Daerah Irigasi Menturus



Selanjutnya interelasi antara lembaga pengelola irigasi Daerah Irigasi Menturus dengan Pemerintah Desa mempunyai hubungan yang sangat erat. Tuwowo merupakan perangkat desa dan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus, meskipun Pemerintah Desa merupakan Pemerintahan tersendiri dan terpisah dengan Cabang Dinas

Pengairan Gedeg, namun dalam prakteknya dilapangan Pemerintah Desa cenderung untuk mendukung dan mensukseskan seluruh program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sehingga apapun program yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg akan mendapatkan dukungan yang optimal oleh Pemerintah Desa untuk mensukseskannya. Hal ini dimungkinkan mengingat keduanya merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sehingga hubungan antara keduanya dapat digambarkan seperti Diagram Venn berikut ini:

Gambar 4.9. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Desa di Daerah Irigasi Menturus.



Berdasarkan uraian diatas pengelolaan irigasi secara teknis, kelembagaan dan interelasi (jaringan) pada Daerah Irigasi Menturus secara ringkas seperti tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4.9. Analisa Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Menturus

NO	NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE	ANALISIS
I	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan irigasi dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg, petani tidak terlibat langsung</li> <li>▪ Secara normatif Gabungan HIPPA sudah terbentuk, meskipun tidak berjalan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuatan keputusan secara teknis dilakukan oleh Dinas Pengairan (Cabang Dinas Gedeg dan jajarannya), masukan</li> </ul>

		<p>petani hanya dari perwakilan petani yang dapat diajak koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan keuangan hanya dilakukan oleh Cabang Dinas Gedeg, petani tidak dilibatkan didalamnya, karena sumber dana utamanya berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto</li> <li>▪ Dana sebagian besar digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan perbaikan ringan jaringan irigasi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya budaya "nrimo" terhadap keputusan atau kesepakatan teknis apapun yang dibuat oleh Cabang Dinas Pengairan, meskipun kadang-kadang merugikan petani.</li> <li>▪ Faktor Pendorong: ada mekanisme, pola tanam tidak sesuai air irigasi dan ketidaktahuan petani thd kebijaksanaan pemerintah.</li> <li>▪ Faktor Penghambat: Pengelolaan dilakukan Pemerintah, sistem perwakilan dan sikap apatis serta budaya "nrimo"</li> </ul>
2	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi kinerja dilakukan 10 hari sekali</li> <li>▪ Mekanisme pertanggungjawaban secara teknis kepada petani tidak ada, petani yang menyesuaikan dengan keputusan dan kesepakatan teknis yang ditentukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg..</li> <li>▪ Pertanggungjawaban keuangan dilakukan setiap tahun sekali dan dilakukan kepada pemerintah</li> <li>▪ Pertanggungjawaban dana yang berasal dari iuran, tidak ada pertanggungjawaban</li> <li>▪ Faktor pendorong: ada mekanisme, petani pemanfaat langsung dan ketidak tahuan petani thd akuntabilitas kinerja dan keuangan</li> <li>▪ Faktor penghambat: pengelola pemerintah, mekanisme tidak dapat diakses petani dan organisasi petani tidak aktif</li> </ul>
3	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perumusan kebijakan pengelolaan irigasi dilakukan oleh Dinas Pengairan (Cabang Dinas Gedeg dan jajarannya), masukan petani hanya dari perwakilan petani yang dapat diajak koordinasi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan petani dalam pengelolaan irigasi hanya sebatas pada memberikan masukan melalui juru/tuwowo yang ada di daerah irigasinya.</li> <li>▪ Peran Kepala Desa yang sangat dominan dalam pengelolaan irigasi.</li> <li>▪ Petani tidak mau terlibat dalam kegiatan teknis pengelolaan irigasi</li> <li>▪ Sikap apatis petani dalam kegiatan teknis pengelolaan irigasi</li> <li>▪ Walaupun ada inisiatif secara teknis dari petani, hanya disampaikan kepada juru pengairan secara individual(perorangan).</li> <li>▪ Faktor pendorong: tidak ada pelibatan petani, petani penerima manfaat langsung, ketidak tahuan thd kebijakan pemerintah dan sudah ada mekanisme</li> <li>▪ Faktor penghambat: Pengelola pemerintah, implementasi mekanisme tidak sesuai, organisasi petani tidak aktif dan sikap apatis dan budaya "nrimo"</li> </ul>
4	Interelasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interelasi yang erat antara petani dengan Cabang Dinas Pengairan (juru pengairan) dan Tuwowo (Lembaga Tradisional dan juga merupakan salah satu anggota jajaran Pemerintah Desa)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interelasi yang kurang begitu erat terjadi antara petani dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yaitu hanya sebagai obyek pelaksanaan program pengelolaan irigasi.</li> </ul>

#### 4.2.1.2. Daerah Irigasi Pencwon

##### a. Transparansi

Sebagaimana telah diuraikan bahwa secara teknis pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengaturan dan pendistribusian air serta kondisi alamiah jaringan irigasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan analisa pengelolaan irigasi secara teknis dikaitkan dengan penerapan *Good Governance* pada Daerah Irigasi Pencwon dapat diuraikan bahwa

pengelolaan secara teknis pengelolaan irigasi semuanya dilakukan oleh Gabungan HIPPA Tirta Agung dengan fasilitasi dari Cabang Dinas Pengairan Brangkal.

Berkaitan dengan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan operasi dilakukan oleh Gabungan HIPPA dengan masukan dari juru pengairan serta pembina HIPPA Kabupaten, sehingga petani dalam pengambilan kebijakan mempunyai peran yang sangat dominan. Pengambilan keputusan operasi tersebut keputusannya diserahkan kepada Gabungan HIPPA untuk melakukan operasi jaringan irigasi, kecuali pada bagian-bagian tertentu masih ditetapkan oleh pemerintah seperti pada penetapan besarnya debit pengambilan pada pintu primer, hal ini untuk menghindari terjadinya perebutan pemakaian air baku dengan pemakai lainnya diluar irigasi, sedangkan untuk pemakai lain sesama irigasi telah pula dibentuk Forum Komunikasi antara gabungan HIPPA di Kabupaten Mojokerto.

Dalam kaitannya dengan kelembagaan pengelola irigasi di Daerah Irigasi Penewon, dimana kelembagaan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan keorganisasian beserta kelengkapannya yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan irigasi, maka pengelolaan irigasi dilakukan oleh Gabungan HIPPA Tiro Agung, meskipun masih difasilitasi oleh Cabang Dinas Pengairan Brangkal, namun dalam implementasinya dilapangan organisasi petani ini yaitu Gabungan HIPPA Tirta Agung sudah melakukan pengelolaan Daerah Irigasi Penewon secara mandiri.

Gabungan HIPPA Tirta Agung menyusun dan melaksanakan program-program yang dibuat bersama antara anggotanya yang ditetapkan oleh seluruh petani anggota HIPPA/Gabungan HIPPA Tirta Agung tersebut. Hal ini karena



adanya kesadaran dari petani anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung untuk tetap mempertahankan organisasinya yang sudah dirasakan manfaatnya oleh para petani anggota Gabungan HIPPA tersebut dengan keputusan tertinggi ada pada rapat anggota.

Sumberdaya manusia pengelola irigasi pada Daerah Irigasi Penewon memiliki tenaga yang memadai dan telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan irigasi, sehingga meskipun Ketua Gabungan HIPPA Tirto Agung terpilih berasal dari kalangan Guru SMEA, namun karena pengalaman dan pengetahuan serta wibawanya dipilih sebagai Ketua Gabungan HIPPA Tirto Agung, sehingga dengan demikian permasalahan-permasalahan yang setiap saat muncul di lapangan baik yang berasal dari intern maupun ekstern dapat ditangani secara langsung dan cepat. Disamping itu mereka memiliki kemampuan dan pengalaman, serta memiliki jaringan komunikasi dengan instansi terkait lain di dalam pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Permasalahan yang kadang-kadang timbul dalam pengelolaan irigasi adalah aspirasi dan keinginan dari para petani yang sudah menjadi keputusan dalam organisasi lembaga pengelola irigasi, tidak terakomodasikan dalam proses pengalokasian anggaran APBD Kabupaten Mojokerto pada Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, terutama untuk penanganan permasalahan-permasalahan yang mendesak dan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit dan tidak mampu ditangani oleh gabungan HIPPA Tirto Agung, seperti pekerjaan-pekerjaan perbaikan berat, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi, termasuk pembinaan-pembinaan yang secara teknis dan keahlian dari

petani-petani yang tergabung dalam Gabungan HIPPA Tirto Agung tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dari implementasi transparansi pada Daerah Irigasi Penewon antara lain adalah:

1. Faktor pendorong antara lain: (1) adanya mekanisme koordinasi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan transparansi pengelolaan, (2). Petani dilibatkan secara langsung dalam segala proses pengelolaan irigasi, (3) Organisasi petani pengelola irigasi aktif dalam pengelolaan irigasi
2. Faktor penghambat antara lain : (1) sikap pribadi/individu aparat pemerintah terkait pengelolaan irigasi, (2) tidak ada konsistensi pelaksanaan mekanisme koordinasi dalam tatanan pemerintahan

#### b. Akuntabilitas

Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan irigasi kepada anggota di dalam organisasi, dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati bersama yaitu dengan mengadakan pertemuan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk mengevaluasi terhadap kinerja dan keuangan pengelolaan irigasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh petani anggota Gabungan HIPPA yang dapat hadir dalam rapat koordinasi, disamping juga menghadirkan fasilitator yaitu seperti Juru Pengairan dan Pembina HIPPA Kabupaten Mojokerto baik itu dari Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, BAPPEDA Kabupaten Mojokerto maupun Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang bertujuan untuk mencari masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan terutama pemecahan permasalahan yang setiap kali muncul di lapangan.

Sedangkan pertanggungjawaban terhadap organisasi lain yang terkait dengan kinerja pengelolaan irigasi yaitu pada Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto dilakukan setiap tahun sekali, hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Irigasi, bahwa pengelolaan irigasi yang dilakukan petani setiap tahun akan dievaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan irigasi baik secara teknis maupun finansial yang telah dilakukan oleh petani melalui Gabungan HIPPAnya.

Pertanggungjawaban terhadap kinerja dan keuangan pengelolaan irigasi terbagi dalam dua macam yaitu pertanggungjawaban yang langsung ditujukan kepada petani sebagai anggota Gabungan HIPPA dan kepada Bupati Mojokerto melalui Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan kinerja pengelolaan irigasi setiap tahunnya.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Penewon adalah permasalahan kepatuhan petani terhadap penarikan iuran pengelolaan irigasi, karena petani mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan pada pelaksanaan penarikan iuran yang dilakukan oleh Dinas/pemerintah pada waktu yang telah lalu, sehingga untuk memulihkan kembali kemauan untuk membayar iuran agak sedikit mengalami hambatan dan ini selanjutnya berdampak kepada penurunan prosentase penarikan iuran yang akan dipergunakan untuk keperluan pengelolaan irigasi.

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dari implementasi akuntabilitas pada Daerah Irigasi Penewon antara lain adalah:

1. Faktor pendorong antara lain: (1) adanya mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan akuntabilitas pengelolaan, (2).

Petani sebagai penerima manfaat secara langsung pengelolaan irigasi. (3) AD/ ART organisasi petani pengelola irigasi (4). Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada organisasi petani

2. Faktor penghambat antara lain : (1) tidak adanya akses baku yang dimiliki petani dalam tatanan pemerintahan, (2) sikap individu/pribadi aparat pemerintah terkait pengelolaan irigasi

### c. Partisipasi

Selain kegiatan operasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan irigasi terdapat kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, dimana pemeliharaan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembersihan saluran dari endapan, pemotongan rumput, pelumasan dan pengecatan pintu air termasuk pengamanan. Kegiatan pemeliharaan pada Daerah Irigasi Penewon selain dilakukan dengan tiga cara yaitu pelaksanaan pemeliharaan yang secara rutin oleh para petani anggota HIPPA /Gabungan HIPPA Tirta Agung pada daerah irigasi yang berdekatan dengan areal sawah yang ditanami masing-masing individu petani, juga dilakukan dengan cara gotong royong dan model penarikan iuran untuk kegiatan pemeliharaan dengan memperkerjakan pihak ketiga untuk melakukan pemeliharaan tersebut, namun demikian kegiatan yang paling sering dilakukan adalah pemeliharaan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing individu pada jaringan irigasi yang berdekatan dengan areal sawah yang dikelola petani anggota HIPPA. Petani pada Daerah Irigasi Penewon lebih mengutamakan keadilan dalam pemanfaatan air baku bagi irigasi. perasaan tersebut muncul pada seluruh petani anggota

HIPPA/Gabungan HIPPA setelah terbentuk dan mengelola sendiri jaringan irigasinya.

Dengan terbentuknya Gabungan HIPPA, para petani anggota Gabungan HIPPA memiliki kesadaran bahwa pengelolaan irigasi harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir jaringan irigasi. Pengambilan air yang tidak terkontrol di bagian hulu akan berdampak kepada pendistribusian air di bagian hilirnya. Perasaan inilah yang menjadikan para petani lebih cenderung melakukan pemeliharaan jaringan irigasi yang berdekatan dengan areal sawah yang dikerjakannya, dengan harapan setelah diperbaikinya/dipeliharanya jaringan irigasi pada jaringan irigasi yang berdekatan dengan areal sawahnya tersebut dapat melancarkan pendistribusian air irigasi ke daerah hilirnya, sehingga dengan demikian seluruh daerah hilir pada Daerah Irigasi Penewon dapat menikmati keberadaan air yang dipergunakan untuk irigasi.

Sedangkan untuk kegiatan gotong royong masih juga dilakukan meskipun pelaksanaannya dilakukan secara berjangka yaitu tiap tiga bulan sekali, atau jika memang ada pekerjaan yang sifatnya mendesak segera diselesaikan serta ringan sifatnya dan memerlukan gotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Disamping itu untuk penarikan iuran pembiayaan pelaksanaan pemeliharaan dengan melibatkan pihak ketiga pada Daerah Irigasi Penewon biasanya dilakukan pada pekerjaan yang biasanya menyita waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut dan apabila pekerjaan tersebut tidak dilakukan akan mengganggu pelaksanaan pengelolaan irigasi.

Kondisi dimana petani-petani anggota HIPPA/Gabungan HIPPA Tirta Agung cenderung untuk menjalankan kewenangan pengelolaan irigasinya secara

mandiri, membawa dampak selain mereka bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan Cabang Dinas Pengairan Brangkal melalui Juru-juru pengairan, para petani anggota Gabungan HIPPA Tirta Agung bisa juga menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto melalui pembina HIPPA Kabupaten Mojokerto. Hal ini sesuai dengan skema organisasi pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Penewon bahwa pelaksana pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Penewon dilakukan Gabungan HIPPA Tirta Agung, sedangkan Cabang Dinas Pengairan Brangkal dan Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto hanya mendukung dan memfasilitasi yang berupa garis konsultatif dan koordinatif, sehingga peran HIPPA/Gabungan HIPPA menjadi terlibat secara penuh dalam pengelolaan irigasi.

Program-program pembangunan pemerintah yang diimplementasikan pada Daerah Irigasi Penewon pada dasarnya selalu diterima dengan baik oleh para petani di Daerah Irigasi ini, hal ini dapat diindikasikan dari adanya sikap dari petani anggota lembaga pengelola irigasi yang bersikap positif terhadap semua pelaksanaan kegiatan program pemerintah dalam pengelolaan irigasi. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Gabungan HIPPA Tirta Agung meskipun mampu mengelola irigasi secara mandiri, namun masih saja memerlukan bimbingan dan pembinaan yang berupa fasilitasi dan stimulasi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Mojokerto yang lebih besar secara terpadu dan menyeluruh.

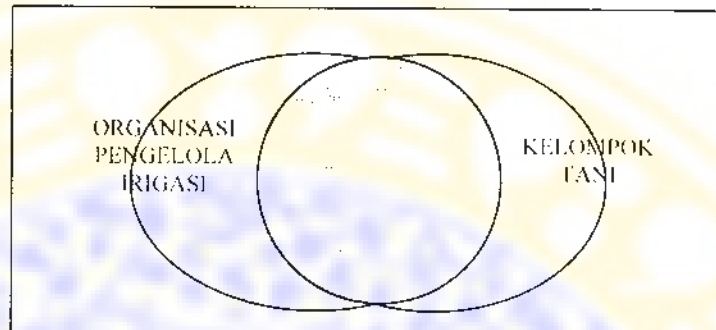
Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dari implementasi partisipasi pada Daerah Irigasi Penewon antara lain adalah:

1. Faktor pendorong antara lain: (1) adanya mekanisme yang dapat dimanfaatkan untuk implementasi partisipasi dalam pengelolaan irigasi, (2). Sikap aktif petani dalam pengelolaan irigasi, (3) organisasi petani pengelola irigasi aktif (4). Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada organisasi petani
2. Faktor penghambat antara lain : (1) tidak adanya akses baku yang dimiliki petani dalam tatanan pemerintahan, (2) sikap individu/pribadi aparat pemerintah terkait pengelolaan irigasi

d. Interelasi (Jaringan)

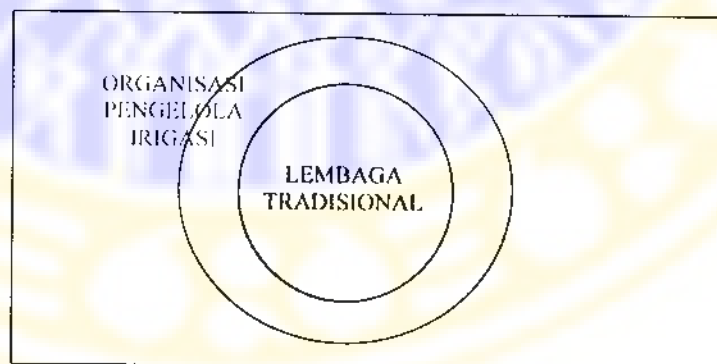
Interelasi petani Daerah Irigasi Penewon dengan lembaga sosial lain yang ada disekitarnya yaitu lembaga tradisional dan Kelompok Tani sebagaimana telah diuraikan pada data lapangan, pada dasarnya hubungan antara petani Daerah Irigasi Penewon dengan kelompok tani dapat dikatakan memiliki hubungan yang sangat erat . hal ini mengingat Gabungan HIPPA dan Kelompok Tani merupakan lembaga yang secara kepengurusan memiliki kepengurusan yang sama meskipun secara organisasi berbeda, dimana hubungan keduanya yang mengarah kepada pola kerjasama dan kemitraan masih belum dilakukan. Kegiatan pengelolaan irigasi dilakukan oleh Gabungan HIPPA Tirta Agung, sedangkan kelompok tani berperan dalam penentuan pola tata tanam sesuai dengan potensi air irigasi yang ada. Adapun hubungan antara Lembaga Pengelola Irigasi dengan Kelompok Tani dapat digambarkan sebagaimana Diagram Venn berikut ini:

Gambar 4.10. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Kelompok Tani di Daerah Irigasi Penewon



Hubungan antara lembaga pengelola irigasi dengan Lembaga Tradisional berdasarkan data di lapangan nampak hubungan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Lembaga Tradisional "Tuwowo" adalah merupakan ujung tombak dari lembaga pengelola irigasi (Gabungan HIPPA Tirta Agung) dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi, dimana "Tuwowo" dimasukan dalam struktur kepengurusan Gabungan HIPPA Tirta Agung yaitu pada Bagian Teknis yang fungsinya sebagai pengatur dan pendistribusi air irigasi ke petak-petak sawah. Hubungan antara lembaga pengelola irigasi dengan lembaga tradisional "Tuwowo" dapat digambar seperti Diagram Venn berikut ini:

Gambar 4.11. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Lembaga Tradisional di Daerah Irigasi Penewon

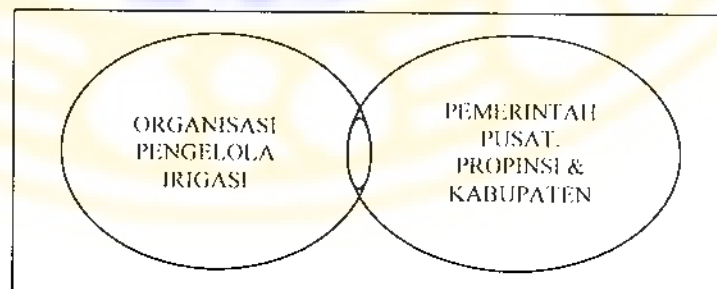




Berdasarkan pada data penelitian di lapangan bahwa Interelasi antara lembaga pengelola irigasi di Daerah Irigasi Penewon dengan pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten memiliki hubungan kemitraan dengan memberikan stimulan atau bantuan dalam rangka pembangunan, peningkatan dan perbaikan serta rehabilitasi jaringan irigasi dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi jaringan irigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Irigasi bahwa berdasarkan luasannya maka pengelolaan Daerah Irigasi Penewon adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, namun demikian meskipun merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, karena pengelolaan Daerah Irigasi Penewon sudah diserahkan kepada Gabungan HIPPA sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Irigasi kepada Gabungan HIPPA Tirta Agung nomor 611/05/416-105/2002, maka kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi Penewon menjadi kewenangan Gabungan HIPPA Tirta Agung, sedangkan Pemerintah Mojokerto hanya sebagai fasilitator serta mengaudit terhadap keberhasilan pengelolaan yang dilakukan Gabungan HIPPA yang mendapat penyerahan.

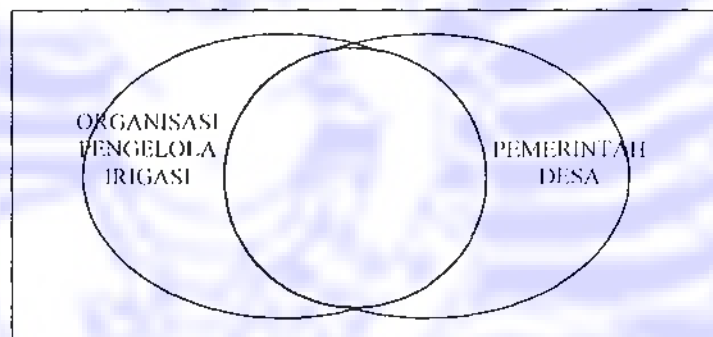
Hubungan antara lembaga pengelola irigasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dapat digambarkan sebagaimana Diagram Venn berikut:

Gambar 4.12. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten di Daerah Irigasi Penewon.



Interelasi antara lembaga pengelola irigasi Daerah Irigasi Penewon dengan Pemerintah Desa mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini karena meskipun “tuwowo” merupakan perangkat desa namun secara kepengurusan mereka juga masuk dalam kepengurusan Gabungan HIPPA yaitu pada bagian teknis, sehingga Pemerintah Desa memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gabungan HIPPA walaupun kedua lembaga tersebut tidak bisa saling berintervensi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Hubungan antara kedua lembaga tersebut dapat digambarkan seperti Diagram Venn berikut ini:

Gambar 4.13. Hubungan Lembaga Pengelola Irigasi dengan Pemerintah Desa di Daerah Irigasi Penewon.



Berdasarkan uraian diatas pengelolaan irigasi secara teknis, kelembagaan dan interelasi (jaringan) pada Daerah Irigasi Penewon secara keseluruhan dapat ringkas seperti pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4.10. Analisa Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Penewon

NO	NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE	ANALISIS
1	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuatan keputusan secara teknis dilakukan oleh Rapat Anggota dengan fasilitasi Dinas Pengairan (Cabang Dinas Brangkal dan jajarannya) dan pembina HIPPA yang lain di Kabupaten Mojokerto</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Gabungan HIPPA Tirto Agung. petani terlibat secara langsung didalamnya. baik dana yang berasal dari iuran wajib anggota, donatur yang tidak mengikat, APBD Kabupaten. APBD Propinsi maupun dana yang berasal dari APBN</li> <li>▪ Perumusan kebijakan pengelolaan irigasi dilakukan pada rapat anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung dengan melibatkan seluruh anggota HIPPA</li> <li>▪ Faktor pendorong: ada mekanisme, pelibatan secara langsung dan organisasi petani aktif.</li> <li>▪ Faktor penghambat: sikap aparat pemerintah dan tidak ada konsistensi pelaksanaan mekanisme dlm tatanan pemerintahan</li> </ul>
2.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi kinerja teknis dilakukan satu bulan sekali pada rapat anggota</li> <li>▪ Mekanisme pertanggungjawaban secara teknis kepada petani dilakukan pada rapat anggota. dimana petani anggota HIPPA ikut menentukan keputusan dan kesepakatan teknis yang ditentukan oleh Gabungan HIPPA Tirto Agung.</li> <li>▪ Mekanisme pertanggungjawaban terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan irigasi kepada pemerintah adalah melalui audit yang dilakukan oleh Pemerintah</li> <li>▪ Pertanggungjawaban keuangan dilakukan setiap bulan sekali dan dilakukan kepada anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung</li> <li>▪ Dana sebagian besar digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan perbaikan ringan jaringan irigasi serta untuk kegiatan operasional Gabungan HIPPA Tirto Agung.</li> <li>▪ Faktor pendorong: ada mekanisme, petani penerima manfaat langsung, AD/ART organisasi HIPPA dan penyerahan kewenangan pengelolaan kepada petani</li> <li>▪ Faktor penghambat: Tidak ada akses dalam pemerintahan dan sikap aparat pemerintah terkait irigasi</li> </ul>
3	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara normatif Gabungan HIPPA sudah terbentuk dengan ketua yang dipilih secara pilihan bersama secara demokratis.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengelolaan irigasi dilakukan oleh Gabungan HIPPA Tirta Agung, yang meliputi kewenangan memberikan pertimbangan atas rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi; menggunakan jaringan irigasi; melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan perbaikan ringan terhadap jaringan irigasi</li> <li>▪ Petani terlibat langsung dalam kegiatan teknis pengelolaan irigasi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inisiatif-inisiatif secara teknis dari petani maupun dari pihak lain, disampaikan dan dibahas dalam rapat anggota, dan hasil keputusan dalam rapat anggota tersebut dijadikan program kerja pengelolaan irigasi baik untuk intern maupun ekstern organisasi.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan petani dalam pengelolaan irigasi adalah dominan dengan dibantu fasilitasi dari juru pengairan, sedangkan tuwowo juga dimasukan dalam kepengurusan Gabungan HIPPA sebagai bagian teknis, yang bertugas mendistribusikan air ke petak-petak sawah.</li> <li>▪ Munculnya kepentingan yang berasal dari luar organisasi, seperti program dari Pemerintah, dibicarakan dalam rapat anggota Gabungan HIPPA untuk menyikapinya.</li> <li>▪ Faktor pendorong: Ada mekanisme, penyerahan kewenangan kpd petani, sikap aktif petani dan organisasi pengelola irigasi oleh petani</li> <li>▪ Faktor penghambat: Tidak ada akses dalam pemerintahan dan sikap aparat pemerintah terkait irigasi</li> </ul>
4	Interelasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interelasi yang erat antara petani dengan Cabang Dinas Pengairan (juru pengairan) dan Tuwowo (Lembaga Tradisional dan juga merupakan salah satu anggota jajaran Pemerintah Desa)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interelasi yang kurang begitu erat terjadi antara petani dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yaitu hanya sebagai obyek pelaksanaan program pengelolaan irigasi.</li> </ul>

#### 4.2.2. Efisiensi Pengelolaan Irigasi

Efisiensi pengelolaan irigasi ditinjau dari segi usaha mencakup lima unsur yaitu mudah pelaksanaannya, ringan bebannya, cepat penangannya, pendek jaraknya dan murah biayanya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan pada kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon dan dikaitkan dengan kelima unsur efisiensi tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut.

##### a. Daerah Irigasi Menturus

Sebagaimana data di lapangan penanganan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Menturus dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg beserta jajarannya, dengan bertumpu kepada Juru-juru Pengairan yang ada di lapangan dan dibantu oleh pekarya dan penjaga pintu air. Petani yang telah membentuk Organisasi HIPPA yaitu HIPPA Tirto Sari hanyalah bersifat normatif belaka dan tidak operasional di lapangan, karena Gabungan HIPPA Tirto Sari ini tidak bisa membawa dan menyuarakan aspirasi dari petani pada wilayah ini, sehingga semua aspirasi petani disampaikan kepada juru-juru dan tuwowo yang setiap harinya ada di lapangan.

Apabila ditinjau dari unsur jarak antara pengelola irigasi dengan wilayah kerja yaitu Daerah Irigasi pada Daerah Irigasi Menturus, maka Juru-juru pengairan yang memiliki luas wilayah kerja antara 300 ha sampai dengan 400 ha, tentunya mempunyai jarak yang relatif agak jauh. Meskipun pekarya-pekarya dan penjaga pintu air ada disepanjang jaringan irigasi, namun dalam pengambilan keputusannya untuk penanganan terhadap suatu masalah tetap melibatkan para juru-juru

pengairan pada wilayah kerja masing-masing. Hal ini tidak menjadi masalah manakala permasalahan timbul pada jaringan irigasi yang berdekatan dengan lokasi juru pengairan berada, namun sebaliknya akan menjadi masalah manakala lokasi yang bermasalah terletak pada lokasi yang berjauhan dengan lokasi juru pengairan berada. Wilayah kerja yang luas tersebut juga berdampak terhadap keselamatan dan kelestarian jaringan, karena dengan jarak yang jauh tidak bisa setiap saat memantau dan mengawasi terhadap keberadaan jaringan irigasi.

Demikian halnya dengan kecepatan penanganan permasalahan, dengan terpusatnya pengelolaan kepada Cabang Dinas Pengairan Gedeg menjadikan jarak dan wilayah kerja pengelolaannya tidak seimbang dengan jumlah personil pelaksana pengelola irigasi. Ketidak seimbangan antara jumlah personil pengelola irigasi dengan luas wilayah yang harus ditangani, berdampak kepada pelaksanaan pengelolaan menjadi berat dan sulit dalam menjalankan fungsinya. Pelaksanaan fungsi yang berat karena setiap pengelola irigasi harus mengawasi dan memelihara fungsi jaringan irigasi yang besar dan luas, sehingga disamping menyita waktu untuk melakukan pengawasan juga juga membutuhkan tenaga yang semakin banyak pula.

Penanganan yang sulit dan tidak ringan, membawa dampak kepada kerusakan jaringan irigasi yang semula ringan menjadi lebih parah. Kondisi ini mengakibatkan pendanaan yang tidak murah untuk mengembalikan kembali fungsi jaringan irigasi yang rusak tersebut, karena yang semestinya kerusakan ringan sudah dibisa diperbaiki dengan biaya yang murah, namun karena sulit dan beratnya pelaksanaan pengelolaan irigasi akibat luasnya wilayah kerja yang harus ditangani mengakibatkan penanganan kerusakan ringan tidak bisa dilakukan dan ini

berdampak kepada kerusakan yang lebih parah, sehingga biaya yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi jaringan irigasi juga semakin besar.

Rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan irigasi yang dilakukan setiap 10 hari sekali oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg, membawa dampak yang positif, karena dengan adanya evaluasi kinerja pengelolaan irigasi tersebut segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan kondisi prasarana dan sarana irigasi dapat segera mendapatkan penanganan, meskipun penanganan tersebut hanya bersifat sementara. Oleh karenanya dengan adanya rapat koordinasi untuk evaluasi ini dapat mempercepat penanganan masalah pengelolaan irigasi, namun demikian pelibatan personil/individu dalam rapat koordinasi Cabang Dinas Pengairan Gedeg tersebut perlu melibatkan peran aktif masyarakat petani yang menerima langsung manfaat dari pengelolaan irigasi, tidak seperti saat ini yang hanya melibatkan petani-petani yang bisa diajak koordinasi saja atau aspirasi-aspirasi yang dititipkan melalui Juru pengairan atau tuwowo.

Berkaitan dengan pendanaan pengelolaan irigasi, dengan penanganan pengelolaan yang dilakukan Cabang Dinas Pengairan Gedeg juga berdampak kepada kemudahan untuk mengalokasikan pendanaan pengelolaan irigasi melalui APBD Kabupaten Mojokerto. Cabang Dinas Pengairan Gedeg adalah merupakan jajaran Dinas Pengairan Kabupaten, sehingga berdampak kepada kemudahan dalam memantau segala usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto lewat APBD Kabupaten Mojokerto. Oleh karenanya dengan pengelolaan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg akan lebih memudahkan dalam memantau segala usulan untuk mendapatkan alokasi anggaran pengelolaan irigasi

pada Daerah Irigasi Menturus terutama APBD Kabupaten, demikian halnya dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan analisa efisiensi pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Menturus dapat ditampilkan sebagaimana tabel 4.11 sebagaimana berikut.

Tabel 4.11. Analisa Efisiensi Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Menturus

No	Data Lapangan	Efisiensi Pengelolaan Irigasi
1	Pelaksana pengelolaan oleh Juru Pengairan dengan luas wilayah kerja antara 300 s/d 400 hektar tiap juru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak pengelola dengan daerah kerja rata-rata besar, karena luasnya wilayah kerja</li> <li>• Kecepatan penanganan masalah membutuhkan waktu banyak, karena butuh waktu untuk mencapai lokasi yang perlu mendapat penanganan</li> <li>• Mempersulit pelaksanaan pengelolaan, karena wilayah yang luas dipikirkan dan ditangani sendiri oleh juru pengairan</li> <li>• Memberatkan pelaksana pengelola irigasi, karena tidak seimbang antara pelaksana pengelolaan dengan luas wilayah kerjanya</li> <li>• Pembiayaan yang tidak murah, karena dengan adanya kesulitan dan beratnya pelaksanaan akan berpotensi kepada kerusakan yang lebih besar.</li> </ul>
2	Rapat Koordinasi yang dilakukan setiap 10 hari sekali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat proses penanganan permasalahan yang ada, terutama prioritas kegiatan pengelolaan</li> <li>• Menghindarkan kerusakan yang lebih parah sehingga biaya perbaikan dapat ditekan</li> </ul>
3	Penanganan dilakukan oleh Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempermudah proses usulan pendanaan dalam penanganan permasalahan yang ada, terutama prioritas kegiatan yang membutuhkan dana yang besar</li> <li>• Lebih memiliki akses terhadap Pem. Propinsi &amp; Pem. Pusat</li> </ul>



#### b. Daerah Irigasi Penewon

Sesuai dengan kondisi lapangan yang ada Daerah irigasi Penewon dikelola secara mandiri oleh Gabungan HIPPA Tirto Agung bersama seluruh anggotanya dimana keputusan tertinggi terletak pada rapat anggota. Peran Pemerintah Daerah yaitu khususnya pembina HIPPA Kabupaten Mojokerto yaitu Bappeda, Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian bertindak sebagai fasilitator dan penunjang dalam pengelolaan irigasi.

Sebagaimana data yang diperoleh di lapangan pada Daerah Irigasi Penewon, pengelolaan irigasinya dilakukan dengan berbagai cara yang terutama adalah dengan melibatkan seluruh anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung. Pelibatan anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung adalah dengan memberikan tanggungjawab pengelolaan terhadap jaringan irigasi yang berdekatan dengan areal sawah yang merupakan wilayah kerja anggota HIPPA tersebut. Pembagian tanggungjawab pengelolaan jaringan irigasi secara rasio perbandingan antara pelaksana pengelola irigasi dengan luas wilayah yang menjadi tanggungjawabnya adalah setiap anggota HIPPA bertanggungjawab terhadap areal irigasi seluas 0,9 hektar.

Berkaitan dengan efisiensi pengelolaan irigasi utamanya yang berkaitan dengan kelima unsur efisiensi, maka pada prinsipnya pengelolaan irigasi dilakukan oleh anggota HIPPA dengan luas wilayah kerja seluas 0,9 hektar. Luasan areal kerja yang relatif kecil ini tentunya berdampak kepada jarak antara pengelola irigasi dengan areal kerja yang menjadi tanggungjawabnya juga semakin kecil. Hal ini bisa dipahami karena keseluruhan jaringan irigasi yang ada sudah terbagi-bagi pengelolaan kepada seluruh anggota HIPPA yang ada, sehingga selain jarak yang

sempit juga berdampak kepada mudah dan ringannya terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.

Jarak yang relatif pendek tersebut juga sekaligus dapat membawa dampak terhadap kecepatan penanganan permasalahan yang bisa saja muncul setiap saat pada jaringan irigasi, karena dengan jarak yang pendek tersebut tidak memerlukan waktu banyak bagi seorang pengelola untuk mencapai daerah yang terkena masalah. Demikian halnya dengan ada kerusakan ringan pada jaringan irigasi, akibat cepatnya penanganan yang dilakukan terhadap kerusakan ringan jaringan irigasi mengakibatkan kerusakan berat pada jaringan irigasi dapat dihindarkan, dan selanjutnya pembiayaan yang memerlukan dana besar untuk perbaikan berat kerusakan jaringan irigasi dapat dihindarkan.

Rapat koordinasi yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap teknis dan finansial organisasi pengelola irigasi dilakukan setiap bulan sekali, juga merupakan mekanisme yang mempercepat penanganan permasalahan-permasalahan mendesak perlu mendapatkan penanganan. Disamping itu juga dengan adanya rapat koordinasi ini mampu meringankan dan memudahkan penanganan masalah karena dipikirkan dan dipecahkan bersama dalam rapat anggota, dengan demikian kerusakan yang lebih parah terhadap jaringan irigasi dapat dihindarkan pula.

Interelasi dengan Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat, memiliki sedikit hubungan, yaitu hanya sebatas kepada hubungan kegiatan pelaksanaan program kegiatan proyek baik proyek perbaikan, operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan. Meskipun Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam pengelolaan irigasi, akses organisasi HIPPA terhadap pemantauan

segala usulan pendanaan pengelolaan irigasi kepada Pemerintah baik Kabupaten, Propinsi maupun Pusat mengalami kesulitan. Hal ini terutama untuk penanganan perbaikan kerusakan berat yang terjadi pada Daerah Irigasi Penewon.

Adapun analisa efisiensi pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi penewon dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12. Analisa Efisiensi Pengelolaan Irigasi Pada Daerah Irigasi Penewon

No	Data Lapangan	Efisiensi Pengelolaan Irigasi
1	Pelaksana pengelolaan oleh Anggota Gabungan HIPPA dengan luas wilayah kerja antara 0,9 s/d 1 hektar tiap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarak pengelola dengan daerah kerja relatif kecil</li> <li>• Kecepatan penanganan masalah, karena pendeknya jarak untuk mencapai lokasi yang perlu mendapat penanganan</li> <li>• Mempermudah pelaksanaan pengelolaan, karena wilayah kerja yang sudah dibagi-bagi pengelolaannya kepada anggota HIPPA</li> <li>• Meringankan pelaksana pengelola irigasi, karena wilayah kerja yang sudah dibagi-bagi pengelolaannya kepada anggota HIPPA</li> <li>• Pembiayaan yang relatif murah, karena kerusakan berat jaringan irigasi dapat dihindarkan.</li> </ul>
2	Rapat Koordinasi yang dilakukan setiap 1 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat proses penanganan permasalahan yang ada, terutama prioritas kegiatan pengelolaan</li> <li>• Menghindarkan kerusakan yang lebih parah sehingga biaya perbaikan rusak berat dapat ditekan</li> </ul>
3	Penanganan dilakukan oleh Gabungan HIPPA Tirta Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersulit pemantauan proses usulan pendanaan dalam penanganan permasalahan yang ada kepada pemerintah, terutama prioritas kegiatan yang membutuhkan dana yang besar</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meskipun memiliki akses terhadap Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, namun kenyataan dilapangan tergantung kepada personal yang duduk dalam pemerintahan</li> </ul>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4.2.3. Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Irigasi Ke depan

Respon masyarakat terhadap pengelolaan irigasi ke depan berdasarkan penerapan nilai-nilai *Good Governance* dan analisa efisiensi pengelolaan irigasi dapat di uraikan sebagaimana berikut:

##### a. Daerah Irigasi Menturus

Penerapan nilai-nilai *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada Daerah Irigasi Menturus pada dasarnya sudah dilakukan hal ini terlihat pada pelaksanaan evaluasi pengelolaan irigasi yang dilakukan setiap 10 hari sekali dengan melibatkan semua yang terlibat dalam pengelolaan irigasi sebagai upaya pelaksanaan transparansi, namun demikian implementasinya pelibatan petani dalam evaluasi tersebut masih ditentukan kepada petani-petani yang mudah diajak koordinasi. Hal ini menunjukkan implementasi transparansi masih belum dilakukan secara penuh, meskipun aspirasi petani masih bisa diwakilkan melalui tuwowo maupun juru-juru pengairan yang sering terjun ke lapangan secara langsung. Demikian halnya dengan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan irigasi petani, selaku pemanfaat langsung dari pengelolaan irigasi masih belum dilibatkan, dan masih didominasi oleh jajaran Cabang Dinas Pengairan Gedeg selaku pengelola irigasi di Daerah Irigasi Menturus, petani hanya menerima hasil keputusan yang ditetapkan oleh pengelola irigasi tersebut. Oleh

karenanya seringkali informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan irigasi tidak diketahui secara transparan oleh petani. Ke depan pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus perlu adanya melibatkan masyarakat petani dalam semua proses penyusunan kebijakan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis irigasi, sehingga dengan keterlibatan tersebut transparansi pengelolaan irigasi dengan sendirinya akan terwujud.

Implementasi akuntabilitas pada prinsipnya juga sudah dilakukan, dimana pertanggungjawaban kinerja teknis dan keuangan dari pelaksanaan pengelolaan irigasi dilakukan kepada Pemerintah, sedangkan kepada petani sebagai penerima manfaat dari pengelolaan irigasi belum dilakukan. Pertanggungjawaban kepada petani hanya sebatas kepada pertanggungjawaban teknis atau kinerja irigasi dengan meminta masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan irigasi yang dilewatkan juru dan tuwowo. Ke depan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Menturus diperlukan adanya mekanisme pertanggungjawaban kepada petani selaku penerima manfaat irigasi baik secara teknis maupun keuangan dalam pengelolaan irigasi.

Partisipasi dalam pengelolaan irigasi tidak sepenuhnya dilakukan, hal ini disamping dikarenakan tidak diberinya kesempatan secara langsung kepada petani untuk ikut dalam setiap proses pengelolaan irigasi bukan melalui perwakilan atau menitipkan aspirasinya lewat Juru pengairan dan tuwowo, juga karena sikap apatis dan tidak mau ikut campur dari petani dalam pengelolaan irigasi, termasuk adanya budaya "nrimo" dari petani terhadap semua keputusan yang diambil oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg selaku pengelola irigasi. Ke depan perlu adanya melibatkan secara langsung dari petani dalam semua tahap pengelolaan irigasi.

Interelasi organisasi pengelola irigasi dengan organisasi lain sudah terjalin dengan baik yaitu dengan lembaga tradisional dan Pemerintah Kabupaten, sedangkan hubungannya dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat kurang begitu kuat serta dengan lembaga swasta masih belum dilakukan. Sebagai upaya penerapan nilai-nilai *Good Governance* maka ketiga pilar *Good Governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat perlu saling mendukung, oleh karenanya ke depan lembaga swasta perlu dilibatkan dalam pengelolaan irigasi.

Berkaitan dengan efisiensi pengelolaan irigasi, sesuai dengan analisa data di lapangan masih menunjukkan kurang efisiensinya dalam pengelolaan irigasi. Perbandingan jumlah personil penanggungjawab pengelola irigasi dengan luasnya wilayah kerja tidak seimbang, dimana wilayah kerja penanggungjawab terlalu luas dan ditunjang dengan tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat petaninya. Oleh karenanya untuk mencapai kalima unsur efisiensi dalam pengelolaan irigasi diperlukan adanya peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan irigasi yang disertai dengan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi baik secara teknis maupun keuangan.

Secara umum pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Menturus ke depan sebagaimana tabel 4.13. berikut

Tabel 4.13. Pengelolaan Irigasi Kedepan Daerah Irigasi Menturus

No	Kondisi Saat	Kedepan
1	Transparansi, belum diketahuinya oleh petani baik dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan teknis irigasi	Perlu pelibatan dalam proses penyusunan kebijakan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis irigasi
2	Akuntabilitas, belum dilakukan kepada petani selaku penerima manfaat dan hanya	Perlu mekanisme pertanggungjawaban

	dilakukan kepada pemerintah	kepada petani selaku penerima manfaat irigasi
3	Partisipasi, tidak ada pelibatan dari petani dan ada kecenderungan sikap apatis dari petani terhadap pengelolaan irigasi	Perlu adanya pelibatan petani dalam semua tahap pengelolaan irigasi
4	Interelasi, Hubungan sudah dilakukan dengan lembaga tradisional, dan pemerintah, sedangkan dengan lembaga swasta belum dilakukan	Perlu pelibatan peran swasta dalam pengelolaan irigasi
5	Efisiensi, belum sepenuhnya optimal	Perlu adanya pembagian tugas dan kewajiban dalam pengelolaan irigasi

#### b. Daerah Irigasi Penewon

Penerapan nilai-nilai *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada Daerah Irigasi Penewon pada dasarnya juga sudah dilakukan. hal ini terlihat pada pelaksanaan evaluasi pengelolaan irigasi baik secara teknis maupun keuangan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan irigasi sebagai upaya pelaksanaan transparansi. Transparansi dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat petani dalam semua proses pengelolaan irigasi baik teknis maupun finansial. Pelibatan seluruh anggota HIPPA dalam semua proses baik penyusunan kebijakan pengelolaan irigasi, pelaksanaan teknis pengelolaan dan penggunaan keuangan dalam pengelolaan irigasi, berarti semua anggota organisasi HIPPA dapat mengetahui secara pasti segala kebijakan baik dalam pelaksanaan teknis maupun keuangan dalam pengelolaan irigasi.

Implementasi akuntabilitas pada prinsipnya juga sudah dilakukan, dimana pertanggungjawaban kinerja teknis dan keuangan dari pelaksanaan pengelolaan irigasi dilakukan baik kepada petani selaku pemanfaat irigasi maupun kepada

Pemerintah yang telah memberikan kewenangan pengelolaannya kepada organisasi petani. Pertanggungjawaban kepada petani dilakukan sebagai penerima manfaat irigasi dan sebagai anggota dalam organisasi pengelola irigasi. Pertanggungjawaban kepada pemerintah hanya sebatas kepada pertanggungjawaban teknis atau kinerja irigasi, sedangkan pertanggungjawaban keuangan dilakukan sebagai pemenuhan syarat pertanggungjawaban sesuai prosedur pemerintah yang mengeluarkan dana kepada petani melalui organisasi HIPPAnya. Oleh karenanya ke depan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Penewon diperlukan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang baku kepada pemerintah baik secara teknis maupun keuangan dalam pengelolaan irigasi.

Partisipasi dalam pengelolaan irigasi sudah dilakukan, hal ini karena telah diberinya kesempatan secara langsung kepada petani untuk ikut dalam setiap proses pengelolaan irigasi melalui penyampaian aspirasinya lewat rapat anggota yang dilakukan setiap satu bulan sekali, dan bahkan anggota organisasi HIPPA diberi tanggungjawab untuk memelihara fungsi jaringan irigasi yang berdekatan dengan areal kerjanya. Ke depan perlu adanya pelibatan dari pemerintah untuk lebih meningkatkan peran serta dengan memberikan kesempatan dalam semua tahap pengelolaan irigasi, utamanya untuk penanganan kegiatan prioritas pengelolaan irigasi.

Interelasi organisasi pengelola irigasi dengan organisasi lain sudah terjalin dengan baik yaitu dengan lembaga tradisional dan Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat sedangkan hubungannya dengan lembaga swasta masih belum dilakukan. Sebagai upaya penerapan nilai-nilai *Good Governance* maka ketiga pilar *Good Governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat



perlu saling mendukung, oleh karenanya kedepan lembaga swasta perlu dilibatkan dalam pengelolaan irigasi.

Berkaitan dengan efisiensi pengelolaan irigasi, sesuai dengan analisa data di lapangan menunjukkan adanya efisiensi yang relatif baik dalam pengelolaan irigasi. Perbandingan jumlah personil penanggungjawab pengelola irigasi dengan luasnya wilayah kerja yang relatif seimbang, dimana wilayah kerja penanggungjawab tidak terlalu luas akibat adanya partisipasi aktif dari masyarakat petaninya yaitu anggota HIPPA Tirta Agung. Oleh karenanya untuk mencapai kalima unsur efisiensi dalam pengelolaan irigasi diperlukan adanya kemauan pemerintah untuk memberikan akses kepada petani(organisasi HIPPA) untuk ikut serta dalam semua tahap pengambilan kebijakan pengelolaan irigasi baik secara teknis maupun keuangan dalam bidang pemerintahan.

Secara umum pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Penewon ke depan sebagaimana tabel 4.14. berikut

Tabel 4.14. Pengelolaan Irigasi ke depan Daerah Irigasi Penewon

No	Kondisi Saat	Kedepan
1	Transparansi, sudah diketahuinya oleh petani baik dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan teknis irigasi melalui rapat anggota	Perlu pelibatan petani dalam proses penyusunan kebijakan, pengelolaan irigasi dalam tatanan pemerintah
2	Akuntabilitas, sudah dilakukan baik kepada petani selaku penerima manfaat dan kepada pemerintah selaku pemberi kewenangan untuk mengelola irigasi	Perlu mekanisme pertanggungjawaban yang baku kepada pemerintah
3	Partisipasi, sudah ada pelibatan dari petani dan sikap positif dan aktif dari petani terhadap pengelolaan irigasi	Perlu pelibatan dari pemerintah untuk lebih meningkatkan peran serta petani dengan memberikan kesempatan dalam semua tahap pengelolaan irigasi

4	Interelasi, Hubungan sudah dilakukan dengan lembaga tradisional, dan pemerintah, sedangkan dengan lembaga swasta belum dilakukan	Perlu pelibatan peran swasta dalam pengelolaan irigasi
5	Efisiensi, relatif sudah baik	Pemerintah perlu memberikan akses kepada petani (organisasi HIPPA) untuk ikut serta dalam semua tahap pengambilan kebijakan pengelolaan irigasi dalam tatanan pemerintahan

## BAB 5

### PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan irigasi khususnya mengenai penerapan nilai-nilai *good governance* yaitu nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi, bagaimana efisiensinya terkait dengan penerapan nilai-nilai tersebut dan selanjutnya bagaimana sebaiknya pengelolaan irigasi ke depan sesuai respon dari masyarakat. Pembahasan yang dilakukan adalah melalui penalaran hasil penelitian secara teoritis dan secara empiris, sehingga dapat menjawab dengan jelas rumusan permasalahan sebagaimana pada uraian diatas.

#### 5.1. Penerapan Nilai-Nilai Good Governance

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan tersebut dapat dikatakan bahwa pada Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon telah sama-sama menerapkan prinsip nilai-nilai *Good Governance* khususnya nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan nilai-nilai partisipasi, meskipun cara yang mereka implementasikan terhadap nilai-nilai tersebut dengan cara dan kadar yang berbeda, yang pasti mereka (pengelola irigasi) mempunyai alasan yang kuat kenapa mereka mengimplementasikan dengan cara masing- masing dan ini juga merupakan salah satu wujud dari implementasi nilai-nilai *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi.

##### a. Transparansi

Menurut Hupert dan Walker (Pusposutardjo, 1995), dinyatakan bahwa salah satu ciri sistem irigasi adalah bersifat terbuka dan berwawasan pencapaian

tujuan yang ditentukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Berdasarkan pendapat Hupert dan Walker dapat diinterpretasikan bahwa pengelolaan irigasi di kedua Daerah Irigasi tersebut pada dasarnya sudah menerapkan keterbukaan, dimana masing-masing daerah irigasi telah memberikan kesempatan kepada petani untuk ikut serta dalam evaluasi dan penetapan program pengelolaan irigasi yaitu setiap satu bulan sekali untuk Daerah Irigasi Penewon dan setiap 10 hari sekali untuk Daerah Irigasi Menturus, meskipun pada Daerah Irigasi Menturus hanya melibatkan sebagian kecil atau beberapa petani saja. Berdasarkan hasil analisa data dilapangan menunjukkan bahwa pada dasarnya pada kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus dan Penewon sudah melakukan transparansi dalam pengelolaan irigasi, hal ini disamping sudah sesuai dengan pendapat Hupert dan Walker, juga telah sesuai dengan pendapat Bintoro (2001) yang menyatakan bahwa Transparansi (*Transparancy*) adalah dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.

Disamping itu pelaksanaan pengelolaan irigasi yang dilakukan pada kedua Daerah Irigasi juga menganut keterbukaan dalam pengelolaannya, hal ini sesuai dengan ciri dari sistem irigasi menurut pendapat Hupert dan walker dan sesuai dengan pendapat Bintoro Tjokroamidjojo(2001) yang dinyatakan bahwa:

“Keterbukaan (*openess*) adalah pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk *open free suggestion*, dan terbuka terhadap kritik yang dilihat merupakan sebagai partisipasi untuk perbaikan. Keterbukaan bisa meliputi bidang politik (proses politik), ekonomi(kebijakan dan transaksi-transaksi ekonomi), dan pemerintahan (perumusan kebijakan dan pengangkatan dalam jabatan)”

Pelaksanaan mekanisme pertemuan rutin untuk evaluasi dan koordinasi yang dilakukan pada Daerah Irigasi sudah menunjukkan adanya wujud dari implementasi nilai *good governance* yaitu transparansi dan keterbukaan terhadap pembuatan kebijakan baik secara teknis maupun finansial, meskipun pada kedua Daerah Irigasi menunjukkan adanya kadar transparansi yang berbeda dalam pelaksanaan transparansinya.

Adanya transparansi sebagaimana dikemukakan Bintoro adalah dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai kebijaksanaan yang diputuskan, maka dengan adanya transparansi dalam kebijakan pengelolaan irigasi sebagai penyedia, maka ini akan memudahkan sinkronisasi antara kebutuhan air irigasi untuk usaha pertanian dengan kapasitas air irigasi yang tersedia. Sebagaimana dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Menturus yang dalam rapat koordinasi teknis, semua petani tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung namun hanya diwakili oleh beberapa petani dan hanya memperhatikan masukan dari juru yang membawa aspirasi petani yang berada di lapangan, mengakibatkan terdapatnya areal sawah yang tidak memperoleh air irigasi yang cukup dan mengakibatkan gagal panen atau hasil pertaniannya yang tidak optimal. Kondisi ini bisa jadi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan irigasi secara teknis. Berbeda dengan Daerah Irigasi Penewon yang mengalami hal sebaliknya, dimana dahulu sebelum dikelola oleh petani dengan Organisasi HIPPA nya masih terdapat areal yang mengalami gagal panen, tapi setelah dikelola sendiri oleh petani melalui Organisasi HIPPA Tirto Agung dimana semua petani anggota HIPPA memiliki suara yang sama dalam menyampaikan aspirasi, berdampak kepada tidak adanya areal sawah yang mengalami gadu atau

gagal panen akibat kekurangan atau bahkan tidak mendapatkan alokasi air irigasi. Dari contoh yang ada di lapangan yaitu pada Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon nampak bahwa transparansi dalam pengelolaan irigasi sangat diperlukan utamanya untuk menentukan langkah dan program kerja ke depan dari petani pada Daerah Irigasi tersebut.

b. Akuntabilitas

Berdasarkan analisa data dalam pengelolaan irigasi pada kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon terdapat perbedaan yang sangat mencolok, dimana pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Menturus yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg tidak melibatkan peran serta aktif dari masyarakat petani yang mendapat pelayanan irigasi dari Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Pengelolaan pada Daerah Irigasi Menturus mempunyai mekanisme pertanggungjawaban baik secara teknis maupun finansial yang dilakukan kepada pemerintah, sedangkan mekanisme pertanggungjawabannya kepada petani hanya dilakukan secara teknis saja melalui pertemuan evaluasi yang secara rutin dilakukan setiap 10 hari sekali meskipun secara tidak langsung petani dilibatkan yaitu melalui aspirasi yang disuarakan melalui juru pengairan atau dari perwakilan petani yang diajak koordinasi oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Dalam penyusunan program pengelolaan irigasi petani juga tidak dilibatkan secara langsung, namun dilakukan sendiri oleh Cabang Dinas Pengairan gedeg dan petani hanya dimintai masukan dan menerima hasil ketetapan yang dibuat oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg.

Berbeda dengan pengelolaan irigasi yang dilakukan pada Daerah irigasi Penewon, dimana pengelolaannya dilakukan oleh organisasi HIPPA yang dibentuk sendiri oleh petani dan bertanggungjawab secara teknis dan finansial kepada anggota organisasi melalui rapat anggota yang dilakukan rutin setiap bulan sekali. Disamping itu bertanggungjawab kepada pemerintah mengenai kinerja pengelolaannya setiap tahun sekali melalui audit yang dilakukan pemerintah. Demikian halnya dengan penyusunan program kerja dan kegiatan organisasi dilakukan dalam rapat anggota setiap bulan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi HIPPA.

Selain itu dengan mekanisme pertemuan rutin itu juga sekaligus merupakan wujud adanya suatu mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan peran serta aktif masyarakat petani (partisipasi). Hal ini sesuai dengan pendapat Bintoro (2001) yang dinyatakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) adalah tanggung gugat dari kepengurusan/penyelenggaraan, dari *governance* yang dilakukan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban..

Berdasarkan pendapat Bintoro (2001) sebagaimana diatas dapat diinterpretasikan bahwa, pada kedua Daerah Irigasi juga telah melakukan nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas. Bedanya dari kedua Daerah Irigasi adalah pada Daerah Irigasi Menturus akuntabilitas dilakukan lebih cenderung kepada Pemerintah, karena pemerintah memang lebih berhak untuk meminta pertanggungjawaban baik kinerja maupun finansial yang digunakan. Sedangkan

pada Daerah Irigasi Penewon akuntabilitas yang dilakukan lebih cenderung diarahkan kepada anggota organisasi/Gabungan HIPPA Tirto Agung, hal ini karena keputusan anggotalah yang merupakan keputusan tertinggi dalam organisasi sehingga akuntabilitas kepada anggota lebih diutamakan. Pada Daerah Irigasi Penewon juga melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah selaku penganan penyerahan pengelolaan irigasi yang diberikan pengelolaannya kepada gabungan HIPPA Tirto Agung, sehingga akuntabilitas secara kinerja juga dilakukan kepada pemerintah disamping kepada anggota.

Nilai-nilai akuntabilitas dalam pengelolaan irigasi diperlukan untuk menjaga agar pengelolaan irigasi yang dilakukan tetap berada koridor atau batasan-batasan yang diharapkan para pemanfaatnya, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan irigasi baik secara teknis maupun finansial dapat dihindarkan. Hal ini juga diungkapkan dalam wawancara dengan salah satu anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung (Syamsul Anam) bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seorang ketua gabungan HIPPA kepada anggota dalam rapat anggota, yang dilakukan setiap bulan sekali salah satunya adalah untuk menjaga agar arah dan tujuan pengelolaan irigasi tidak disalahgunakan hanya untuk memenuhi kepentingan sekelompok orang/golongan saja. Apabila mengacu kepada pendapat Bintoro bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, maka akuntabilitas adalah hal yang penting untuk dilakukan dalam pengelolaan irigasi agar tidak menyimpang terhadap keinginan pihak yang memiliki hak atau yang berwenang



meminta pertanggungjawaban. Sebagai contoh yang dilakukan oleh kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda dimana pada Daerah Irigasi Menturus lebih cenderung untuk melakukan tindakan akuntabilitas kepada pemerintah melalui Cabang Dinas Pengairan Gedeg daripada kepada para petani sebagai pengguna air irigasi, hal ini dikarenakan pemerintah lebih memiliki hak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengelola irigasi di Daerah Irigasi Menturus, sebab pengelola irigasi pada Daerah Irigasi Menturus masih merupakan jajaran di Pemerintah Kabupaten Mojokerto dibawah Dinas Pengairan Kabupaten. Oleh karenanya mekanisme akuntabilitasnya lebih cenderung kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto, sedangkan petani selaku pengguna air irigasi hanya dimintai masukan dan pertimbangan untuk perbaikan kinerja pengelolaan irigasi secara teknis dilapangan. Berbeda dengan mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Organisasi Gabungan HIPPA Tirto Agung pada Daerah Irigasi Penewon, dimana pengelolaan irigasinya dilakukan oleh petani itu sendiri melalui organisasi HIPPA. Sehingga mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan juga lebih cenderung diarahkan kepada anggota organisasi tersebut yang tidak lain adalah para petani. Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan irigasi agar pelaksanaan pengelolaan irigasi yang dilakukan pengelola irigasi baik itu pemerintah maupun organisasi HIPPA tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berhak untuk meminta pertanggungjawaban, kalau seperti pada contoh adalah pemerintah dan Anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung.



### c. Partisipasi

Menurut pendapat Bintoro (2001) bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Berdasarkan pendapat Bintoro (2001) tersebut dapat dikatakan bahwa pada kedua Daerah Irigasi tersebut juga telah melakukan nilai partisipasi. Hal ini karena pada kedua Daerah Irigasi telah melibatkan peran serta aktif petani di kedua wilayah itu untuk ikut melakukan pengelolaan irigasi, dengan memberikan masukan dan pertimbangan dalam rapat rutin yang diadakan pada masing-masing kedua Daerah Irigasi tersebut. Bedanya pada Daerah Irigasi menturus melalui perwakilan petani yang diajak berkoordinasi atau diaspirasikan suaranya mereka melalui juru-juru pengairan, sedangkan pada Daerah Irigasi Penewon para petani menyuarakan aspirasi mereka secara langsung dalam rapat anggota yang diadakan rutin oleh organisasi pengelola irigasi. Meskipun keduanya melakukan partisipasi yang berbeda, namun keduanya menurut pendapat Bintoro masih dapat dikatakan telah melakukan partisipasi dalam pengelolaan irigasi, karena menurut pendapat Bintoro partisipasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan (institusi yang mewakili kepentingannya).

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff (1997), bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program serta keterlibatan dalam proses evaluasi programnya. Hal yang sama juga disampaikan pendapatnya oleh Oakly (1991) tersebut nampak bahwa partisipasi lebih menekankan kepada seberapa jauh keterlibatan atau kontribusi masyarakat dalam suatu aktifitas pembangunan, kontribusi yang menyangkut finansial, perlakuan manajemen dan tenaga.

Demikian pula dengan tangga partisipasi “Sherry Arnstein” yang berarti bahwa apabila ada manipulasi yang dilakukan pada organisasi berarti partisipasi tersebut pada dasarnya tidak ada, sebaliknya apabila terdapat pengawasan yang dilakukan oleh warga/masyarakat/anggota organisasi berarti kekuasaan pada dasarnya berada pada warganya dan partisipasi itu betul-betul ada. Berdasarkan pendapat tersebut diatas nampak bahwa penekanan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program sampai dengan evaluasinya merupakan hal penting dalam partisipasi, tanpa melihat bagaimana cara mereka menyampaikan aspirasi mereka dalam penyusunan kebijakan yaitu bisa dilakukan secara langsung seperti pada Daerah Irigasi Penewon dan bisa juga dilakukan secara perwakilan melalui instistusi yang mewakili kepentingan mereka seperti yang dilakukan pada Daerah Irigasi Menturus. tapi yang jelas kedua Daerah Irigasi telah melakukan nilai partisipasi dalam pengelolaan irigasinya.

Partisipasi dalam pengelolaan irigasi dikaitkan efisiensi pengelolaan irigasi tentu akan ada pengaruhnya, apalagi apabila hal ini disesuaikan dengan pendapat dari beberapa ahli yang pada intinya partisipasi adalah merupakan wujud peran serta masyarakat petani baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam segala proses pembangunan/pengelolaan irigasi, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan atau monitoringnya. Berdasarkan data di lapangan pada kedua Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon, partisipasi yang dilakukan juga mempunyai perbedaan, dimana pada Daerah Irigasi Menturus partisipasi dilakukan secara tidak langsung namun melalui perwakilan baik melalui petani yang bisa diajak koordinasi maupun melalui juru pengairan yang setiap harinya bertemu dengan petani dilapangan, sedangkan partisipasi yang dilakukan pada

Daerah Irigasi Penewon adalah merupakan partisipasi secara langsung, dimana semua petani anggota organisasi pengelola irigasi dapat menyampaikan aspirasi mereka pada rapat anggota yang secara rutin dilakukan setiap bulan sekali. Dampak dari partisipasi dalam pengelolaan irigasi yang dilakukan secara langsung oleh para petani, disamping diperolehnya informasi-informasi yang bermanfaat bagi petani untuk program ke depan, juga dengan adanya partisipasi dari petani akan berdampak pada efisiensi, seperti partisipasi dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan di Daerah Irigasi Penewon yang rutin dilakukan secara individu bagi jaringan yang dekat dengan areal sawahnya, disamping dapat melakukan efisiensi biaya karena kerusakan yang lebih besar dapat dihindari, juga diperoleh efisiensi yang berhubungan dengan jarak yang dekat dengan pengelola, meringankan beban bagian teknis operasional organisasi, dan akan lebih cepat penanganan masalahnya, disamping itu dengan partisipasi ini petani merasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang dikelolanya dan ini berdampak kepada kelestarian fungsi jaringan irigasi kedepannya. Hal ini berbeda dengan partisipasi yang dilakukan pada Daerah Irigasi Menturus dimana karena pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, maka rasa memiliki dari petani terhadap jaringan irigasi menjadi tidak ada. Oleh karenanya kerusakan yang lebih besar akan lebih memungkinkan terjadi dan tidak dapat dihindari, disamping itu apabila juru pengairan tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi petani untuk melakukan kegiatan gotong royong pemeliharaan jaringan irigasi, maka segala kegiatan akan memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaannya.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, nampak bahwa partisipasi dalam pengelolaan irigasi sangatlah diperlukan demi terciptanya keberlanjutan dan

kelestarian fungsi jaringan irigasi pada suatu Daerah Irigasi, disamping untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan irigasi baik efisiensi biaya, jarak yang dekat, mudah dilaksanakan, ringan pelaksanaannya dan cepat penanganan permasalahannya

## 5.2. Efisiensi Pengelolaan Irigasi

Efisiensi pengelolaan irigasi dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai *Good Governance* khususnya nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon sebagaimana dengan efisiensi menurut Frank B. Gilbert dan Lilian M. Gilbert (The Liang Gie, 1979) bahwa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memerlukan gerak gerak yang paling efisien, karena dengan demikian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memerlukan waktu yang lebih singkat.

Berdasarkan data di lapangan pada kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon memiliki perbedaan dimana pada Daerah Irigasi Menturus petaninya lebih cenderung apatis dalam kegiatan teknis dilapangan, disamping itu dalam kelembagaan petaninya juga kurang mendapat sambutan yang baik oleh petaninya sehingga yang ada hanyalah organisasi saja sedangkan kegiatannya tidak ada sama sekali, sehingga pengelolaan irigasi pelaksanaannya dipasrahkan kepada Cabang Dinas Pengairan Gedeg dan mengikuti apapun yang diputuskan dan ditetapkan oleh lembaga tersebut. Meskipun Daerah Irigasi menturus sudah dikelola dengan baik oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg, namun akibat ketidak tahuan atau karena ketidak patuhan terhadap Cabang Dinas Pengairan Gedeg sampai dengan saat ini masih terdapat areal sawah yang

mendapat alokasi air tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman akibat pola tata tanam yang tidak sesuai dengan kapasitas air irigasi yang didistribusikan.

Berbeda dengan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Penewon yang semuanya dilakukan sendiri oleh petani melalui Organisasi HIPPA Tirta Agung termasuk dalam kegiatan teknis di lapangan. Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh petani sendiri melalui Organisasi HIPPA, petani merasakan manfaatnya terutama adalah munculnya perasaan senasib sepenangungan yang berdampak kepada berkurangnya pencurian air di saluran-saluran irigasi yang biasanya dilakukan pada daerah hulu saluran, dan selanjutnya mengakibatkan pada tidak adanya areal sawah yang mengalami "Gadu" atau gagal panen akibat tidak adanya air irigasi. Hal ini bisa terjadi karena partisipasi petani petani yang selalu diajak koordinasi pada Gabungan HIPPA dalam rapat-rapat rutin.

Berkaitan dengan efisiensi dalam pekerjaan Liang Gie (1979) berpendapat bahwa efisiensi dapat dilihat dalam dua segi yaitu:

- (1) Segi hasil, dimana suatu pekerjaan dapat disebut efisien apabila usaha yang telah dilakukan memberikan hasil yang maksimal baik dalam jumlah maupun mutu dari hasil tersebut.
- (2) Segi usaha, dimana suatu pekerjaan dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil tertentu dapat dicapai dengan usaha yang minimal yang dikaitkan dengan pikiran, tenaga, waktu, ruang dan benda (uang). Oleh karenanya efisiensi mencakup 5 unsur yaitu termudah, teringan, tercepat, terpendek jaraknya dan termurah.

Apabila dikaitkan antara data di lapangan dengan pendapat Liang Gie tersebut dapat diuraikan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah pada

Daerah Irigasi Menturus kurang sesuai dengan pendapat ini, antara lain adalah pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh juru dengan luas wilayah antara 300 sampai dengan 400 ha akan menjadi tidak efisien karena jarak yang diperlukan untuk pengelolaannya menjadi tidak pendek, selain itu dalam hal keringanan pemikiran dalam pengelolaan yang begitu luas menjadi tidak tercapai, berbeda apabila dalam luasan tersebut dibagi-bagi pemikiran dalam pemecahan masalahnya kepada bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga disamping ringan juga mendapatkan kemudahan dalam penanganannya, meskipun secara sumberdaya manusia Juru-juru tersebut lebih memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola jaringan irigasi. Dalam hal pembiayaan akan berdampak kepada pembiayaan yang tinggi dan tidak murah, karena petani di seluruh Daerah Irigasi tidak mempunyai rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang ada sehingga kalau ada kerusakan yang sifatnya ringan tidak segera mendapat penanganan, dan kerusakan-kerusakan ringan ini tidak mungkin akan dilakukan seluruhnya oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg, sehingga apabila tidak segera ditangani akan menjadikan kerusakan yang lebih parah dan berakibat pada pembiayaan yang lebih besar untuk mengembalikan fungsinya.

Berbeda halnya dengan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Penewon yang dilakukan oleh petani melalui organisasi lembaga pengelola irigasi yaitu Gabungan HIPPA Tirta Agung, dimana organisasi ini memiliki anggota pada seluruh petani yang ada di wilayah irigasi Penewon. Sebagaimana telah diuraikan dalam analisa pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Penewon utamanya pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya dan yang paling sering dilakukan adalah pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan

oleh masing-masing individu pada areal yang berdekatan dengan areal sawah yang dikerjakan oleh masing-masing petani anggota HIPPA tersebut. Sehingga dengan demikian kondisi jaringan irigasi tetap terjaga fungsinya, dan bila dikaitkan dengan efisiensi sebagaimana yang dikemukakan oleh The Liang Gie yang menyangkut lima unsur dapat terpenuhi, sebagai contoh dalam kemudahan pelaksanaan pekerjaan akan lebih gampang karena pelaksanaan pekerjaannya dilakukan dan dipikirkan secara bersama-sama anggota gabungan HIPPA tersebut, demikian juga halnya dengan keringan pekerjaannya akan muncul karena pelaksanaan pekerjaannya sudah dibagi-bagikan kepada petani, selanjutnya berkaitan dengan jarak dari pekerjaan yang menangani pekerjaan tersebut juga pasti lebih pendek, sehingga kalau ada permasalahan akan lebih cepat tertangani dan kondisi ini selanjutnya akan berdampak kepada kerusakan yang lebih besar akibat tidak tertangani kerusakan yang ringan-ringan dapat dihindarkan. Berkaitan dengan pembiayaan juga menjadi lebih ringan baik yang disebabkan oleh kerusakan yang lebih besar dapat dihindari juga disebabkan oleh adanya sharing dengan sumber dana yang lain tidak semata-mata pembiayaan yang berasal dari pemerintah. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ketua Gabungan HIPPA Tirta Agung pada Daerah Irigasi Penewon (Imam Basuki) sesuai hasil wawancara yang menyatakan bahwa dengan diserahkan pengelolaan irigasi kepada petani (adanya partisipasi) telah menjadikan Daerah Irigasi ini tidak pernah mengalami kekurangan air irigasi. Hal ini bisa terjadi karena adanya efisiensi pemakaian air irigasi sebagai dampak tidak adanya pencurian air irigasi maupun sesuaianya pola tanam dengan kapasitas air irigasi.



### 5.3. Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Irigasi ke depan

Dengan berkembang era globalisasi mengakibatkan tuntutan akan pelayanan irigasi yang mampu mendukung penganekaragaman pangan sesuai dengan tuntutan niaga (Pusposutadjo,1995), oleh karenanya penerapan nilai-nilai *good governance* dalam pengelolaan irigasi menjadi sangat diperlukan. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan publik yang dikemukakan oleh Islamy (1984) yang mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Penerapan nilai-nilai *Good Governance* terutama nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi membawa manfaat yang besar dalam implementasi pengelolaan irigasi, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pusposutardjo (1995), bahwa keselarasan pembangunan irigasi dengan transformasi pertanian salah satunya dilakukan dengan berprinsip kepada irigasi sebagai prasarana penyedia air harus mampu mendukung penganekaragaman usaha tani sesuai dengan permintaan produk niaga yang berubah-ubah. Sesuai dengan pendapat tersebut, karenanya pengelolaan irigasi memerlukan adanya pelaksanaan nilai-nilai *good governance*. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan irigasi (Pusposutardjo, 1995) bahwa salah satu ciri sistem irigasi adalah bersifat terbuka dan berwawasan pencapaian tujuan yang ditentukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Sesuai dengan pendapat tersebut yang perlu diperhatikan adalah adanya pencapaian tujuan yang ditentukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan, hal ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok berkepentingan mempunyai peranan yang dominan dalam menentukan

tujuan pengelolaan irigasi, oleh karenanya pada kedua Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon mempunyai tujuan pengelolaan yang berbeda tergantung kepada kelompok-kelompok yang dominan karena keduanya dikelola oleh lembaga pengelola irigasi yang berbeda yaitu Pemerintah dan petani, sehingga kepentingan pemerintah akan lebih dominan pada daerah Irigasi Menturus sedangkan kepentingan petani akan lebih terakomodasikan pada Daerah Irigasi Penewon.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pusposutardjo dan Islamy nampak bahwa pada dasarnya pengelolaan irigasi dilakukan agar mampu mendukung usaha pertanian sesuai tuntutan niaga dan berujung pada kepentingan masyarakat. Pengelolaan irigasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi petani haruslah mampu menjawab kedua tantangan itu yaitu harus mampu mendukung usaha pertanian sesuai tuntutan niaga dan berujung pada kepentingan masyarakat.

Mengacu kepada pengelolaan yang dilakukan pada Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon, apabila dikaitkan dengan dua pendapat yang dikemukakan oleh Pusposutrardjo dan Islamy, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengarahkan pengelolaan irigasi untuk memenuhi kepentingan petani. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Roderick Martin (1990) yang menyatakan bahwa kekuasaan mengacu pada suatu jenis pengaruh yang dimanfaatkan oleh si obyek, individu atau kelompok terhadap kelompok lainnya.

Arti kekuasaan yang disampaikan oleh Roderick adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang atau pihak lain supaya tunduk dan melakukan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Kekuasaan mengandung unsur-unsur

pengaruh, kepatuhan, pemaksaan dan otoritas, dan apabila hal ini dipadukan dengan pendapat Pusposutardjo tentang ciri-ciri sistem irigasi yang salah satunya adalah berwawasan pencapaian tujuan yang ditentukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Dari pendapat-pendapat yang disampaikan, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon akan nampak bahwa pada Daerah Irigasi Menturus yang dikuasai oleh pemerintah akan cenderung untuk mempengaruhi dan memaksakan kepada pihak lain/petani untuk tunduk dan patuh kepada keinginan dari pemegang kekuasaan pengelolaan irigasi yaitu pemerintah. Ini berakibat kepada hilangnya orientasi kepada kepentingan petani/masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Islamy (1984), bahwa kebijakan publik haruslah berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Ini berbeda dengan pelaksanaan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Penewon, dimana kekuasaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh masyarakat petani melalui Organisasi HIPPA dengan keputusan tertinggi adalah pada rapat anggota organisasi tersebut. Kondisi yang demikian itu menjadikan kalupun ada pengaruh atau pemaksaan keinginan arahnya tetap mengarah kepada kepentingan masyarakat petani.

Namun demikian perlu disadari bahwa kekuasaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak diikuti dengan wewenang, sebagaimana diutarakan oleh Abdulsyani (1994) yang menyatakan bahwa wewenang erat kaitannya dengan kekuasaan, dengan wewenang berarti seseorang mempunyai hak untuk melakukan dan menetapkan sesuatu. Jadi wewenang lebih menekankan kepada unsur hak, bukan pada kekuasaannya. Secara sosiologis wewenang merupakan suatu kekuatan

yang sah untuk menjalankan kekuasaan, artinya kekuasaan baru dapat diterima oleh masyarakat apabila dilengkapi dengan adanya wewenang yang sah, baik berdasarkan hukum formal, maupun berdasarkan norma-norma sosial dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemberian hak pengelolaan irigasi kepada masyarakat bukan saja diberikan mengenai kekuasaan untuk mengelola tetapi juga kewenangan untuk mengelola. Dengan demikian akan tercipta suatu partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi sebagaimana dengan pendapat Mubyarto dan Sartono (1988) dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan pedesaan yang dinyatakan:

“ada 4(empat) gagasan esensial dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan pedesaan yaitu: (1). Strategi harus koheren; (2). Sifat program harus luwes; (3) harus ada kebijaksanaan (dan tekad) politik yang tegas; (4) mengikutsertakan seluruh rakyat”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai penerapan nilai-nilai *Good Governance* khususnya nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan irigasi memang perlu untuk dilakukan, hal ini mengingat pengelolaan irigasi yang diarahkan agar mampu mendukung usaha pertanian sesuai dengan tuntutan niaga yang semakin beragam seiring dengan perkembangan jaman di era globalisasi, oleh karenanya diperlukan adanya pengelolaan irigasi yang paling efisien. Pencapaian efisiensi sebagaimana telah diuraikan dimuka diperlukan adanya penerapan nilai partisipasi dari seluruh masyarakat petani, hal inipun seperti disampaikan oleh Mubyarto dan Sartono bahwa untuk pembangunan pedesaan memerlukan partisipasi masyarakat, disamping itu dalam menentukan langkah ke depan berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan memerlukan adanya ketransparanan dalam penyusunan kebijakan

dalam pengelolaan irigasi, sehingga tidak terjadi ketidak tahuan informasi mengenai keirigasian yang berdampak kepada gagal panen atau hasil panen tidak optimal seperti yang terjadi pada daerah Irigasi Menturus. Disamping itu penerapan nilai-nilai akuntabilitas juga sangat diperlukan mengingat penyelenggara pengelola irigasi bisa juga melakukan kesalahan atau penyelewengan. Dengan akuntabilitas ini diharapkan penyelenggaraan pengelolaan irigasi baik teknis maupun finansial tidak menyimpang dari kepentingan yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban yaitu masyarakat/petani.

Berdasarkan opini-opini yang ada di masyarakat berkaitan dengan pengelolaan irigasi, sebagian besar masyarakat (petani) menginginkan adanya penyerahan kewenangan pengelolaan kepada organisasi petani (Gabungan HIPPA). sebagaimana disampaikan oleh Pengurus Gabungan HIPPA Tirta Agung yang menyatakan bahwa kedepan sebaiknya kewenangan pengelolaan irigasi tetap dikelola oleh petani melalui organisasi petaninya, karena disamping telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota organisasi juga telah membawa dampak efisiensi yaitu minimal tidak ada areal sawah yang mengalami gagal panen atau tidak mendapatkan alokasi air irigasi mulai dari hulu sampai hilirnya.

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam pengelolaan irigasi, disamping penerapan nilai-nilai *good governance* juga diperlukan adanya interelasi hubungan yang diciptakan untuk menambah keandalan pengelolaan irigasi seperti hubungan dengan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan irigasi dari ketiga pilar *Good Governance* yaitu Pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa data di lapangan baik pada

Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon nampak bahwa dalam pengelolaan irigasi masih dilakukan pada dua pilar *Good Governance* yaitu pemerintah dan masyarakat dengan pola hubungan yang hampir sama hanya beda pada kadar(erat atau tidaknya hubungan) dan sifat hubungannya (berkaitan lintas organisasi atau masih dalam organisasi). sedangkan swasta masih belum melakukan kegiatan apapun dalam pengelolaan irigasi.

**BAB 6****KESIMPULAN****6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian yang dilakukan yaitu antara lain:

- a. Penerapan nilai-nilai *Good Governance* khususnya nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada dasarnya sudah dilakukan pada kedua Daerah Irigasi, namun keduanya melakukan nilai-nilai tersebut dengan cara yang berbeda yaitu pada Daerah Irigasi Menturus nilai-nilai partisipasi dilakukan melalui cara perwakilan dari petani atau aspirasi yang berhasil dijaring oleh petugas juru pengairan dari lapangan. Oleh sebab itu transparansi yang dilakukan juga hanya kepada sebagian petani yang mewakili dalam rapat-rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan oleh Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Akuntabilitas yang berkaitan dengan teknis dan keuangan dilakukan juga hanya kepada Pemerintah sedangkan masyarakat/petani tidak dilibatkan didalamnya. Sedangkan sebaliknya pada daerah Irigasi Penewon semua kegiatan pengelolaan irigasi sudah dilakukan oleh petani yang difasilitasi oleh Pembina HIPPA Kabupaten Mojokerto. Nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan kepada seluruh anggota HIPPA. Mekanisme akuntabilitas disamping dilakukan kepada anggota Gabungan HIPPA Tirta Agung juga

dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto selaku pengemban tugas penerima penyerahan pengelolaan irigasi dari Bupati kepada ketua gabungan HIPPA Tirto Agung khususnya akuntabilitas dalam kinerja pengelolaan irigasi secara teknis.

- b. Penerapan nilai-nilai *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi membawa dampak terhadap efisiensi dalam pengelolaan irigasi. Hal ini dapat dilihat dari analisa yang dilakukan pada kedua Daerah Irigasi yaitu Menturus dan Daerah Irigasi Penewon, dimana penewon yang sudah melakukan pengelolaan secara mandiri oleh petani mempunyai dampak yang langsung yaitu tidak adanya areal sawah pada daerah ini yang mengalami gagal panen akibat kekurangan air irigasi. Kondisi ini disebabkan selain fungsi jaringan irigasi terawat dengan baik akibat adanya partisipasi yang dilakukan oleh seluruh anggota Gabungan HIPPA Tirto Agung, hal ini dikarenakan dengan adanya partisipasi dari petani pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi lebih ringan, mudah, cepat dan memerlukan biaya yang rendah. Selain itu juga akibat mudahnya informasi penting yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi yang berguna bagi penetapan pola tanam yang akan diimplementasikan, sehingga ini berdampak kepada tidak adanya petani yang melakukan usaha pertanian yang tidak mempertimbangkan potensi air yang teredia untuk irigasi. Hal ini tidak didapati pada Daerah Irigasi Menturus, karena semua kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan irigasinya diserahkan kepada Cabang Dinas Pengairan Gedeg. Efisiensi



yang diperoleh dengan penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan irigasi sebagaimana pada tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1. Efisiensi dengan penerapan *Good Governance*

DAERAH IRIGASI MENTURUS	DAERAH IRIGASI PENEWON
Biaya pengelolaan irigasi tinggi	Biaya pengelolaan irigasi rendah
Beban pekerjaan pengelolaan berat, sulit dan lambat karena luasnya areal yang harus ditangani sangat besar	Beban pekerjaan pengelolaan menjadi ringan, mudah dan cepat karena ada pembagian kewajiban sehingga jaraknya juga dekat
Masih terdapat areal yang tidak mendapatkan alokasi air sehingga tidak bisa menanam	Air terdistribusi secara merata keseluruh areal irigasi yang ada, sehingga tidak ada areal irigasi yang mengalami "Gadu"
Penetapan pola tanam sulit diterapkan	Penetapan pola tanam dapat diterapkan
Masih memungkinkan adanya kerusakan jaringan yang lebih parah	Kerusakan yang lebih parah dapat dihindarkan
Jumlah personil pengelola irigasi dari pemerintah banyak	Jumlah personil pengelola irigasi dari pemerintah sedikit

- c. Pengelolaan irigasi ke depan, apabila mengacu kepada analisa data dan respon masyarakat pada Daerah Irigasi Menturus dan Daerah Irigasi Penewon, maka sebaiknya pengelolaan irigasi diserahkan kepada organisasi petani (HIPPA) untuk mengelola jaringan irigasi. Hal ini dapat dipahami karena apabila wewenang pengelolaan irigasinya diserahkan kepada pemerintah, maka kepentingan pemerintah akan lebih mendominasi dalam pengelolaan irigasinya baik secara teknis maupun finansial, karena sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan tulisan ini, bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang cenderung untuk mempengaruhi dan memaksakan kepada orang yang dikuasai untuk menganut dan mengikuti keinginannya. Oleh

karenanya dalam pengelolaan irigasi kedepan sebaiknya dilakukan oleh organisasi petani, dengan tetap menerapkan nilai-nilai *good governance* yaitu nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan pengelolaannya. Hal ini untuk menjaga agar maksud dan tujuan pengelolaan tidak menyimpang dari keinginan dan kepentingan bersama antar petani anggota organisasi.

## 6.2. Saran

Dalam pembahasan interelasi organisasi petani pemakai air irigasi nampak adanya hubungan (interelasi) antara Gabungan HIPPA dengan Pemerintah, baik pemerintah Daerah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat. Namun demikian belum ada interelasi antara organisasi pengelola irigasi dengan lembaga swasta, padahal dalam *Good Governance* terdapat tiga pilar yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karenanya ke depan perlu dilakukan kajian dan penelitian lanjutan mengenai peran serta lembaga swasta dalam pengelolaan irigasi.

### Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*, Diterbitkan Oleh Bumi Aksara. Jakarta
- Anonymous, 1999, *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999*, tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi
- Anonymous, 2000, *Pembangunan Jangka Menengah Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2000*, Pemerintah Kabupaten Mojokerto
- Anonymous, 2001, *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001*, tentang Irigasi
- Anonymous, 2003, *Data Potensi Daerah Kabupaten Mojokerto*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto
- Anonymous, 2004, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004*, tentang Sumberdaya Air
- Arif, Sigit Supadmo. 1999. *Review Tentang Kajian Evaluatif Program Penyerahan Irigasi Kecil (PIK)*. Study kasus di Empat Daerah Irigasi Kecil di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Proceeding Kajian Evaluatif Program Penyerahan Irigasi Kecil (PIK). Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada – *International Irrigation Management Colombo*. Yogyakarta.
- Atmanto, Sudar D., 2004, *Kebijakan Setengah Hati Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Petani*, Beberapa kasus dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi, Jaringan Komunikasi Irigasi Indonesia (JKII) dan PSDAL – LP3ES, Jakarta
- Cohen. JM and Up Hoff N.N. 1997. *Rural Development Participant Concept and Measure For Project Design Implementation and Evaluation* Ithaca, Cornell University of Rural Development Committee.
- Faisal, Sanapiah, 1995. *Format-format Penelitian Sosial*, Dasar-dasar dan Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gaventa, Jhon dan Valderrama, Camilo, 2001, *Mewujudkan Partisipasi*, 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21, Governance and Society Unit The British Council Indonesia, Jakarta.

- Jasin, Fattah, 2004, *Kebijakan Pembangunan Irigasi*, Study Tentang Kebijakan Pengelolaan Irigasi, Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani di Jawa Timur, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Juliantara, Dadang, 2000, *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat*, Emansipasi dan Demokrasi Mulai dari Desa, Lapera Pustaka Utama, Yayasan lapera Indonesia, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2001, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mubyarto dan Sartono, 1988, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Oakly, P. 1991. *Project With People*, International labour Organization, Geneva
- Pusposutardjo, Suprodjo, 1995. *Peranan P3A Dalam Pengembangan Pertanian Dan Pertanian Pembangunan Jangka Panjang II (PJP)*. Makalah disampaikan dalam Lokakarya pengembangan dan pembinaan P3A secara terpadu menuju kemandirian dan kelestariannya, Yogyakarta.
- Pusposutardjo, Suprodjo, 1995. *Permasalahan Sosio Kultural Sebagai Dampak Pembangunan Pengairan*. Bahan Kuliah Pelatihan Teknik Lingkungan Sungai untuk Pencegahan Bencana di Bandung, Bandung.
- Roderick Martin, 1990. *Sosiologi Kekuasaan* (terjemahan Herry Joediono), Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama, Jakarta.
- Supeno, Eko, 2005, *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah, Dalam Negara Kesatuan*, Pusataka Pelajar (anggota IKAPI), Yogyakarta.

The Liang Gie, 1979, *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, *GOOD GOVERNANCE. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Lembaga Administrasi Negara, ISBN, Jakarta.

Todaro, Michael. 1977, *Economic Development in the third world*. london: Longmans.

Vermillion, D.L. and Johnson II. 1995. *Turnover and irrigation service fees; Indonesia's new policies to achieve economically sustainable irrigation. Irrigation and drainage system*.

**Lampiran 1. Pedoman Wawancara**

## 1. Identitas Responden/Informan:

Nama :

Instansi :

Jabatan :

Alamat :

## 2. Pertanyaan Pokok:

**AKUNTABILITAS**

- Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan kepada anggota/dalam organisasi?
- Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kinerja kepada anggota/dalam organisasi?
- Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan kepada pihak lain terkait dgn organisasi?
- Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kinerja kepada pihak lain terkait dgn organisasi?

**TRANSPARANSI**

- Bagaimana perumusan kebijakan program/kegiatan? tujuannya apa? Usulan yang ada dari siapa? Siapa saja yang terlibat?
- Bagaimana keterbukaan dalam pengelolaan irigasi? Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan?
- Bagaimana keterbukaan dalam pengelolaan keuangan? Sebutkan sumber-sumber dana dari mana saja? sebagian besar penggunaan dana untuk apa? Bagaimana keikutsertaan petani dalam pengelolaan dana?

## PARTISIPASI

- Bagaimana kesadaran petani dalam pengelolaan irigasi? Ada keterpaksaan atau sukarela dengan penuh kesadaran?
- Bagaimana kemauan menerima dan menanggapi keg. Pembangunan? Ada/tidak sikap penolakan dari masyarakat? Kalau ada bentuk-bentuk penolakan dan perlawanan seperti apa? Kalau tidak bentuk-bentuk penerimaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk apa?
- Bagaimana kaktifan berinisiasi dan menggunakan kebebasan? Apakah petani aktif/tidak mengusulkan sesuatu?
- Bagaimana petani mengurusinya sendiri? ada/tidak kepentingan diri yang diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan?
- Bagaimana cara-cara petani memperjuangkan kepentingan diri mereka? dan kepentingan orang lain?
- Seberapa sering ada kendala/masalah? Sumber-sumber masalah dari mana? Sifat masalah yang sering muncul seperti apa teknis (aturan, kesepakatan, dll) atau non teknis (budaya, perilaku, dll)?
- Loyalitas yang dilihat dari bagaimana tanggungjawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan? Bagaimana kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan? Adakah sikap-sikap obyektif terhadap menjalankan pekerjaan/kewenangan (tidak hanya tertuju pada kewenangan dan program pemerintah)?
- Bagaimana kemampuan untuk mengelola/memobilisasi sumber alam, SDM dan mengelola dana?

**Lampiran 2 . Jadwal Penelitian**

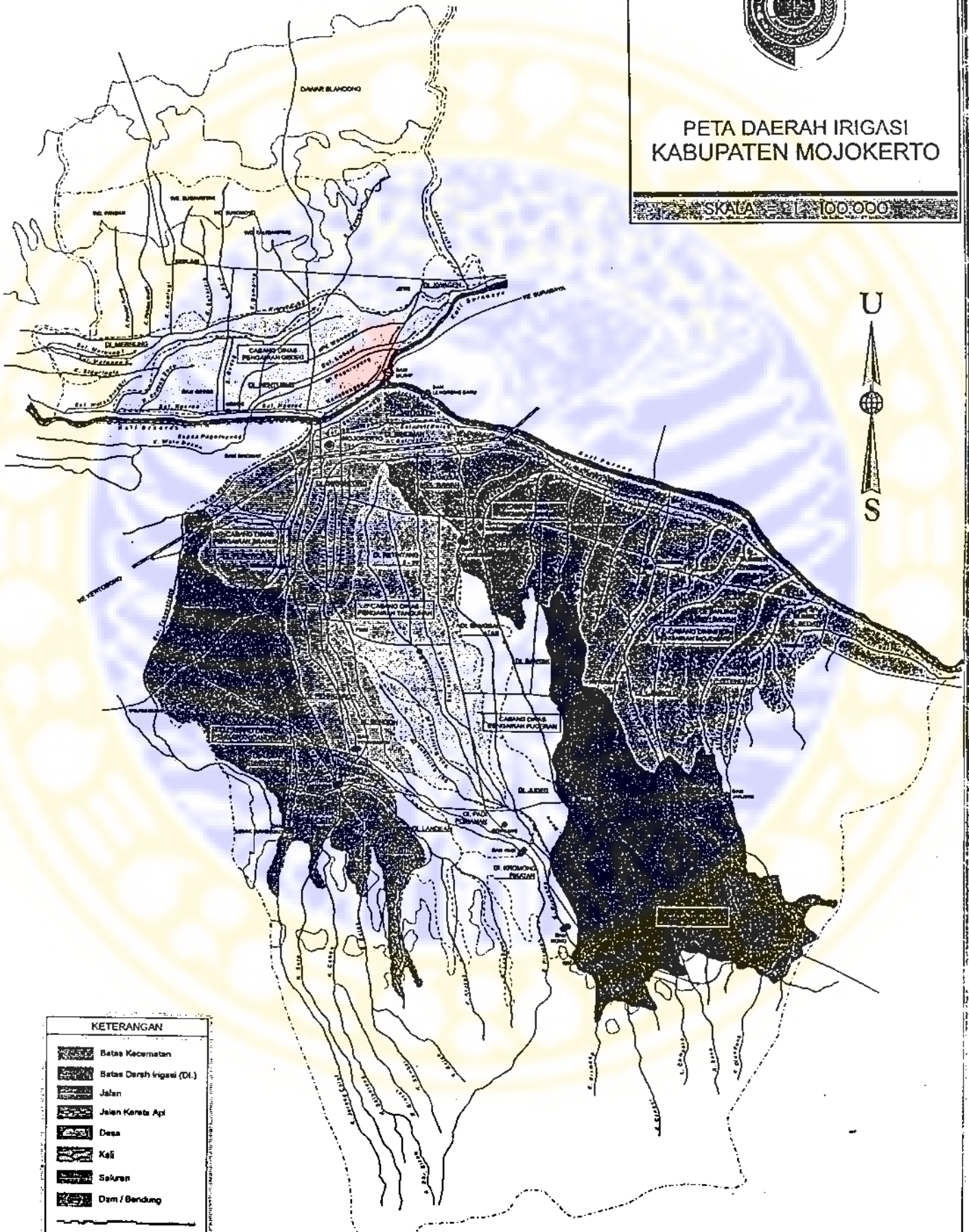
NO	URAIAN	2005					2006
		Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	Jan.
1	Persiapan	■					
2	Pencarian Data lap.		■	■			
3	Pengolahan Data dan Analisa Data	■		■	■		
4	Penyusunan Laporan Penelitian	■			■	■	
5	Sidang/Ujian						■





# PETA DAERAH IRIGASI KABUPATEN MOJOKERTO

SKALA 1 : 100.000

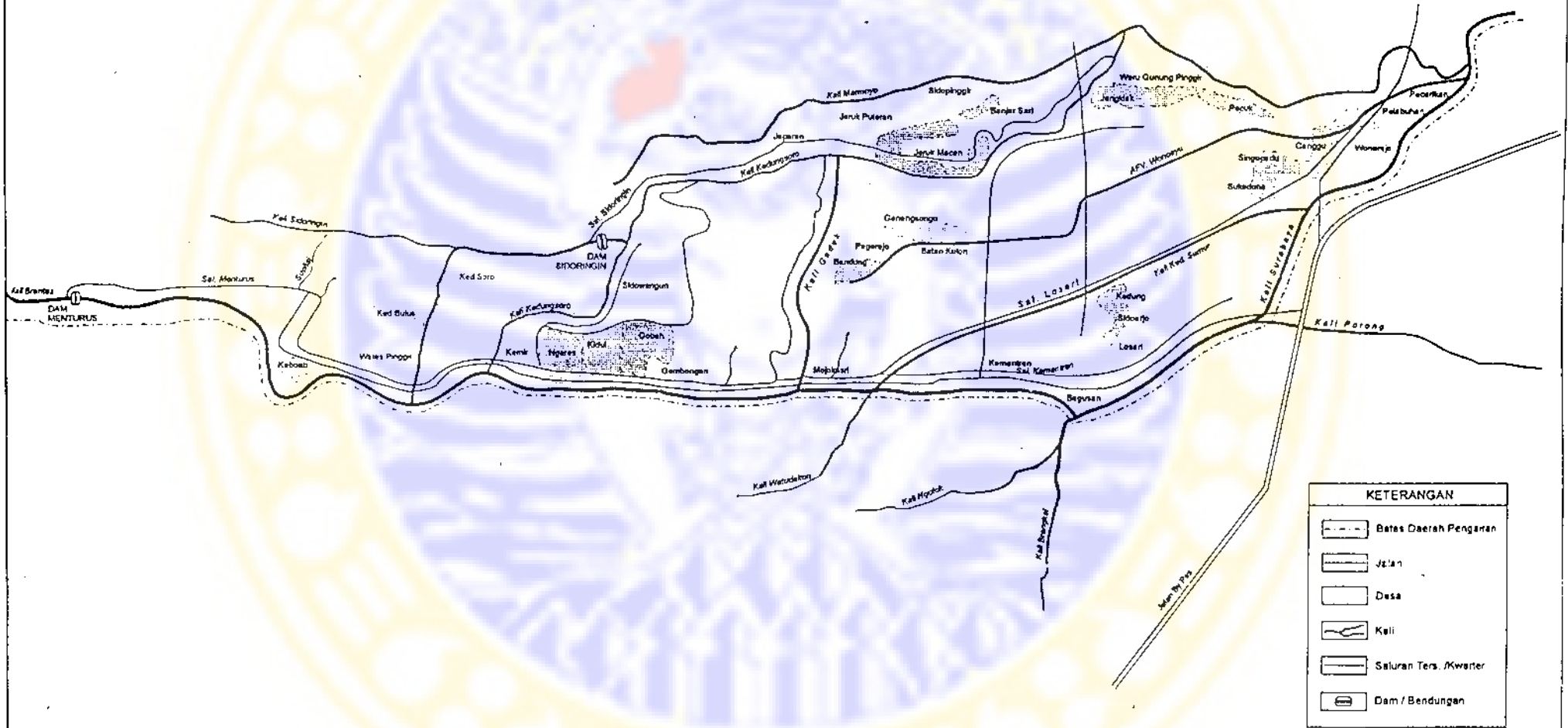


KETERANGAN	
	Batas Kecamatan
	Batas Daerah Irigasi (DI.)
	Jalan
	Jalan Kerata Api
	Desa
	Kali
	Sakuran
	Dem / Bendung



PETA DAERAH IRIGASI  
D.I. MENTURUS  
CABANG DINAS PENGAIRAN GEDEG

ADLN - Perpustakaan Unair



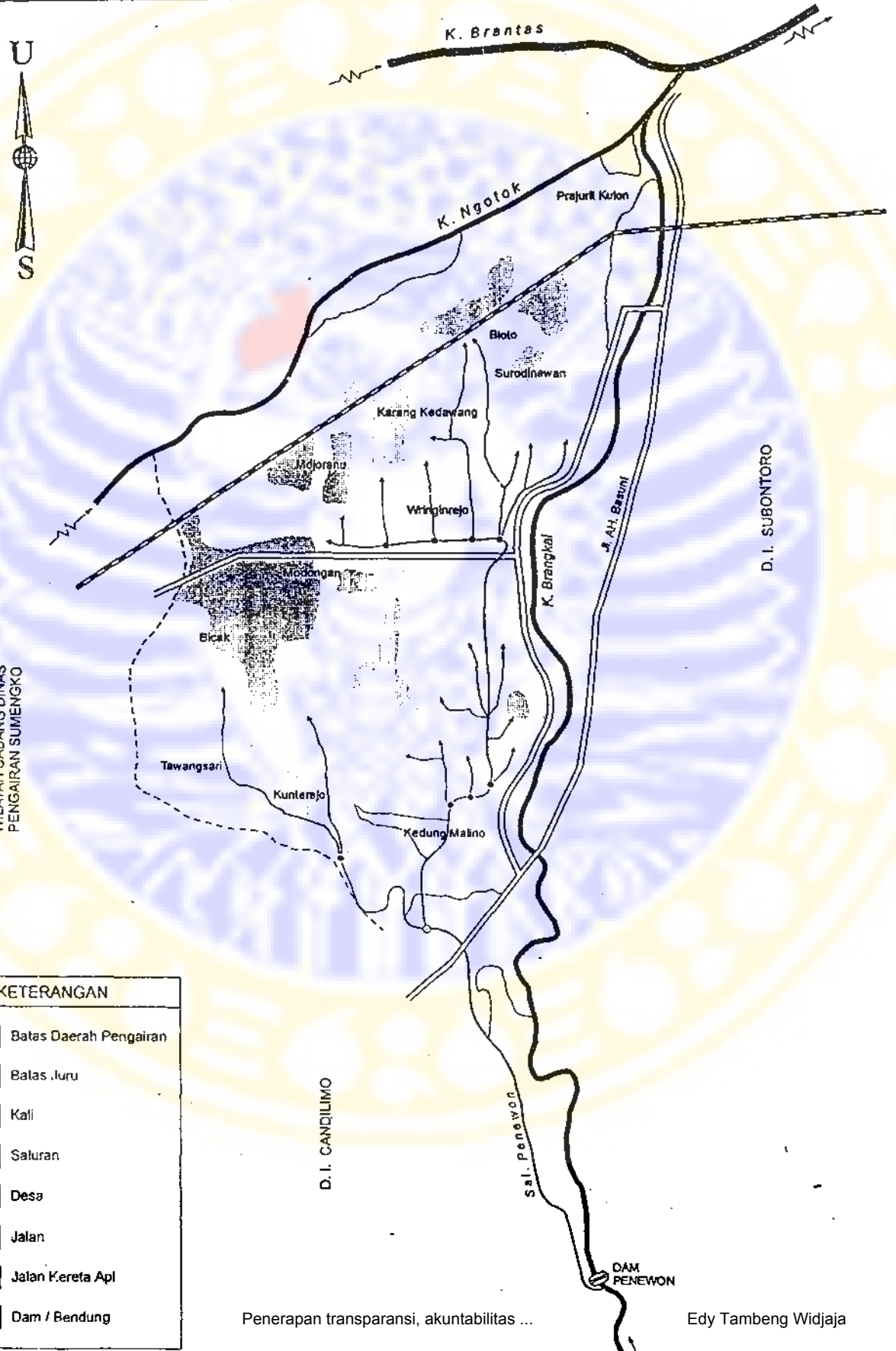


# PETA DAERAH IRIGASI D.I. PENEWON CABANG DINAS PENGAIRAN BRANGKAL



WILAYAH CABANG DINAS  
PENGAIRAN SUMENGGOKO

KETERANGAN	
	Batas Daerah Pengairan
	Batas Juru
	Kali
	Saluran
	Desa
	Jalan
	Jalan Kereta Api
	Dam / Bendung



D. I. CANDILIMO